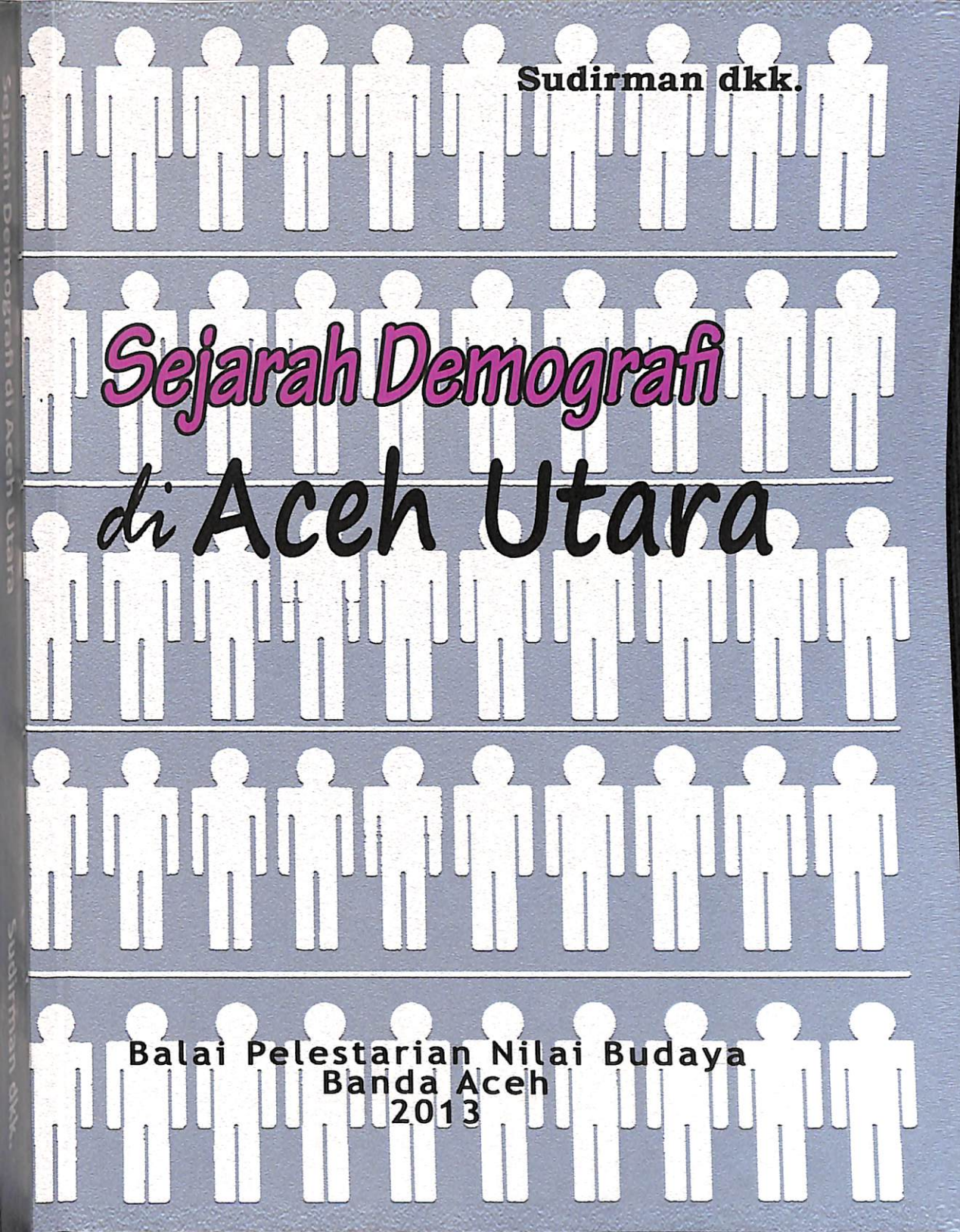




Sudirman dkk.

Sejarah Demografi
di **Aceh Utara**

Balai Pelestarian Nilai Budaya
Banda Aceh
2013

SEJARAH DEMOGRAFI ACEH UTARA

**Sudirman | Sri Waryanti | Nasruddin AS
Hasbullah | Agung Suryo Setyantoro**

SEJARAH DEMOGRAFI ACEH UTARA

**Editor:
Rusdi Sufi**

BPNB Banda Aceh

Sudirman, dkk.,
Sejarah Demografi Aceh Utara
Banda Aceh: BPNB Banda Aceh Press, 2013

xx+261 hlm; 14,8x21 cm

ISBN:978-602-9457-24-7

Sejarah Demografi Aceh Utara

Penulis:

Sudirman - Sri Waryanti - Nasruddin AS
Hasbullah - Agung Suryo Setyantoro

Editor:

Rusdi Sufi

Penerbit:

BPNB Banda Aceh Press (Anggota IKAPI No.012/DIA/2013)
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 17 Banda Aceh
Telp. 0651-23226 Fax. 0651-23226

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PENGANTAR PENERBIT

Suatu pernyataan menyatakan bahwa manusia telah menciptakan hari depannya melalui karya-karya hari ini atas dasar apa yang telah diperbuat pada masa lampau. Dari pernyataan tersebut, segala peristiwa dan kejadian pada masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat menjadi penting artinya sebagai pedoman pada masa kini, serta sebagai pengarah ke masa depan.

Masa lampau telah berlalu. Kejadian atau peristiwa yang merupakan aktivitas manusia tidak dapat kita saksikan lagi secara langsung. Sejarah bukan hanya dokumen masa lalu, tetapi cermin bagi masa depan. Kita memang bukan fajar yang menyingsing, kita hanyalah ayam yang berkokok setelah fajar bersinar, kata Muhammad Hatta. Dokumen sejarah penting artinya bagi masa depan, agar kita tidak terjebak dalam pengulangan kesalahan yang telah dilakukan masa lalu. Di lain pihak, sejarah juga panduan jalan dan kesaksian bagi generasi yang tidak terlibat dalam hiruk pikuk gelombang zaman. Di sini akan tertransformasikan nilai-nilai positif masa lalu bagi kehidupan hari ini dan masa mendatang. Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai tersebut dicerminkan dari ketulusan, konsistensi, kejujuran, keadilan, dan kebesaran jiwa para pemimpin bangsa dalam memahami dinamika masyarakat dalam membangun integritas bangsa.

Dalam konteks yang berbeda, buku ini menyajikan cuplikan sejarah masa lalu di Aceh Utara. Sejarah demografi di Aceh Utara dilihat dari dua faktor yang sangat dominan

yaitu, faktor pertama adalah yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan, serta yang mempengaruhi penduduk. Adapun faktor yang kedua adalah masalah-masalah yang bersifat *universal* yang dikaji dalam suatu hubungan antara penduduk dengan perkembangan sosial-budaya, khususnya sejarah.

Sejarah demografi dalam buku ini memiliki karakteristik tersendiri. Di antara pertumbuhan dan perubahan penduduk itu ada yang dipengaruhi oleh faktor transmigrasi, politik, dan pendidikan. Demigian pula, pertumbuhan industri di suatu daerah sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan penduduk.

Seluruh fenomena, karakteristik, pertumbuhan, dan perkembangan penduduk dipaparkan pada setiap bagian buku ini. Para penulis, Sudirman dkk telah menampilkan masa lalu Aceh Utara dari sisi demografi. Buku ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang bergelut dengan sejarah, tetapi juga setiap orang yang ingin mengetahui pertumbuhan dan perkembangan penduduk masa lalu. Bercermin dari sejarah masa lalu akan terhindarkan kita dari kesalahan pengurusan penduduk sehingga dapat mengurangi permasalahan kependudukan. Untuk itu, buku ini perlu dibaca!

BPNB Banda Aceh Press

KATA SAMBUTAN

Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh

Dalam upaya membangun masa depan bangsa, masyarakat majemuk bukan hanya sebuah wacana, melainkan sebagai gerakan yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya mengetahui budaya daerah menjadi lebih penting kalau diingat bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Hal yang demikian memerlukan kesabaran, ketekunan, dan penuh pengertian yang baik di antara penyelenggara pemerintah maupun anggota masyarakat. Untuk mendukung misi tersebut, diperlukan data dan informasi yang memadai tentang sejarah dan budaya masyarakat, di antaranya adalah masalah kependudukan.

Kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pendataan penduduk, kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, pemindahan penduduk, dan sebagainya. Dengan demikian, aspek demografi perlu diteliti sehingga kebijaksanaan pembangunan selalu mempertimbangkan keberadaannya.

Buku ini diterbitkan untuk memahami bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta dampaknya terhadap perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Aceh Utara. Selain itu, sebagai upaya peningkatan

apresiasi masyarakat terhadap sejarah bangsanya sehingga dapat memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan.

Terbitnya buku ini, selain menambah informasi tentang sejarah daerah, juga memperkaya khazanah literatur tentang Aceh. Dengan demikian, ia diharapkan dapat menjadi masukan, baik untuk kepentingan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah maupun untuk memperluas wawasan masyarakat tentang negara dan bangsanya

Banyak pihak yang telah membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan. Untuk itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca kami terima dengan lapang dada demi perbaikan selanjutnya.

Banda Aceh, Desember 2013



Irini Dewi Wanti, S.S., M.SP
NIP 1971052319960120001

PENGANTAR EDITOR

Memulai melakukan sesuatu tentu lebih baik daripada tidak melakukan sama sekali. Kalimat itulah yang mungkin lebih tepat untuk membuka perbincangan tentang buku ini. Apa yang telah dilakukan oleh penulis buku ini saya rasa merupakan suatu keberanian karena masih jarang sekali para ahli di bidang sejarah yang melakukan penelitian tentang demografi.

Sebagaimana tercermin dalam tulisan ini, penulis tidak semata-mata melakukan kajian sejarah demografi melalui pendekatan demografi sebagaimana yang dikaji dalam disiplin ilmu demografi, tetapi telah memperluas jangkauan kajiannya dengan memandang dari berbagai dimensi.

Seperti diungkapkan oleh penulis buku ini, memang pada mulanya, teori kependudukan dikembangkan oleh dua faktor yang sangat dominan yaitu, yang pertama adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk terutama di negara-negara yang sedang berkembang dan hal ini menyebabkan agar para ahli memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penduduk. Adapun faktor yang kedua adalah adanya masalah-masalah yang bersifat *universal* sehingga harus banyak mengembangkan dan menguasai kerangka teori untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana telah terjalin suatu hubungan antara penduduk dengan perkembangan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu,

dalam hal ini demografi adalah Studi tentang penduduk di dalam kerangka sejarah dan jalinannya dengan berbagai disiplin ilmu.

Untuk itu, tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini banyak dikaji masalah-masalah yang bersifat universal dari faktor demografi. Dengan demikian akan memperkaya bidang kajian sejarah demografi yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari penulis-penulis sejarah.

Ilmu sejarah adalah usaha akademis untuk menerangi hal-hal yang telah tertutup oleh kegelapan zaman. Pengetahuan sejarah ingin menerangi kembali yang telah gelap ditelan zaman dan mengingatkan lagi yang telah terlupakan dalam perjalanan waktu. Karena itulah penulis buku ini tidak semata-mata memulai tulisannya dari data sejarah yang telah tercatat, tetapi juga menggali ingatan kolektif yang terekam dalam ingatan masyarakat.

Sesuai dengan batasan temporalnya yang temporer, sumber lisan dapat digunakan sebagai sumber yang dapat memberikan kemungkinan luas untuk menggali suatu peristiwa langsung dari pelakunya yang tidak ditemukan dalam dokumen tertulis. Sejarah kontemporer sekitar tahun 1970-an hingga kini kebanyakan masih tersimpan dalam ingatan para pelaku sehingga sejarah lisan dapat menggambarkan peristiwa secara menyeluruh. Karena itu, patut kita hargai apa yang telah dirintis oleh penulis.

Terlepas dari berbagai kekurangan, tentu lebih banyak kelebihannya yang dapat diambil manfaat. Untuk

itu, biarlah para sejarawan yang telah merintis karya yang berharga ini melanjutkan studi mereka mengenai hal-hal yang menyangkut *histoire de mentalite* daerah yang penuh dengan peristiwa bersejarah ini.

Drs. H. Rusdi Sufi

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur penulis persembahkan kepada Allah Yang Maha Esa karena atas kehendak-Nyalah buku ini dapat diterbitkan. Buku berjudul Sejarah Demografi ini membahas dinamika kependudukan di Aceh Utara. Buku ini merupakan hasil penelitian tentang demografi yang mengkaji tentang berbagai dimensi kependudukan. Namun demikian, dalam kajian kependudukan, di sini tidak semata-mata dilakukan berdasarkan pendekatan disiplin demografi yang hanya mengkaji *fertilitas*, *mortalitas*, dan *migrasi*, tetapi demografi dikaji dari perspektif sejarah. Dalam hal ini, bagaimana hubungan antara demografi dengan perkembangan ekonomi dan sosial budaya. Untuk itu, dalam buku ini diungkapkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan penduduk serta dampaknya terhadap perubahan sosial, budaya, ekonomi, dan politik

Pengetahuan tentang demografi penting diketahui oleh semua pihak, terutama lembaga-lembaga swasta dan pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Masalah kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pendataan penduduk, kesehatan, keluarga berencana, tenaga kerja, pemindahan penduduk, dan sebagainya.

Dalam upaya membangun masa depan bangsa, masyarakat majemuk bukan hanya sebuah wacana, melainkan sebagai gerakan yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan

sebagai landasan bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya mengetahui budaya daerah menjadi lebih penting kalau diingat bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Hal yang demikian memerlukan kesabaran, ketekunan, dan penuh pengertian yang baik di antara penyelenggara pemerintah maupun anggota masyarakat. Untuk mendukung misi tersebut, diperlukan data dan informasi yang memadai tentang sejarah dan budaya masyarakat.

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik utama pengumpulan data atau sumber, yaitu wawancara dan studi pustaka. Informan yang dipilih adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami sumber dan informasi tentang sejarah demografi. Hal itu disebabkan dalam penelitian sejarah, yang lebih penting adalah informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti. Pengumpulan data tertulis dilakukan melalui sejumlah bacaan di perpustakaan, seperti Perpustakaan Museum Aceh, Badan Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, Perpustakaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, Perpustakaan Aceh Utara, buku-buku koleksi penulis, dan sumber elektronik.

Hasil penelitian ini ditulis dalam bentuk monografi atau bunga rampai. Adapun tema-tema yang dikaji dalam penelitian sejarah demografi ini terdiri atas 5 tema, satu tema khusus menjelaskan tentang perubahan penduduk. Dua tema menguraikan industri dan transmigrasi dalam jaringan

ekonomi. Sementara dua tema lainnya membahas kesadaran dan tingkat partisipasi penduduk terhadap perpolitikan dan pendidikan.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tanpa mengurangi arti dan peran dari berbagai pihak tersebut, kesempatan pertama ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh. Hal itu disebabkan sebagai penyandang dana dan atas inisiatifnya untuk menerbitkan buku ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada editor yang telah melakukan berbagai perbaikan.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada pihak Pemda Aceh Utara, terutama Dinas Pendidikan, Badan Perpustakaan, Majelis Pendidikan Daerah, KIP, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, BPS, dan sebagainya yang telah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan selama dilakukan penelitian. Begitu juga kepada semua informan yang telah memberikan berbagai informasi berkaitan dengan objek penelitian ini, disampaikan ucapan terima kasih. Tidak lupa pula penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman di BPNB Banda Aceh yang telah memberikan pula berbagai bantuan, baik berupa literatur dan informasi maupun diskusi-diskusi dalam penulisan buku ini.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan. Akhirul kalam, hanya kepada Allah penulis

mohon petunjuk dan hidayah-Nya. Penulis berharap buku ini bermanfaat sebagai usaha menggali sumber sejarah lokal di daerah, baik sebagai masukan bagi kebijakan maupun untuk memperluas wawasan masyarakat terhadap bangsa dan negaranya.

Banda Aceh, Desember 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Pengantar Penerbit	v
Kata Sambutan	vii
Pengantar Editor	ix
Pengantar Penulis	xiii
Daftar Isi	xvi
Daftar Singkatan	xvii
Bab 1. Transmigrasi dan Pengaruhnya terhadap Kebudayaan di Aceh Utara 1975 - 2012 <i>Sudirman</i>	1
Bab 2. Industri dan Migrasi di Kabupaten Aceh Utara (Studi Kasus: Pabrik gula Cot Girek) <i>Sri Waryanti</i>	55
Bab 3. Sejarah Pendidikan di Aceh Utara dalam "Perang dan Damai" <i>Nasruddin AS.</i>	100
Bab 4. Perubahan Penduduk Kabupaten Aceh Utara (1970 - 2013) <i>Hasbullah</i>	152
Bab 5. Dinamika Politik di Aceh Utara (1970an - 2009) <i>Agung Suryo Setyantoro</i>	194
Daftar Pustaka	246
Tentang Penulis	259

DAFTAR SINGKATAN

AAF	: Aceh Asean Fertilizer
ABRI	: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AKAD	: Antar Kerja Antar Daerah
Bank Exim	: Bank Export Import
BCA	: Bank Central Asia
BI	: Bank Indonesia
BNI 1946	: Bank Negara Indonesia 1946
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
BT	: Bujur Timur
DI/TII	: Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DOM	: Daerah Operasi Militer
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRA	: Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
Golkar	: Golongan Karya
HRP	: Hikayat Raja Pasai
JADAM	: Jami'ah Diniyah Al-Muntasiyah
IPKI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

KK	: Kepala Keluarga
KKA	: Kertas Kraft Aceh
Kotif	: Kota Administratif
KUPT	: Kepala Unit Penempatan Transmigrasi
LNG	: Liqueid Natural Gas
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LU	: Lintang Utara
MAN	: Madrasah Aliah Negeri
MIN	: Madrasah Ibtidaiyah Negeri
MoU	: Memorandum of Understanding
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MTsN	: Madrasah Tsanawiyah Negeri
Murba	: Musyawarah Rakyat Banyak
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NU	: Nadhatul Ulama
OPP	: Organisasi Peserta Pemilu
PA	: Partai Aceh
PAAS	: Partai Aceh Aman Seujahtra
PAN	: Partai Amanat Nasional
Parkindo	: Partai Kristen Indonesia
Parmusi	: Partai Muslim Indonesia
Parnas	: Partai nasional
Partindo	: Partai Indonesia
Parpol	: Partai Politik

PBA	: Partai bersatu Aceh
PD	: Partai Demokrat
PDA	: Partai Daulat Aceh
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perti	: Persatuan Tarbiyah Islamiyah
PIM	: Pupuk Iskandar Muda
PIRSUS	: Perkebunan Inti Rakyat Khusus
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
PKS	: Partai Keadilan Sejahtera
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POESA	: Persatuan Oelama Seluruh Aceh
Polri	: Polisi Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
PRA	: Partai Rakyat Aceh
PSII	: Partai Syarikat Islam Indonesia
PSIRA	: Partai Suara Independen Rakyat Aceh
PT	: Perseroan Terbatas
RI	: Republik Indonesia
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
SD	: Sekolah Dasar

SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
STAIN	: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
TSDP	: Transmigrasi Swakarsa Desa Potensial
UNICEF	: United Nation International Children's Emergency Fund
UU	: Undang Undang

Bab 1

Transmigrasi dan Pengaruhnya terhadap Kebudayaan di Aceh Utara 1975 - 2012

Sudirman

1. Pendahuluan

Daerah Aceh termasuk salah satu daerah tujuan transmigrasi penduduk dari daerah lainnya di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh faktor daya tarik dan aspek sumber daya alam dan manusia. Dalam hal sumber daya alam, daerah Aceh masih mempunyai potensi yang banyak. Namun, sebaliknya dalam hal sumber daya manusia masih terbatas. Kedua keadaan di atas yang menyebabkan pemerintah memilih daerah Aceh sebagai daerah tujuan transmigrasi.

Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah yang padat penduduknya ke wilayah pulau yang penduduknya masih sedikit atau belum ada penduduknya sama sekali. Tujuan program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk yang terpusat di suatu tempat. Selain itu, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya alam.

Transmigrasi di Indonesia biasanya diatur dan didanai oleh pemerintah kepada warga golongan menengah ke bawah. Sesampainya di tempat transmigrasi para transmigran

diberikan sebidang tanah, rumah sederhana, dan perangkat lain untuk penunjang hidup di lokasi tempat tinggal yang baru.

Sebagaimana daerah pedalaman lainnya di Aceh, kawasan pedalaman Aceh Utara pada mulanya juga terisolasi. Pemerintah lalu menjadikan lokasi itu sebagai daerah Transmigrasi. Sejak tahun 1976, Aceh sudah teratur menerima transmigran. Pada tahun tersebut, di Aceh Utara ditempatkan 10.025 jiwa atau 2.201 KK. Lokasi utama yang digunakan sebagai tempat transmigrasi adalah Cot Girek dan Bukit Hagu. Penempatan transmigran di Aceh Utara terus dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

Transmigrasi sebagai salah satu unsur demografis turut mewarnai segi-segi kebudayaan. Melalui transmigrasi penduduk setempat mendapat peluang untuk berkenalan dengan sejumlah unsur kebudayaan baru. Dalam keadaan demikian, mereka biasanya mencoba membandingkan unsur-unsur kebudayaan yang mereka miliki dengan apa yang dibawa oleh para transmigran. Apabila unsur kebudayaan yang berasal dari migran tersebut dipandang lebih bermutu, pengaruhnya terlihat cukup kuat dan meluas di kalangan penduduk setempat. Pengaruh itu akan lebih intensif apabila transmigran yang memiliki unsur kebudayaan yang bermutu mendapat peluang untuk ikut memelopori jalan ke arah pembentukan kelompok sosial baru yang membawa pergeseran lebih jauh dalam masyarakat.

Dalam upaya membangun masa depan bangsa, masyarakat majemuk bukan hanya sebuah wacana, melainkan

sebagai gerakan yang harus diperjuangkan karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Pentingnya mengetahui budaya daerah menjadi lebih penting kalau diingat bahwa bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk. Hal yang demikian memerlukan kesabaran, ketekunan, dan penuh pengertian yang baik di antara penyelenggara pemerintah maupun anggota masyarakat. Untuk mendukung misi tersebut, diperlukan data dan informasi yang memadai tentang sejarah dan budaya masyarakat. Untuk itu, permasalahan tersebut penting dilakukan dalam penelitian "Transmigrasi dan Pengaruhnya terhadap Kebudayaan di Aceh Utara 1975 - 2012."

Bertitik tolak dari kenyataan dan latar belakang pemikiran seperti disebutkan di atas. Lewat studi ini menarik untuk di pertanyakan tentang bagaimana perkembangan transmigrasi di Aceh Utara? Apa pengaruh yang telah ditimbulkan terhadap unsur-unsur kebudayaan di daerah Aceh, akibat adanya kontak sosial antara transmigran dengan penduduk setempat?

Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut. Secara teoretis dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi gagasan suatu model penelitian dan penulisan sejarah di daerah. Adapun kegunaan secara praktis, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan kebijakan tentang transmigrasi dalam rangka mengatasi masalah distribusi penduduk dan ketenagakerjaan yang bertujuan memperbaiki perekonomian.

Dalam penelitian ini digunakan metode sejarah. Proses penelitian sejarah tidak terlepas dari definisi sejarah secara umum. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari dinamika dan perkembangan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial pada masa lampau,¹ mengaitkan, dan merekonstruksikannya dalam bentuk tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai karya tulis sejarah. Hasil penulisannya adalah sejarah sebagai kisah yang menerangkan dan memahami peristiwa sebagaimana terjadinya.

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman masa lampau.² Dengan demikian, penelitian yang menggunakan metode penelitian sejarah harus menggunakan pula aturan dan prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu sejarah. Ada beberapa tahap yang harus ditempuh dalam penelitian sejarah dengan metode kritis, yaitu pengumpulan sumber. Pengumpulan sumber dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka seperti yang diuraikan pada metode pengumpulan sumber di bawah ini. Verifikasi (kritik sumber dan keabsahan sumber), yang terdiri atas kritik interen untuk membuktikan kredibilitas (data dapat dipercaya atau tidak), dan kritik ekstern (digunakan untuk menguji keaslian sumber yang diperoleh). Verifikasi di antaranya dilakukan dengan melakukan pengecekan sumber-sumber primer di perpustakaan dan arsip. Selain itu, dilakukan

¹ Abdullah, Taufik. 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Press. Hlm. 6.

² Gottschalk, Louis. 1969. *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho NS. Jakarta: UI Press. Hlm. 32.

konfirmasi silang sumber-sumber yang sudah diperoleh ketika wawancara dengan saksi, tokoh, dan sejarawan. Setelah itu, dilakukan interpretasi, berupa analisis dan sintesis sebagaimana yang diuraikan pada metode analisis data di bawah ini. Tahap selanjutnya adalah penulisan tentang transmigrasi (historiografi).

Dalam penelitian ini ruang lingkup wilayah penelitian adalah Kabupaten Aceh Utara, khususnya di Bukit Hagu karena yang ingin dijelaskan adalah sejarah transmigrasi dan pengaruhnya terhadap perkembangan kebudayaan setempat. Ruang lingkup temporal (waktu) adalah 1975 hingga 2012. Tahun 1971 ditetapkan sebagai awal penelitian karena pada tahun tersebut mulai adanya transmigrasi yang dikelola oleh pemerintah. Akan tetapi, penjelasan tahun sebelumnya dalam ruang lingkup ini juga dilakukan agar latar belakang permasalahan yang diteliti dapat dijelaskan secara runtun dan berkesinambungan. Membicarakan sejarah transmigrasi dan pengaruhnya terhadap perkembangan kebudayaan setempat, dirasakan kurang lengkap apabila tidak dijelaskan tentang perkembangan transmigrasi pada masa-masa sebelumnya. Adapun tahun 2012 ditetapkan sebagai batas akhir penelitian karena ingin dijelaskan pengaruh konflik terhadap perkembangan transmigrasi.

Sifat penulisan ini adalah deskriptif-analisis. Sejarah analisis merupakan penulisan sejarah yang menguraikan mengapa sesuatu peristiwa terjadi dan menggambarkan kejadian sebagai proses yang dicakup dalam uraian analisis.³

³ Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia. Hlm. 10.

Perkembangan suatu peristiwa disertai dengan faktanya tentang apa, siapa, kapan, di mana, serta bagaimana dan kemudian diurutkan secara kronologis hubungan antara sebab dan akibat dan motivasi sebagai suatu kompleksitas kejadian-kejadian. Hal itu, dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengapa sesuatu peristiwa terjadi.

Melalui metode tersebut dapat dilakukan studi secara mendalam sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang transmigrasi. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat memberikan peluang untuk melakukan interpretasi secara akurat sehingga dapat melahirkan butir-butir pemikiran yang mengandung nilai dan kearifan bagi kepentingan kini dan akan datang.

Analisis data dilakukan pengaturan, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Oleh karena itu, analisis data dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini. Dibaca dan difahami data secara berulang-ulang sehingga diperoleh data yang sesuai dengan objek yang diteliti. Identifikasi dan klasifikasi data. Verifikasi, yakni menguji kebenaran interpretasi dan kesesuaiannya dengan data sehingga melahirkan fakta yang akurat. Memahami makna data untuk menjawab masalah yang dirumuskan, menafsirkan, dan membuat simpulan. Selanjutnya, menyajikan fakta dalam bentuk laporan penelitian tentang sejarah transmigrasi.

Pengumpulan sumber dilakukan melalui sejumlah bacaan di perpustakaan, seperti Perpustakaan Museum Aceh, Badan Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Aceh, Pusat

Dokumentasi dan Informasi Aceh, Perpustakaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Utara, buku-buku koleksi penulis, dan sumber elektronik. Studi pustaka dilakukan terhadap dua hal, *pertama*, mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai dokumen atau arsip. *Kedua*, studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai tulisan yang relevan dengan objek yang diteliti. Sumber-sumber tertulis yang digunakan dalam penelitian ini, seperti buku-buku, jurnal, buletin, dan leaflet.

Sesuai dengan batasan temporalnya yang kontemporer, sumber lisan dapat digunakan sebagai sumber yang dapat memberikan kemungkinan luas untuk menggali suatu peristiwa langsung dari pelakunya yang tidak ditemukan dalam dokumen tertulis. Teknik wawancara digunakan karena ingin menggali keterangan yang lebih mendalam tentang sejarah dan pengaruh transmigrasi terhadap budaya setempat, melalui pendapat, kesan, pengalaman, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya dari informan. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan informan atau orang yang dimintai informasi berkaitan dengan objek yang diteliti, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.⁴

⁴Bungin, H.M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 108.

Informan yang dipilih adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami sumber dan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Hal itu disebabkan dalam penelitian sejarah, yang lebih penting adalah informan memiliki pengetahuan yang cukup serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek yang diteliti.⁵ Sumber lisan juga digunakan untuk melengkapi terhadap sumber tertulis dan untuk melakukan *cross check* terhadap sumber tertulis. Oleh karena itu, informan yang digunakan untuk diwawancarai para transmigran yang tinggal di Aceh Utara, baik yang masih berada di tempat tersebut maupun sudah pindah ke tempat lain.

Sejak dahulu manusia selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Perpindahan dilakukan, baik secara perorangan, maupun dalam hubungan keluarga dan dalam bentuk kelompok. Sebab utama perpindahan adalah motif ekonomi,⁶ walaupun tidak jarang pula orang melakukan perpindahan karena alasan lain, seperti politik, agama, wabah penyakit, bencana alam, dan lain-lain.

Perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain pada umumnya adalah untuk memperbaiki taraf hidup. Hal itu disebabkan sudah berkurangnya sumber daya alam di tempat asalnya. Apabila pengetahuan atau ketrampilan untuk

⁵ *Ibid.*, hlm. 138.

⁶ Kuroda, Toshio, "Internal Migration; an Over New of Problems and Studies", *World Population Conference*, Vol. IV Migration, Urbanization and Economie Development, New York, 1967. Hlm. 506.

mengolah sumber daya alam yang tersedia tidak ada maka proses perpindahan penduduk semakin cepat. Demikian pula sumber daya manusia yang terlalu banyak dibandingkan dengan ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki serta sumber daya alam yang sudah mendekati kejenuhannya di suatu daerah, akan mencari daerah baru. Oleh karena itu, faktor sumber daya manusia inipun merupakan salah satu faktor yang mendorong perpindahan penduduk, terutama pada negara yang masih bersifat agraris.⁷

Dampak transmigrasi di antaranya: *pertama*, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama transmigran. *Kedua*, memenuhi kekurangan tenaga kerja di daerah tujuan transmigrasi. *Ketiga*, mengurangi pengangguran bagi daerah yang padat penduduknya. Dapat meningkatkan produksi pertanian. *Keempat*, mempercepat pemerataan persebaran penduduk. Selain itu, berpengaruh pula pada perkembangan kebudayaan di daerah setempat. Hal ini dilandasi oleh suatu asumsi dasar, bahwa setiap transmigransi selalu disertai oleh saling pengaruh antara berbagai unsur kebudayaan para pendukungnya.

⁷ United Nations, *Report and Selected Papers of the Regional Seminar on Ecological Implication of Rural and Urban Population Growth*, Asian population Studies Series, No. 10, Bangkok, 1971. Hlm. 12.

2. Proses Transmigrasi dan Motivasi

Alasan perpindahan yang berbeda biasanya menimbulkan pula perbedaan pada pola transmigrasi. Ada di antara transmigran dengan tujuan menetap dan merantau. Selain itu, adapula yang datang dengan tujuan menunggu kesempatan untuk dapat pindah ke wilayah lain. Namun, ada yang datang secara sukarela (spontan) dan dipindahkan melalui program-program pemindahan yang berencana. Keanekaragaman pola transmigrasi ini terutama dijumpai pada pemindahan orang dari pulau Jawa.

2.1 Motivasi Transmigrasi

Ketika ditanyakan mengapa mereka bertransmigrasi ke Aceh, kebanyakan mereka menjawab karena motif ekonomi. Alasan lain yang banyak dikemukakan adalah karena ikut suami atau orang tua. Ini berarti, bahwa transmigrasi yang mereka lakukan ada yang bukan melalui program transmigrasi. Namun, sebagian besar dari mereka datang secara berkelompok atau berombongan dan mendapatkan biaya serta bimbingan dari pemerintah. Meskipun demikian, dari penelitian ini juga dijumpai yang datang secara berkelompok, tetapi mereka bukanlah termasuk transmigrasi. Bantuan yang diperoleh berasal dari keluarga atau famili yang sudah lebih dahulu bermukim di Aceh Utara.

Adanya bantuan yang demikian, memberikan jaminan mereka bermigrasi ke Aceh. Bantuan yang diberikan biasanya berbentuk penampungan sementara selama masa permulaan

mereka bermukim. Adakalanya bantuan tampungan itu berlangsung sampai mereka berhasil mendapatkan pekerjaan tertentu dan mampu menyewa rumah tempat tinggal sendiri. Walaupun motif utama bermigrasi ke Aceh adalah bersifat ekonomi, tetapi ada pula sebagian dari pendatang yang mengatakan bahwa keadaan status ekonomi tidak mengalami perubahan, dibandingkan dengan ketika masih berada di daerah asalnya. Selain itu, dorongan mereka bertransmigrasi disebabkan penduduk di daerah asal sudah begitu padat sehingga berakibat pada sempitnya lahan.⁸ Dengan demikian, mereka ikut transmigrasi karena ingin memperbaiki kehidupan rumah tangga dan ingin memiliki tanah pertanian, terutama tanah sawah sebagaimana diijazkan oleh petugas transmigrasi.

2.2 Sikap dan interaksi

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menggambarkan sikap dan interaksi sosial antara penduduk setempat dengan pendatang adalah dengan jalan membatasi ruang lingkup permasalahannya kepada lingkaran-lingkaran hubungan sosial tertentu. Hubungan sosial demikian lazimnya dibedakan menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah hubungan sosial yang mementingkan kebutuhan kehidupan kekerabatan dan hubungan sosial yang

⁸ Wawancara dengan Bapak Suroto (Kepala Dusun Sukadamai), 5 November 2013 di Buki Hagu. Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu.

mementingkan kebutuhan hidup setempat.⁹ Melalui hubungan-hubungan sosial demikian dapat dipelajari kecenderungan masing-masing pihak untuk mau menerima pihak lainnya, baik sebagai anggota keluarga, teman sekerja, maupun sebagai tetangga. Kecenderungan itu antara lain meliputi sifat-sifat yang dipandang terpuji dan tercela, serta pola interaksi yang lazim berlangsung dalam hubungan sosial.

Perkembangan kebudayaan suatu masyarakat biasanya tidak dapat terlepas dari saling hubungan, baik di antara sesama anggota kelompok maupun dengan anggota kelompok lainnya. Kuatnya saling keterkaitan di antara sesama anggota kelompok dapat mempersulit terjadinya pergeseran dalam pola kebudayaan. Namun demikian, saling berhubungan yang kuat di antara berbagai kelompok, belum tentu selamanya merupakan jaminan bagi tidak terjadinya pergeseran tersebut.¹⁰

Antara pendatang dengan penduduk setempat seringkali terjadi hubungan yang tidak harmonis. Namun, hubungan yang demikian biasanya lebih banyak terdapat pada pendatang di kota dan di desa dibandingkan dengan penduduk setempat di kota dan di desa. Salah satu akibat keakraban hubungan tersebut karena pendatang relatif lebih banyak memilih penduduk setempat sebagai teman akrab

⁹ Abdullah, Adnan. 1976. *Transmigrasi dan Penduduk Setempat di Aceh Suatu Studi Mengenai Hubungan Sosial di antara Mereka*. Jakarta: Proyek Research Departement P & K, Darussalam. Hlm. 20.

¹⁰ Hussein, Ismael. 1972. "Hari Depan Kebudayaan Aceh". *Makalah Bandingan pada Seminar*. Hlm. 3.

dalam bergaul di kota dan di desa dibandingkan dengan pilihan pada sesama pendatang di kota dan di desa. Sebaliknya, sebagian penduduk setempat (di kota dan desa) memilih teman akrab untuk bergaul dari kalangan sendiri. Akan tetapi, penduduk setempat yang tidak membedakan asal usul kelompok untuk dijadikan teman bergaul, juga relatif tinggi di kota dan di desa. Hubungan yang terjadi dalam pergaulan sehari-hari, baik yang dialami oleh penduduk setempat maupun pendatang, adakalanya menyenangkan mereka, ataupun biasa saja, di samping cukup menjengkelkan.

11

Baik pendatang maupun penduduk setempat, merupakan pendukung adat-istiadat tertentu. Apabila dua kelompok masyarakat yang mempunyai adat-istiadat yang saling berbeda hidup berdampingan di dalam suatu lokasi yang relatif sama, biasanya terlihat pula sikap yang berbeda. Di satu pihak, ada yang tetap ingin mempertahankan adat istiadatnya, tanpa mempertimbangkan keadaan lingkungan di tempat mereka berada. Di pihak lain, adapula yang berpendapat bahwa terhadap adat istiadat yang saling berbeda perlu diadakan penyesuaian menurut keadaan lingkungannya. Dari penelitian ini terlihat saling bertolak belakang pendapat antara penduduk setempat dengan pendatang. Pada umumnya informan pendatang cenderung

¹¹ Wawancara dengan Bapak Suroto (Kepala Dusun Sukadamai), 5 November 2013 di Buki Hague. Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu.

kepada perlunya menyesuaikan adat istiadat tersebut dengan keadaan lingkungan setempat. Kecenderungan yang demikian sesuai dengan petuah orang tua-tua dahulu, yaitu "di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung", atau "masuk ke kandang kerbau kita menguak, masuk ke kandang kambing kita mengembik". Namun, di kalangan pendatang terlihat pula kecenderungan untuk tetap mempertahankan adat-istiadatnya sendiri. Sebaliknya, penduduk setempat menginginkan agar pendatang perlu menyesuaikan diri dengan adat-istiadat yang berlaku di tempat mereka tinggal. Mereka berpendapat bahwa unsur-unsur adat-istiadat yang berasal dari pendatang adakalanya juga baik diserap oleh masyarakat setempat, baik secara langsung maupun melalui kontak kebudayaan yang tidak langsung.¹²

Dengan sering terjadinya hubungan antara pendatang dengan penduduk setempat, seperti sudah dikemukakan sebelumnya, dari masing-masing pihak tentu dapat diharapkan penilaian-penilaian tertentu tentang sifat-sifat khusus yang dimiliki kelompok lainnya, apakah sifat tersebut dipandang baik, ataukah tercela. Salah satu sifat penduduk setempat yang dipandang baik oleh pendatang adalah sopan dan berani. Dalam pandangan penduduk setempat, sifat dan sopan tersebut juga seharusnya dimiliki sebagian pendatang. Selain itu, pada pendatang juga dijumpai sifat-sifat lain,

¹² Wawancara dengan Abdurrahman dan Suharno, 4 November 2013 di Cot Girek.

seperti rajin, ramah-tamah, suka membantu, dan jujur, serta suka bergaul.¹³

3. Perkembangan Transmigrasi di Aceh Utara

Sensus tahun 1971 memperlihatkan bahwa 90.960 orang atau 4,54% penduduk Aceh tergolong sebagai pendatang. Kebanyakan mereka, yaitu 58.724 orang merupakan pendatang dari Sumatera Utara dan dari Pulau Jawa 21.244 orang. Daerah asal pendatang lainnya adalah Sumatera Barat, yaitu 5.907 orang. Jumlah pendatang dari berbagai wilayah propinsi lain relatif kecil, masing-masing di bawah seribu orang, kecuali dari luar negeri sebanyak 1.141 orang dan pada umumnya adalah dari Cina. Hanya pendatang dari Kalimantan Tengah yang tidak dijumpai di wilayah Aceh ketika sensus itu diadakan, walaupun ada, merupakan penduduk pindahan dari wilayah provinsi lain.

Kapan pertama kali pendatang dari berbagai wilayah itu mulai bermukim di Aceh Utara, sulit diketahui secara pasti. Beberapa tulisan atau hasil penelitian menyebutkan bahwa penduduk asli yang mendiami wilayah Aceh dewasa ini berasal dari percampuran darah beberapa bangsa lain. Pendapat demikian antara lain dikemukakan oleh Teungku Chik Kuta Karang, orang Aceh terdiri atas campuran darah

¹³ Wawancara dengan Abdurrahman dan Suharno, 4 November 2013 di Cot Girek.

Arab, Persi, dan Turki.¹⁴ Pendapat lainnya dikemukakan oleh Dr. Julius Jacobs mengatakan, orang Aceh merupakan suatu percampuran darah dari berbagai pendatang, seperti Melaka, Melayu, Minangkabau, Batak, Nias, India, Arab, Habsyi, dan Jawa.¹⁵ Percampuran darah orang Aceh dari berbagai macam tersebut diperkirakan telah terjadi sejak masa-masa kesultanan, ketika hubungan dagang dengan negeri-negeri luar semakin bertambah luas.

Hubungan antara orang Aceh dengan negeri-negeri luar diperkirakan telah berlangsung sejak abad ke-9. Berbagai sumber tulisan dari orang Arab, Persi, Cina, dan Eropa menyebutkan *Lamri* merupakan salah satu pusat perdagangan yang penting pada masa itu, meskipun penduduknya pada tahun 1413 tidak lebih dari seribu keluarga. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda 1607 - 1636, hubungan perdagangan di Aceh semakin bertambah ramai, Banda Aceh Darussalam, ibukota Kesultanan Aceh, merupakan salah satu pusat perdagangan yang terpenting pada waktu itu. Sebagai kota pelabuhan dan ibukota kesultanan, Banda Aceh Darussalam sangat kosmopolitan, terdiri atas berbagai kelompok etnis, seperti Gujarat, Keling, Arab, Jawa, Portugis, Pegu (Birma), dan Tionghoa. Selain itu, Banda Aceh Darussalam juga dikunjungi oleh pedagang dari Istambul, Venesia, Aleppo, Gujarat, Arab, Malabar, Coromandel, Bengal,

¹⁴ Said, Mohammad. 1961. *Atjeh Sepandjang Abad*. Djilid Pertama. Medan: Waspada. Hlm. 22.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

Pagu, Melaka, Siam, Cina, Kalimantan, Jawa, Inggris, Belanda, dan Perancis.¹⁶

Hubungan baik dengan bangsa luar dibina dengan berbagai cara. Kepada pedagang Jawa yang datang berdagang ke Pasai diberi kebebasan dari pembayaran bea impor-ekspor. Dengan Malaka diadakan kerjasama untuk keperluan pengangkutan di laut. Walaupun Kerajaan Pasei tidak mempunyai armada dagang, tetapi dengan menggunakan jung-jung Kerajaan Malaka, mereka dapat mengadakan pelayaran hingga ke negeri Cina. Ketika terjadi konflik bersenjata dengan Portugis pada tahun 1537 - 1547 dan 1568, Kerajaan Aceh mendapat tambahan kekuatan dari lebih kurang 400 orang prajurit Turki.

Pada abad ke-16 hingga ke-17, ibukota kerajaan Aceh menjadi pusat studi agama Islam yang didatangi oleh ulama dari berbagai negeri Islam, seperti Syaikh Nur-adin dari India, Syaikh Abdul Khair ibn Syeikh ibn Hajar Muhammad Yamani, dan Syaikh Muhammad ibn Hasan ibn Muhammad Hamid ar-Raniry dari Gujerat.¹⁷ Arus pendatang ke Aceh semakin meningkat ketika kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda

¹⁶Siegel, James T. 1968. *The Rope of God*. University of California Press: Berkeley and Los Angeles. Hlm. 3. Castles, Lance, and Alizabeth C. Morris, "Pola Pembangunan Kota di Aceh", Kertas Kerja Prasaran Pada Seminar Pembangunan Wilayah III, Banda Aceh, 21 - 23 Januari 1976. Hlm. 3.

¹⁷ Alfian, T. Ibrahim. "Wajah Rakyat Aceh Dalam Lintasan Sejarah, Kertas Prasaran pada Seminar Kebudayaan dalam Rangka PKA kedua dan Dies Natalis XI Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 21 -25 Agustus 1972. Hlm. 2-3.

mulai kuat, terutama sejak tahun-tahun pertama abad ke-20. Sejak itu, terlihat bermacam kegiatan pembangunan yang memerlukan banyak tenaga kerja. Pada tahun 1919, jalan kereta api dari Banda Aceh ke Medan selesai dibangun. Selama tahun-tahun berikutnya mulai pula dibangun jalan raya untuk jurusan yang sama dan pelabuhan pada beberapa ibukota kabupaten, seperti Ulee Lheue Banda Aceh, Sigli (Pidie), Lhok Seumawe (Aceh Utara), Kuala Langsa, dan Kuala Simpang (Aceh Timur). Beberapa jenis usaha perkebunan besar mulai pula dikembangkan di wilayah Aceh, seperti pembukaan kebun karet dan kelapa sawit di Aceh Timur dan Aceh Selatan, serta kebun kopi di Aceh Tengah. Selain itu, kehidupan ekonomi di Aceh tidak lagi terbatas kepada hasil pertanian, tetapi juga bertambah dengan hasil tambang, seperti minyak bumi di Aceh Timur, dan emas di Aceh Barat.

Bersamaan dengan berbagai kegiatan pembangunan terlihat pula kemajuan dalam kegiatan perdagangan. Sejumlah pedagang luar, seperti orang Cina, India, Arab, Minangkabau, dan Batak semakin tertarik untuk menjalankan usahanya di Aceh.

Pada tahun 1907, Gubernur van Daalen sebagai penguasa Aceh ketika itu, memprakarsai pendirian sekolah rakyat. Untuk itu, diperlukan pula tenaga-tenaga guru dari wilayah lain.¹⁸ Sebaliknya, anak-anak kaum bangsawan mulai

¹⁸ Alfian, Teuku Ibrahim. "Sebuah Studi Pendahuluan tentang Kontak Kebudayaan di ATJEH pada awal abad XX", photo copy, PLPIIS, Aceh, Banda Aceh, nd. Hlm. 22.

dikirimkan untuk mendapatkan pendidikan pada lembaga persekolahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda di berbagai wilayah lain, seperti di Bukittinggi, Bandung, dan Serang. Semua perkembangan itu menjadikan wilayah Aceh semakin terbuka dan tambah menarik untuk didatangi.

Pada akhir dasawarsa 1950-an, wilayah Aceh memperoleh status provinsi. Status baru ini memerlukan tambahan bermacam peralatan kelembagaan. Bersama dengan itu dibuka pula kesempatan dalam bidang pendidikan, yaitu dengan mendirikan berbagai jenis dan tingkatan sekolah, termasuk pembangunan Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam. Pada pertengahan tahun-tahun enam puluhan, Sabang berfungsi sebagai pelabuhan bebas dan pabrik gula Cot Girek mulai memproduksi. Dalam dasawarsa tujuh puluhan dibangun pula industri pencairan gas alam di Arun, Aceh Utara. Keterbukaan kesempatan dan pembangunan proyek industri seperti itu mengundang banyak pendatang dari wilayah lain.

Sebagian mereka datang ke Aceh melalui program kolonisasi pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. Sebagian yang lainnya datang di bawah program transmigrasi, transmigrasi pramuka, tenaga AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), atau melalui mutasi kepegawaian. Pemindahan orang dari pulau Jawa ke Aceh dalam hubungan dengan program kolonisasi dimulai ketika orang Belanda atau Eropa lainnya membuka perkebunan karet, kelapa sawit, dan damar.

Pembukaan perkebunan diperkirakan sudah dimulai sejak dasawarsa kedua abad ke-20. Di antara mereka, ada yang langsung didatangkan dari Pulau Jawa dan ada pula yang didatangkan dari perkebunan karet dan tembakau di daerah Sumatera Timur. Mereka merupakan tenaga buruh yang terikat dengan kontrak kerja untuk jangka waktu selama lebih kurang tiga tahun. Namun, kebanyakan mereka terpaksa memperpanjang kontraknya, karena biaya untuk pulang dihabiskan di bandar perjudian.

Pada permulaan tahun 1960-an Pemerintah Daerah Istimewa Aceh mulai memikirkan kemungkinan penempatan transmigran. Untuk itu, dirumuskan semacam kebijakan yang berintikan kepada tiga persoalan. *Pertama*, untuk pengisian kekurangan penduduk, diutamakan penempatan transmigrasi lokal dengan memberikan layanan yang sama dengan transmigrasi umum (antar pulau/antar daerah). *Kedua*, pengurusan dan penyelenggaraan transmigrasi diarahkan kepada perbaikan tingkat hidup yang layak dan kepada kepentingan pembangunan daerah. *Ketiga*, penempatan transmigrasi antarpulau yang harus memperhatikan faktor-faktor psikologis, agama, dan adat-istiadat daerah.¹⁹

Pada tahun 1962, pemerintah mendatangkan 100 keluarga transmigran untuk ditempatkan di Proyek Transmigrasi Blang Peutek, Kabupaten Pidie, yang sudah

¹⁹ *Atjeh Dalam Angka*, Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1973. Hlm. 36.

dipersiapkan sejak tahun 1960. Proyek transmigrasi ini meliputi areal sekitar 500 hektar yang terletak di kanan-kiri jalan raya Banda Aceh Medan, sekitar 91 kilometer di sebelah tenggara Banda Aceh.

Hingga tahun 1973, jumlah transmigran yang didatangkan ke Aceh berjumlah 695 orang.²⁰ Pindahan orang Jawa ke Aceh lebih meningkat, terutama sejak daerah ini mulai membangun beberapa proyek yang memerlukan tenaga kerja terlatih. Perpindahan itu ada yang langsung dari pulau Jawa dan adapula orang Jawa dari Sumatera Utara. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Pabrik Gula Cot Girek didatangkan sejumlah tenaga transmigrasi Pramuka dan tenaga AKAD dari Pulau Jawa. Mereka terikat dengan suatu perjanjian kerja untuk jangka waktu lima tahun.

Sejak tahun 1975, pemerintah secara teratur mengirimkan transmigran ke Aceh Utara. Pada tahun 1975/1976, pemerintah pusat mengirimkan 300 KK atau 1.477 jiwa yang ditempatkan di lokasi UPT I Alue Leuhob Kecamatan Lhoksukon (sekarang Sukadamai, Geudong Pase) dengan pola transmigrasi umum. Pada tahun 1980/1981, pengelolaannya diserahkan kepada Pemda Aceh Utara. Pada periode berikutnya, yaitu 1976/1977, pemerintah menempatkan pula di lokasi UPT II Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon (sekarang Pase Sentosa, Simpang Keramat)

²⁰ Daldjoeni, N. "Pemindahan Penduduk ke Luar Jawa selama 70 tahun", *Kompas*, No. 103, tahun XII, abu, 27 Oktober 1976. Hlm. 6.

sebanyak 500 KK atau 2.638 jiwa dengan pola transmigrasi umum. Pada tahun 1980-1981, pengelolaannya diserahkan kepada Pemda Aceh Utara. Pada periode yang sama juga ditempatkan 300 kepala keluarga atau 1.417 jiwa di Cot Girek.

21

Periode 1978/1979, pemerintah menempatkan 150 KK atau 698 jiwa di lokasi UPT III Pola Mas Kecamatan Tanoh Jambo Aye (sekarang Langkahan) dengan pola transmigrasi umum. Pada tahun 1988/1989, pengelolaannya diserahkan kepada Pemda Aceh Utara. Pada periode berikutnya, yaitu 1980/1981, pemerintah menempatkan pula sebanyak 700 KK atau 3.265 jiwa di lokasi UPT IV Seureuke Kecamatan Tanoh Jambo Aye (sekarang Cot Girek) dengan pola transmigrasi umum. Pada tahun 1988/1989, pengelolaannya diserahkan kepada Pemda Aceh Utara.²²

Di lokasi UPT V Langkahan Kecamatan Baktya ditempatkan pula 400 KK atau 1.749 jiwa pada tahun 1981/1982 dengan pola transmigrasi umum. Pada tahun 1988/1989, pengelolaannya diserahkan kepada Pemda Aceh Utara. Mengingat Bukit Hagu yang daerahnya begitu luas, untuk itu pada periode 1984/1985 ditempatkan lagi 400 kepala keluarga atau 1.812 jiwa di lokasi UPT VI Bukit Hagu Kecamatan Baktya dengan pola transmigrasi umum. Pada

²¹ Transmigrasi, Kanwil Dit. Jen. Prop. Dista. 1977. *Laporan Tahunan Tahun 1976/1977*. Banda Aceh. Hlm.30.

²² Arsip Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara

tahun 1988/1989, pengelolaannya diserahkan kepada Pemda Aceh Utara.²³

Pada periode selanjutnya, yaitu 1985/1986, di lokasi UPT I Krueng Pase Kecamatan Suka Makmur ditempatkan 494 KK atau 1.920 jiwa dengan pola PIRSUS (Perkebunan Inti Rakyat Khusus). Pada tahun 1991/1992, pengelolaannya diserahkan kepada Pemda Aceh Utara. Pada tempat yang sama, yaitu di lokasi UPT II Krueng Pase Kecamatan Kuta Makmur ditempatkan 434 KK atau 2.062 jiwa pada tahun 1987/1988 dengan pola PIRSUS. Pada tahun 1992/1993, pengelolaannya diserahkan kepada Pemda Aceh Utara. Pada periode berikutnya, masih pada tempat yang sama, yaitu di lokasi UPT III Krueng Pase Kecamatan Tanah Luas ditempatkan 200 KK atau 1.119 jiwa pada tahun 1988/1989 dengan pola PIRSUS. Pada tahun 1993/1994, pengelolaannya diserahkan kepada Pemda Aceh Utara.²⁴

Dengan pola yang berbeda, yaitu pola TSDP (Transmigrasi Swakarsa Desa Potensial), pada periode 1995/1996 di lokasi TSDP Jeulikat Kecamatan Nisam ditempatkan 120 KK atau 405 jiwa. Dengan demikian, sejak tahun 1975 hingga April 2000, pemerintah telah menempatkan transmigran sebanyak 3.698 KK atau 16.907 jiwa di Aceh Utara. Penempatan transmigrasi tersebut masih dilanjutkan pada masa berikutnya, yaitu pada tahun 2001/2002

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

ditempatkan pula 250 KK di Kecamatan Sawang dan pada tahun 2013 di UPT IV Bukit Hagu ditempatkan 100 KK.²⁵

4. Transmigrasi Bukit Hagu

Lokasi transmigrasi Bukit Hagu merupakan transmigrasi pola pertanian. Oleh karenanya setiap kepala keluarga mendapat 3 Ha tanah yang terdiri atas 0,25 ha sebagai tanah bangunan dan pekarangan, 0,75 ha sebagai lahan usaha I dan 2 ha sebagai lahan usaha II. Dalam ketentuannya, para transmigran selain memperoleh jatah lahan dan rumah, mendapatkan pula jaminan hidup selama setahun. Mereka juga mendapatkan pembinaan kerohanian, bantuan bibit, perlengkapan pertanian dan pertukangan, layanan kesehatan, dan berbagai latihan keterampilan.²⁶ Lahan I dan pekarangan yang mereka terima masih berbentuk hutan tebangan sehingga harus dibersihkan yang disebut dengan istilah *merun*. Untuk itu, mereka memperoleh upah uang pembakaran dan pembersihan lahan.

²⁵ Arsip Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara. Wawancara dengan Ibu Dahliana, Kasie Pengerahan dan Penempatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara, 6 November 2013 di Lhokseumawe.

²⁶ Subagio. 1976. Masalah Penyebaran Penduduk Khususnya Transmigrasi dalam Pembinaan Hukum Nasional. Dalam Segi-Segi Hukum Pembangunan dan Kependudukan. Jakarta: Binacipta. Hlm. 28.

Para transmigran memperoleh berbagai bantuan dari pemerintah, tetapi kekurangannya harus dipenuhi sendiri. Untuk memenuhi kekurangan biaya hidup, ada yang memanfaatkan sisa bekal yang dibawa dari Jawa atau ada yang menjual barang ke pasar Cot Girek. Bantuan peralatan dan bibit dari pemerintah ikut diperjualbelikan. Selain itu, untuk menambah pendapatan, mereka diberikan pula izin menjual sisa-sisa kayu pembakaran yang ada di ladangnya.

Pada awal tahun 1978, panen padi dan palawija berakhir untuk pertama kalinya. Hasilnya cukup baik, yaitu sekitar 400-500 kg per KK, ditambah lagi dengan hasil palawija. Tanaman tersebut dapat tumbuh subur sebab tanah baru dibuka, ditambah lagi sisa-sisa pembakaran yang dapat pula menambah kesuburan tanah.²⁷

Selain dalam hal kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, mereka mengalami pula kesulitan dalam proses integrasi. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan bahwa mereka berasal dari berbagai daerah. Mereka yang berasal dari Jawa Tengah membedakan diri ke dalam beberapa kelompok kedaerahan, yaitu orang Jawa Tengah Kebumen, Purbalingga, Tegal, Cilacap, dan lain-lain. Mereka yang berasal dari satu daerah atau desa pun sering menyebutkan dirinya dengan *keluarga kita* walaupun tidak ada hubungan kekerabatan.

²⁷ Radjagukguk, Bostang. 1984. Pembukaan Lahan Transmigrasi. *Harian Kompas*, 28 Januari 1984. Hlm. 4.

Dari kenyataan itu dapat dipahami bahwa masyarakat Desa Bukit Hagu terdiri atas fraksi-fraksi sosial dengan norma yang berbeda. Lagi pula dalam masyarakat Jawa dikenal adanya subkultur, seperti Sala-Jogya, Jawa Timuran, dan Jawa Pesisiran.²⁸

Bukit Hagu ditempati oleh transmigran pada tahun 1977 yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Sebanyak 500 KK (2.253 jiwa) yang terdiri atas 1.255 laki-laki dan 998 perempuan. Tahun pertama dan kedua, para transmigran benar-benar menikmati hasil jerih payah mereka, yaitu dengan adanya panen raya, khususnya padi. Namun, tahun ketiga dan seterusnya sudah semakin sulit menanam padi, mengingat kesuburan tanah yang semakin berkurang. Mereka kemudian beralih menanam singkong, panen singkong ternyata memang berlimpah ruah sehingga banyak yang tidak laku untuk dijual. Dari sinilah awal mula transmigran enggan bertani karena hasil panen tidak sebanding dengan waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan.²⁹

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja di luar pertanian, seperti menjadi buruh, pedagang, dan pembantu rumah tangga. Karena waktu dan tenaga tersita

²⁸ Kasihan, Toto dan Abdullah Mustafa. 1976. Aspek-Aspek Sosial Budaya Proyek Transmigrasi Delta Upang. Dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta. Hlm. 163.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Suroto (Kepala Dusun Sukadamai), 5 November 2013 di Buki Hague.

untuk pekerjaan di luar pertanian, tanah-tanah pertanian mereka menjadi terlantar.

Atas berbagai kesulitan hidup yang dihadapi, akhirnya menimbulkan perasaan tidak kerasan. Oleh karena itu, hingga tahun 1983, ada sebanyak 63 KK transmigran yang meninggalkan lokasi transmigrasi dan pada bulan April 1987, sudah ada 102 KK meninggalkan Bukit Hagu. Sementara rumah yang tidak ditempati berjumlah 50 rumah. Mereka yang meninggalkan desa tersebut sebagian besar pulang ke kampung halaman mereka di pulau Jawa. Adapula di antara mereka yang ikut lagi bertransmigrasi, seperti ke Riau, Kalimantan, dan Irian Jaya.

Mereka pergi karena merasa tidak kerasan. Perasaan tidak kerasan timbul karena orang sulit mendapat rezeki, iklim, dan faktor alamiah lainnya yang kurang sesuai, demikian pula lingkungan masyarakat yang tidak cocok.³⁰ Hal itu, dapat pula terjadi karena orang tidak memiliki darah pelopor sehingga apabila pindah segera akan kembali lagi ke daerah asal.³¹

Bukit Hagu dikepalai oleh seorang kepala desa yang membawahkan lima dusun, setiap dusun dikepalai oleh seorang kepala dusun. Dusun-dusun tersebut, yaitu Bukit

³⁰ Sunaryo. 1982. "Peranan Transmigrasi dalam Pelestarian Pancasila". *Waspada*, 19 Oktober 1982. Hlm. 6.

³¹ Boeke, J.H.. 1983. *Prakapitalisme di Asia*. Penerjemah D. Projosiswoyo. Jakarta: Sinar Harapan. Hlm. 90.

Harapan Mulia, Bukit Aman, Bukit Tentram, Bukit Bahagia, dan Bukit Sukadamai.

Pada tahun 1983, desa ini sudah berpenduduk 2788 jiwa atau 536 KK. Dengan perincian 1333 laki-laki dan 1455 perempuan. Sementara pada tahun 1987, penduduk desa Bukit Hagu berjumlah 2.655 orang atau 552 KK. Dengan perincian 1.449 laki-laki dan 1.206 perempuan.³² Keadaan masyarakat yang seperti itu menimbulkan tingkah laku baru yang semau gue, bahkan dapat berujung pada lahirnya konflik.³³

Dua fraksi sosial yang ada, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, dapat memunculkan konflik. Pada tahun 1981, sekelompok orang dari Jawa Timur sambil membawa senjata memasuki Patok II untuk menghukum seorang yang dinilai tidak adil dalam menyelesaikan urusan muda-mudi. Begitu pula dalam pertandingan sepak bola, sering berubah menjadi arena untuk mempertunjukkan rasa solidaritas terhadap kelompok. Pada tahun 1983, dalam suatu pertandingan sepak bola terjadi adu tinju dan adu kesaktian antara penduduk yang berasal dari Jawa Timur dengan Jawa Tengah.

Selain fraksi sosial atas dasar ikatan kedaerahan, ada pula fraksi sosial atas dasar ikatan keagamaan. Pada tahun

³² Atmaja, Nengah Bawa. 1984. *Pekerjaan di Luar Pertanian pada Petani Transmigran Jawa di Desa Bukit Hagu, Lhoksukon, Aceh Utara*. Banda Aceh: PLPIIS Unsyiah. Hlm. 24.

³³ Nasikun. 1974. *Sebuah Pendekatan untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Sosial dan Politik UGM. Hlm. 59.

1983, ketika masyarakat Patok III, *nanggap* (mengupah) wayang kulit berkaitan dengan adanya acara sunatan, kelompok orang atau yang disebut dengan kelompok santri merasa keberatan atas acara tersebut. Mereka menilai wayang adalah perbuatan haram sehingga tidak pantas dipertunjukkan.³⁴ Namun, sebagian masyarakat menilai bahwa wayang tidaklah haram, mereka tetap menyukai wayang. Wayang merupakan salah satu lambang kebudayaan Jawa dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan orang Jawa.

Kenyataan yang demikian dapat berujung pada konflik. Namun, setiap perselisihan dan konflik yang terjadi di antara mereka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah. Dengan demikian, ledakan sosial dalam bentuk kekerasan dapat dihindarkan.

Dari kenyataan di atas dapat dipahami bahwa interaksi sesama transmigran tidak berjalan mulus. Namun, dalam kaitannya dengan orang Aceh, mereka memiliki sikap yang sama. Mereka membedakan diri dengan orang Aceh dan menyebut kelompoknya dengan istilah kita orang Jawa. Dalam hal ini mereka merasa senasib sehingga mereka cenderung membedakan dirinya dengan masyarakat di luar kelompoknya.³⁵

³⁴ Kodiran. 1975. "Kebudayaan Jawa". Dalam Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan. Hlm. 339.

³⁵ Jalaluddin. 1976. "Masalah Penyebaran Penduduk Khususnya Transmigrasi". Dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta. Hlm. 93

Hubungan orang Jawa dengan orang Aceh, diwarnai pula oleh ketidakserasian. Ketika orang Jawa tiba di Bukit Hagu, ada kecenderungan mereka dianggap sebagai orang miskin. Penilaian seperti ini sering dijumpai di daerah penerima transmigran.³⁶

Masyarakat transmigras sering merupakan kantong-kantong enklaf yang terisolir. Mereka hidup dengan kebudayaan sendiri dan berbeda dengan keadaan penduduk asli di sekitarnya.³⁷ Hal itu dapat juga terjadi bahwa penduduk di sekitar pemukiman transmigrasi memiliki sikap negatif karena stereotipe dan rasa iri hati. Salah satu sebabnya, pemerintah memanjakan para transmigran dengan berbagai fasilitas tanpa menghiraukan penduduk asli.³⁸ Gejala seperti itu terjadi pula pada hubungan antara orang Jawa dengan orang Aceh. Munculnya gunjingan dari penduduk setempat yang mengatakan bahwa orang transmigrasi adalah anak pemerintah. Penduduk setempat merasa diabaikan dan muncul ungkapan *buya krueng teudong-dong*, *buya tamong*

³⁶ Heeren, H.J. 1979. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia. Hlm.140.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 141.

³⁸ Koentjaraningrat. 1982. Lima Masalah Integrasi Nasional. Dalam Koentjaraningrat. *Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Anthropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES. Hlm.350.

neuraseuki. Maksudnya adalah orang pendatang yang justru banyak mendapatkan keuntungan.³⁹

Hubungan antara kedua kelompok sosial, selain dapat melahirkan ketegangan, tetapi juga dapat terciptanya hubungan kerja sama. Hubungan dan kerja sama di antara mereka yang intensif terjadi di pasar. Motivasi pedagang dalam kontakannya dengan kelompok sosial yang lain lebih banyak berorientasi pada keuntungan dengan memperluas pemasaran tanpa melihat siapa yang terlibat dalamnya.⁴⁰ Sebaliknya, masalah yang secara langsung dapat memicu munculnya ketegangan adalah masalah tanah.

Pada awal tahun 1977, masalah tanah mulai muncul. Manager proyek dengan suratnya No. 8.045/TA.D/Pre-II/XII/77 melaporkan adanya kegiatan penduduk yang menanam tanaman keras di sekitar proyek. Pemmasalahan itu ditanggapi oleh pihak Kecamatan Lhoksukon dengan mengeluarkan pengumuman No. 1821/3 yang melarang aktivitas penduduk di sekitar proyek pemukiman transmigrasi.

Ketegangan hubungan antara penduduk setempat dengan para transmigran juga terjadi pada tahun 1977. Hal itu berkaitan dengan pengikut gerakan Hasan Tiro yang

³⁹ Jalaluddin. 1976. Masalah Penyebaran Penduduk Khususnya Transmigrasi. Dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta. Hlm. 93.

⁴⁰ Naim, Mochtar. 1976. "Problema dan Prospek Transmigrasi di Pasaman Barat". Dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta. Hlm. 187.

beraktivitas di hutan. Pada 25 dan 26 Desember 1977, dua rumah di Patok V dibakar oleh orang tidak dikenal. Kelompok tidak dikenal tersebut menyebarkan pula selebaran yang isinya himbauan bahwa orang Jawa harus pulang ke Jawa dan daerah Aceh hanya untuk orang Aceh. Dengan adanya ancaman itu, para transmigran menjadi tidak nyaman. Namun, setelah kelompok tidak dikenal tersebut banyak yang ditangkap, secara perlahan-lahan keamanan pun pulih kembali.

Hubungan penduduk setempat dengan pendatang sering diwarnai dengan ketegangan, tetapi lama-kelamaan mereka mulai saling menerima kenyataan yang ada, yaitu saling membutuhkan. Hubungan tersebut tampak semakin baik sejalan dengan semakin baiknya prasarana dan semakin meningkatnya arus pemasaran barang dan jasa. Orang Jawa ada yang sudah mulai dapat berbahasa Aceh, bahkan ada pedagang Aceh di pasar Lhoksukon yang menggunakan bahasa Jawa untuk menarik pembeli. Perkawinan campuran mulai muncul, paling tidak hingga tahun 1983, ada sekitar 12 orang wanita Jawa yang menikah dengan laki-laki Aceh.⁴¹

Meskipun banyak transmigran yang meninggalkan lokasi, tetapi adapula transmigran swakarsa dan transmigran keluarga yang datang ke Bukit Hagu. Mereka pada umumnya datang karena diajak atau menyusul keluarganya. Mereka tertarik oleh peluang untuk mengisi rumah dan tanah yang ditinggalkan oleh para transmigran. Selain itu, mereka juga

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Suroto (Kepala Dusun Sukadamai), 5 November 2013 di Buki Hague.

tertarik oleh berita melalui hubungan surat-menyurat yang menyebutkan bahwa di Aceh mudah mencari makan karena ramainya permintaan tenaga kerja pada pasar tenaga kerja. Hal itu seperti dikemukakan oleh Otto Soemawoto, orang Jawa akan bergairah bertransmigrasi ke luar Jawa, apabila diketahuinya ada kesempatan kerja.⁴²

Adanya perputaran arus transmigrasi, tidak ada rumah yang kosong di Bukit Hagu. Apalagi adanya pecahan KK. Pada tahun 1980 mulai tampak adanya KK yang tidak bertanah. Oleh karena itu, ada sebanyak 80 KK di antara mereka terpaksa mengikuti transmigrasi lokal ke Unit Desa V Langkahan. Mereka terdiri atas 35 pecahan KK dan 45 KK transmigrasi swakarsa dan transmigrasi keluarga.

Bukit Hagu ketika berada di bawah pengawasan Departemen Transmigrasi, dikepalai oleh seorang Kepala Unit Penempatan Transmigrasi (KUPT). Tugas KUPT adalah mengatur, membina, dan mempersiapkan desa yang berada di bawah kekuasaannya supaya dalam jangka waktu lima tahun dapat berdiri sendiri. Pada tahun 1983, berakhir masa pembinaan terhadap transmigran, pengurusan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk diintegrasikan ke dalam administrasi pemerintah desa di bawah pengawasan Pemerintah Daerah.⁴³ Untuk itu, pada 30

⁴² Soemawoto, Otto. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Jambatan. Hlm. 193.

⁴³ Subagio. 1976. "Masalah Penyebaran Penduduk Khususnya Transmigrasi". Dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta. Hlm. 28.

Agustus 1983, diadakan pemilihan lurah. Dengan terpilihnya lurah, lahirnya sebuah desa. Desa itu tetap menggunakan Bukit Hagu, hanya nama Patok diganti dengan Dukuh atau Dusun. Patok V dan VI yang letaknya berdekatan digabung menjadi satu. Dengan demikian, desa tersebut dibagi menjadi lima dusun, yaitu Dusun Bukit Harapan Mulia, Dusun Bukit Aman, Dusun Bukit Tentram, Dusun Bukit Bahagia, dan Dusun Bukit Sukadamai.

Pada akhir tahun 1983, penduduk Desa Bukit Hagu terdiri atas 2.788 orang. Perinciannya, yaitu 1.333 laki-laki dan 1.455 wanita. Mereka tergabung dalam 536 rumah tangga. Setiap rumah tangga beranggotakan rata-rata 5 orang.

Tabel 1: Jumlah Penduduk Tahun 1983

Umur/Tahun	Jenis Kelamin		Total
	Laki	Perempuan	
0-4	237	264	501
5-9	231	241	472
10-14	170	157	327
15-19	125	137	262
20-24	89	102	191
25-29	86	107	193
30-39	163	256	419

40-49	137	111	248
50-59	61	50	111
60 ke atas	34	30	64
Total	1.333	1.455	2.788

Catatan Statistik pada Kantor Kepala Desa Bukit Hagu 1983

Hasil sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan bahwa keturunan Suku Jawa di seluruh Aceh berjumlah 15,87%. Tidak semuanya terkonsentrasi, kecuali yang didatangkan melalui program transmigrasi, seperti kawasan ekonomi Aceh Utara, Patek Aceh Jaya, Jantho Aceh Besar, Jagong Jeget Aceh Tengah, Trumon Aceh Selatan, Peunaron Aceh Timur, Subulussalam, dan banyak perkampungan yang sudah ada sebelum adanya program transmigrasi.

5. Masa Konflik

Situasi konflik yang terjadi di Aceh mempengaruhi kehidupan transmigran. Hal itu seperti diungkapkan oleh Suyati, dia yang mengaku telah lama hidup di pemukiman transmigrasi Bukit Hagu. Sejak terjadinya pelbagai kerusakan di Aceh, kehidupan warga transmigran sudah tidak nyaman lagi karena sering mendapatkan teror. Seringya mendapatkan teror sehingga beberapa transmigran yang mempunyai uang, memilih meninggalkan Aceh. Dengan bekal seadanya dia

meninggalkan harta benda yang telah dikumpulkan selama belasan tahun.⁴⁴

Demikianlah halnya yang dialami oleh sebagian transmigran di Aceh Utara. Kebanyakan mereka pada mulanya bekerja menjadi buruh harian di perkebunan tebu. Transmigran ternyata cukup betah menjadi buruh di perkebunan tebu milik PT Perkebunan I, sebuah perusahaan milik pemerintah, yang juga memiliki sebuah pabrik gula di Cot Girek. Pada waktu itu, pabrik gula Cot Girek menjadi salah satu pemasok gula andalan di Pulau Sumatera. Pabrik gula Cot Girek kemudian mengalami krisis sehingga berhenti beroperasi dan ditutup pada 1986. Ada yang menyebutkan bahwa mutu gula produksi Cot Girek kurang bagus, karena tanah di daerah itu tidak cocok untuk tanaman tebu. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa ditutupnya pabrik tersebut disebabkan oleh banyaknya masalah.⁴⁵ Pihak PT Perkebunan I kemudian menanam kelapa sawit sebagai gantinya. Para buruh, yang umumnya transmigran asal Jawa, menjadi kelimpungan. Pada saat perkebunan tebu beralih fungsi, mereka pun kehilangan pekerjaan.

Untuk mengantisipasi transmigran di Cot Girek. Warga transmigran yang kehilangan pekerjaan pindah ke berbagai daerah, seperti Seureuke, Bukit Hagu, dan ke berbagai daerah Transmigrasi untuk memulai kehidupan

⁴⁴ Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu.

⁴⁵ Wawancara dengan Abdurrahman, 4 November 2013 di Cot Girek.

baru. Di ladang baru yang disediakan oleh pemerintah seluas dua hektar mereka menanam palawija. Setelah beberapa kali panen, ladang tersebut ditanami karet. Tidak sampai tiga tahun, getah karet sudah dapat disadap. Dari hasil kebun karet, mereka dapat memperluas lahan hingga beberapa hektar. Sebelum terjadi konflik, seluruh tanaman karet menjelang umur produktif. Pada waktu itu, kebun milik masyarakat baru saja dibersihkan dari rumput dan semak rendah. Dalam beberapa hari, rumput menjadi kering dan mudah tersulut api. Beberapa kebun di sekitarnya juga baru selesai dibersihkan dan ikut musnah dilahap api. Warga tidak berani mengusut peristiwa kebakaran itu. Mereka menduga kebunnya terbakar akibat konflik. Selama konflik, setidaknya bakar-membakar menjadi peristiwa yang sering dialami warga transmigran asal Jawa.⁴⁶ Ada juga di antara warga yang memiliki usaha pembuatan batu bata. Barak pembuatan batu bara milik seorang warga transmigrasi dua kali terbakar, yaitu pada tahun 1999 dan 2004.⁴⁷

Pada tahun 2000, muncul sekelompok orang dari Gerakan Aceh Merdeka. Mereka mengancam warga agar meninggalkan rumah. Tidak ada yang tahu pasti mengapa mereka mengusir penduduk. Lebih-lebih lagi pada saat pengusiran, seorang warga dianiaya dengan senjata tajam.

⁴⁶ Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu.

⁴⁷ Wawancara dengan Abdurrahman, 4 November 2013 di Cot Girek. Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu.

Kelompok lainnya membakar rumah penduduk. Dalam sekejap delapan unit rumah yang umumnya terbuat dari papan dan atap rumbia musnah dilalap api.

Keesokan harinya, empat truk terparkir di tengah desa. Dalam sekejap truk tersebut telah dipenuhi oleh penumpang. Irian kendaraan bergerak meninggalkan desa, membawa warga yang hendak mengungsi. Barang-barang dan perbekalan seadanya dibawa serta.

Selama konflik, banyak penduduk transmigrasi keluar dari Aceh Utara bahkan provinsi Aceh. Sebelum pengusiran terjadi, hubungan warga transmigran dengan kelompok gerilyawan sangat harmonis. Sekalipun sering masuk ke pemukiman, tetapi para gerilyawan tidak pernah menyakiti penduduk. Mereka tidak mempersoalkan perbedaan etnis dan tidak membedakan orang Aceh dengan orang Jawa, tidak pernah dimintai *pajak nanggroe*. *Pajak nanggroe* adalah sebutan untuk setoran yang wajib dibayar setiap kepala keluarga untuk kelompok GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Namun, lama-kelamaan hubungan penduduk transmigrasi dan gerilyawan GAM menjadi terganggu. Penduduk yang sering bepergian dari desa kerap dicurigai, begitu juga orang luar yang datang.⁴⁸

⁴⁸ Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu. Wawancara dengan Bapak Suroto (Kepala Dusun Sukadamai), 5 November 2013 di Buki Hague.

Ketika Presiden Megawati Soekarnoputri menyatakan daerah Aceh dengan status darurat militer pada Mei 2003, hampir tidak ada orang luar yang masuk ke Bukit Hagu. Sepanjang jalan mulai dari kilometer I lintas Lhoksukon-Bukit Hagu dijaga oleh aparat keamanan. Sebagian pos berada di jalan line pipa, sebagai pasukan Pengamanan Proyek Vital ExxonMobil. Pos-pos tersebut dikenal sebagai jalan yang sangat angker. Apabila melewati pos-pos itu harus terlebih dahulu melalui pemeriksaan. Apabila orang luar, ada banyak pertanyaan yang harus dijawab. Selain itu, penduduk ikut menjadi sasaran apabila terjadi kontak senjata antara gerilyawan GAM dengan tentara Indonesia. Karena kerapnya terperangkap kontak senjata inilah warga Bukit Hagu pindah ke ibukota kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan ke luar Aceh. Namun, setelah perjanjian damai pemerintah Indonesia dan GAM pada 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia, warga transmigran ada yang kembali lagi ke desa mereka.

6. Organisasi Kemasyarakatan

Dalam masyarakat Jawa, rumah tangga atau *somah* pada dasarnya adalah kelompok kerabat yang pokok. Namun, tidak selamanya diwujudkan oleh tempat tinggal yang terpisah, tetapi oleh dapur sendiri.⁴⁹ Rumah tangga di Bukit Hagu pada umumnya terdiri atas keluarga batih dan sebagian

⁴⁹ Koentjaraningrat. 1964. "Celapar: Sebuah Desa di Jawa Tengah Bagian Selatan". Dalam Koentjaraningrat. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Hlm. 151.

kecilnya terdiri atas keluarga luas. Latar belakang pendidikan setiap kepala keluarga, sebagian besar tidak pernah menikmati pendidikan formal.

Rumah-rumah tangga itu pada dasarnya adalah unit sosial yang dipimpin oleh kepala rumah tangga. Selain itu, merupakan unit dasar dalam kegiatan produksi, konsumsi, dan reproduksi.⁵⁰ Oleh karena itu, setiap rumah tangga bersama-sama menangani berbagai bidang pekerjaan, baik pekerjaan rumah tangga maupun pekerjaan mencari nafkah. Semua barang atau uang yang dihasilkan dikumpulkan menjadi milik bersama yang kemudian digunakan untuk keperluan rumah tangga.⁵¹

Dalam kehidupan sehari-hari, anggota suatu rumah tangga terjadi hubungan dengan anggota rumah tangga yang lain. Mereka berusaha memelihara kerukunan melalui tegur sapa dan berbagai sistem tolong-menolong. Seseorang sering diminta tolong untuk membantu meringankan pekerjaan orang lain. Demikian pula dalam bentuk memberikan sumbangan dalam acara selamatan, kelahiran, kematian, sunatan, dan perkawinan. Untuk mendapatkan pertolongan dan bantuan, seseorang harus saling tolong-menolong. Sikap saling membantu merupakan bagian dari adat istiadat dan

⁵⁰ Sajogyo, P. 1983. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: CV Rajawali. Hlm. 49.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 31.

norma yang berlaku di masyarakat.⁵² Selain itu, rumah-rumah tangga dituntut pula untuk melakukan berbagai kewajiban kepada masyarakat. Dalam hal ini, rumah tangga menyumbangkan berbagai hal kepada masyarakat, seperti kelahiran, pemeliharaan fisik anggota keluarga, penempatan anak dalam masyarakat, pemasyarakatan, dan kontrol sosial.⁵³ Kepala rumah tangga atau laki-laki juga mewakili rumah tangganya dalam kegiatan sosial dan politik.⁵⁴ Hal itu dapat diamati ketika mereka ikut dalam gotong royong, jaga malam, dan ikut dalam berbagai perkumpulan.

Interaksi sosial yang juga penting adalah pada pusat-pusat pertemuan tidak resmi, yaitu di warung, rumah jaga, dan lain-lain. Namun, dapat juga terjadi apabila seseorang berkunjung ke rumah tetangganya hanya untuk sekedar *jagongan* atau *ngobrol*.⁵⁵

Berbagai bentuk perkumpulan juga ada di Bukit Hagu, seperti perkumpulan di bidang ekonomi, kesenian, olahraga, dan perkumpulan keagamaan. Perkumpulan di bidang ekonomi yang terpenting adalah koperasi konsumsi yang diberi nama koperasi Bukit Makmur. Pada saat ini ditambah

⁵² Mulder, Niels. 1983. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kultur*. Penerjemah Alois A. Nugroho. Jakarta: PT Gramedia. Hlm. 66.

⁵³ Goode, William J.. 1983. *Sosiologi Keluarga*. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora. Jakarta: PT Aksara. Hlm. 4.

⁵⁴ Sajogyo, P. *Op.cit.*, hlm. 49.

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Suroto, Kepala Dusun Sukadamai, 5 November 2013 di Buki Hague.

dengan Koperasi Unit Desa Diponegoro dan Koperasi Simpan Pinjam Malikussaleh. Selain itu, adapula perkumpulan arisan, yaitu arisan beras dan uang. Arisan beras disebut pula dengan nama *jimpitan*. Adapula perkumpulan kelompok tani sebagai wadah para petani untuk membicarakan berbagai masalah pertanian.⁵⁶

Perkumpulan kesenian dapat dikelompokkan menjadi kompleks seni halus, yaitu wayang kulit dan kompleks seni kasar, yaitu *kuda kepang*, *ludruk*, *wayang wong*, *ketoprak*, *kuntulan*, dan *angguk*. Perkumpulan seni kasar disebut juga dengan kesenian rakyat. Semua jenis perkumpulan kesenian dapat diupah untuk dipentaskan. Orang mengupah kesenian (*nanggap*), biasanya berkaitan dengan upacara tertentu, seperti sunatan, perkawinan, dan lain-lain. Namun, dapat juga terjadi bahwa kesenian dipentaskan dalam rangka memperingati hari-hari tertentu, seperti hari ulang tahun kedatangan mereka di Bukit Hagu, hari kemerdekaan, dan lain-lain.⁵⁷

Perkumpulan olahraga yang terpenting adalah perkumpulan sepak bola yang terdapat pada setiap patok. Pada saat-saat tertentu sering diadakan pertandingan sepak bola antarpatok atau pertandingan melawan kesebelasan daerah lain dari luar Bukit Hagu.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Suroto, Kepala Dusun Sukadamai, 5 November 2013 di Buki Hague.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Suroto (Kepala Dusun Sukadamai), 5 November 2013 di Buki Hague.

Perkumpulan keagamaan yang terpenting adalah perkumpulan mengaji. Sekitar 10-15 orang anak secara teratur belajar mengaji di mushalla atau langgar di setiap Patok. Mereka belajar mengaji pada setiap sore hari yang dibimbing oleh guru mengaji. Untuk keperluan penerangan, setiap anak disarankan untuk menyumbang uang seikhlasnya yang diserahkan pada saat mengaji.

7. Bidang Usaha

Masyarakat transmigran pada umumnya menjadi petani. Namun, banyak pula di antara mereka yang melakukan pekerjaan di luar sektor pertanian. Adapula di antara mereka yang mengkombinasikan keduanya sehingga timbullah pola nafkah berganda. Hal itu, merupakan faktor penting dalam pengembangan proyek transmigrasi, yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan di luar pertanian, seperti di daerah kering yang pembangunan sarana irigasi tidak memungkinkan. Oleh karena itu, perlunya bidang pekerjaan di luar pertanian sehingga memungkinkan transmigran untuk memperoleh pendapatan tambahan dengan bakat dan kemampuannya.

7.1 Pertanian

Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, permukiman Bukit Hagu pada dasarnya dibangun untuk pola pengembangan pertanian lahan kering. Oleh karena itu, setiap kepala keluarga transmigran diberikan jatah lahan kering

seluas 3 ha tanah, terdiri atas 0,25 ha sebagai tanah bangunan dan pekarangan, 0,75 ha sebagai lahan usaha I dan 2 ha sebagai lahan usaha II.

Pekarangan yang merupakan sebidang tanah di sekitar tempat tinggal, selain untuk halaman rumah, digunakan pula sebagai tempat menanam berbagai tanaman, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kopi, cengkeh, tanaman hias, dan lain-lain. Ternak, seperti ayam, itik, dan kambing biasa pula dipelihara di pekarangan. Dengan demikian, pekarangan memberikan sumbangan produksi kepada petani, baik dalam bentuk produksi subsistensi maupun produksi komersial.⁵⁸

Pekarangan rumah di Bukit Hagu pada mulanya tidak berpagar, tetapi sekarang sudah ada yang membuat pagar rumah. Untuk itu, pada saat belum berpagar, orang dapat dengan bebas melewati atau masuk ke pekarangan orang lain untuk keperluan ke warung atau berkunjung. Orang lain juga dapat mendapatkan buah-buahan atau sayur-sayuran dari pekarangan seseorang tanpa membayar. Dengan demikian, pekarangan pada dasarnya memiliki pula fungsi sosial.⁵⁹

Lahan I hampir seluruhnya *bongkor*. Akan tetapi, tampak pula berbagai tanaman, seperti cengkeh, kopi, kelapa, dan lain-lain. Adapula petani yang menanam palawija setelah dipagar agar tidak diserang oleh hama babi dan kera. Pada

⁵⁸ Soemarwoto, Otto. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Jambatan. Hlm. 217.

⁵⁹ *Ibid.* Hlm. 221.

bagian tertentu lahan I yang ada mata airnya atau dilewati oleh alur, dimanfaatkan sebagai sawah. Namun, tidak semua petani memiliki tanah sawah dan luasnyapun sangat terbatas. Di Bukit Hagu pada tahun 1983 secara keseluruhan terdapat sekitar 13 ha luas sawah.⁶⁰ Dengan demikian, di Bukit Hagu terdapat tiga macam tanah pertanian, yaitu pekarangan, ladang, dan sawah.

Selain bercocok tanam, transmigran juga memelihara ternak, terutama ayam, itik, kambing, dan sapi. Usaha ternak adalah hasil swadaya masyarakat. Namun, dalam pemeliharaan ternak, kendala yang dihadapi adalah adanya harimau. Pada tahun 1983, terdapat 63 ekor kambing dan 17 ekor sapi yang mati diterkam harimau.⁶¹

Produksi pertanian dan peternakan, selain dikonsumsi sendiri, adapula yang dipasarkan. Hasil pertanian masih dalam jumlah kecil-kecilan sehingga petani merasa kurang ekonomis jika memasarkan hasilnya ke pasar Lhoksukon. Oleh karena itu, munculnya suatu mata rantai pemasaran, yaitu berupa tengkulak atau bakul.⁶² Tugas mereka adalah membeli produksi dari petani untuk dijual ke pasar Lhoksukon.

⁶⁰ Data Statistik pada Kantor Desa Bukit Hagu tahun 1983.

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Suroto (Kepala Dusun Sukadamai), 5 November 2013 di Bukit Hagu.

⁶² Yasni, Zainal. 1972. "Pola Pemasaran (Input dan Output) dalam dan Luar Negeri". Dalam Panitia Simposium. *Pola Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Indonesia*. Jakarta: PERHEPI. Hlm. 44.

Usaha di Luar Pertanian

Transmigran di Bukit Hagu semula diharapkan dapat mengembangkan sektor pertanian. Namun, mereka juga mengembangkan berbagai bidang pekerjaan di luar pertanian. Dengan demikian, timbullah pola nafkah berganda atau diversifikasi usaha.⁶³

7.2 Pembuatan Tahu

Rumah tangga yang memilih pembuatan tahu sebagai bidang usaha karena di Jawa sudah biasa membuat tahu. Selain itu, bahan baku tahu mudah didapatkan. Pembuatan tahu sudah dimulai sejak tahun 1978 yang dipelopori oleh transmigran asal Purbalingga, Jawa Tengah. Pemasaran tahu dilakukan oleh produsen sendiri atau melalui buruh penjual tahu atau tukang *nyebar*. Daerah pemasaran tahu tidak saja di Buki Hagu, melainkan juga ke luar daerah Bukit Hagu.⁶⁴

7.3 Pembuatan Tempe

Tempe pada mulanya merupakan makanan yang sangat digemari oleh keluarga Jawa. Tempe selalu menyertai

⁶³ Sajogyo. 1978. Lapisan Masyarakat yang Paling Miskin di Pedesaan Jawa". *Prisma*. VII. No. 3. Jakarta: LP3ES. Hlm. 5.

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Suroto (Kepala Dusun Sukadamai), 5 November 2013 di Bukit Hague.

setiap hidangan keluarga Jawa.⁶⁵ Rumah tangga yang membuat tempe didasari atas pertimbangan bahwa mereka sudah terbiasa membuat tempe ketika di Jawa. Membuat tempe tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak. Daerah pemasarannya tidak terlalu jauh, selain tidak memerlukan modal yang banyak.⁶⁶

Proses pemasaran tempe seluruhnya ditangani oleh produsen. Produsen menjajakan atau disalurkan ke warung. Setiap pembuat tempe memiliki pasar tersendiri, tidak saja di Bukit Hagu bahkan sampai ke daerah sekitarnya.⁶⁷

7.4 Menganyam Tampah

Pekerjaan menganyam *tampah* sebagian besar dikerjakan oleh laki-laki. Mereka sudah terbiasa membuat anyam-anyaman ketika di Jawa. Selain itu, tidak memerlukan modal besar dan mudah pemasarannya. Bambu sebagai bahan baku pembuatan *tampah* banyak didatangkan dari Cot Girek karena di Bukit Hagu tidak ada pohon bambu. *Tampah* adalah sejenis peralatan rumah tangga yang biasa digunakan untuk menampih beras, gabah, jagung, kacang hijau, dan lain-lain.

⁶⁵ Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priayi dalam Masyarakat Jawa*. Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya. Hlm. 129.

⁶⁶ Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu. Wawancara dengan Bapak Suroto, Kepala Dusun Sukadamai, 5 November 2013 di Buki Hague.

⁶⁷ Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu.

Selain membuat *tampah*, mereka biasa pula membuat *bakul* atau *ceting* (tempat nasi). Konsumen biasanya datang sendiri ke rumah produsen atau melalui warung. Pemilik warung menjual kembali *tampah*. Daerah pemasaran *tampah* tidak saja di Bukit Hagu, tetapi juga ke daerah lain, seperti ke pasar Lhoksukon.⁶⁸

8. Pengaruh Transmigrasi terhadap Perkembangan Kebudayaan Setempat

Untuk mengetahui pengaruh transmigrasi terhadap kebudayaan setempat, uraian berikut ini akan diarahkan kepada unsur-unsur kebudayaan tertentu, seperti bahasa, peralatan, Kesenian, upacara, dan adat-kebiasaan.

8.1 Bahasa

Sebagai salah satu unsur kebudayaan, bahasa merupakan alat komunikasi terpenting dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu, unsur kebudayaan kerap kali menerima sentuhan unsur-unsur kebudayaan lain. Namun, kecenderungan orang untuk bertahan dengan bahasa sendiri tetap kuat. Pada kalangan penduduk setempat, bahasa Aceh tetap masih memainkan peranan utama, atau diungkung

⁶⁸ Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu. Wawancara dengan Bapak Suroto, Kepala Dusun Sukadamai, 5 November 2013 di Buki Hague.

sesama kelompok kesukumannya. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan penduduk setempat lebih terbatas kepada keluarga campuran, walaupun tidak seluruhnya demikian.⁶⁹

Pemakaian bahasa Indonesia tampak menonjol jika mereka berbicara dengan anggota masyarakat dari kelompok etnis lain. Akan tetapi, tidak ada penduduk setempat yang menggunakan bahasa pendatang jika berbicara dengan sesama anggota keluarga, walaupun keluarga mereka terbentuk atas dasar perkawinan campuran. Bahasa Jawa tetap digunakan dengan berasimilasi dengan bahasa lokal yang ada di Aceh. Tidak banyak perubahan, cuma beberapa konsonan dan vokal dan sedikit dialeknya yang telah menyesuaikan dengan bahasa lokal dan telah hilangnya letupan dental /b, /d, /th, seperti layaknya orang Jawa di pulau Jawa. Namun, akibat pengaruh proses asimilasi kebudayaan yang begitu lama, kebanyakan dari keturunannya, terutama yang tinggal pada mayoritas suku lokal jarang berbahasa Jawa, tetapi sudah menggunakan bahasa suku lokal di daerahnya, seperti menggunakan bahasa Aceh.⁷⁰

⁶⁹ Wawancara dengan Abdurrahman dan Suharno, 4 November 2013 di Cot Girek.

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Suroto (Kepala Dusun Sukadamai), 5 November 2013 di Bukit Hague. Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu.

8.2 Kesenian

Hal lain yang dikenal penduduk setempat adalah kesenian rakyat yang berasal dari penduduk pendatang. Penduduk setempat mengenal kesenian rakyat penduduk pendatang, seperti tari *kuda kepang*, *ketoprak*, *wayang kulit*, dan *ludruk*. Selain itu, mereka juga mengenal beberapa alat kesenian yang berasal dari penduduk pendatang, seperti angklung dan gamelan. Demikian pula sebaliknya, pendatang mengenal beberapa kesenian setempat, seperti seudati dan rapai.⁷¹

8.3 Upacara adat

Pengaruh Transmigrasi yang lain ditemukan juga pada upacara-upacara adat, seperti upacara perkawinan, kelahiran, kematian, kebiasaan dalam bertani, peralatan, dan makanan. Berbagai upacara adat atau kebiasaan tersebut pada umumnya masih dilaksanakan dengan mengikuti kebiasaan yang berlaku sejak dahulu. Namun, dalam hal-hal tertentu perubahan mulai tampak. Unsur baru yang berkembang pada upacara perkawinan, antara lain terdapat pada pakaian pengantin, hiasan, dan ruangan. Apabila dahulu untuk pengantin dikenakan pakaian adat Aceh, dewasa ini adakalanya dipergunakan jenis-jenis pakaian lain, seperti jas

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Suroto (Kepala Dusun Sukadamai), 5 November 2013 di Bukit Hague. Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu.

dan sloyor. Untuk menghias ruang pengantin, penggunaan *janur* tampak semakin meluas.

Pada upacara kelahiran, unsur baru yang mulai membudaya pada penduduk setempat antara lain *marhaban* (semacam zikir) ketika berlangsung upacara turun tanah. Adapun pada upacara kematian dan tahlilan, pada penduduk setempat sudah tidak lagi mengadakan kenduri kematian selama tujuh hari. Namun, kedua upacara tersebut masih dilaksanakan, walaupun sudah mulai berkurang.⁷²

8.4 Peralatan

Unsur baru lainnya yang juga meluas digunakan di kalangan penduduk setempat adalah peralatan rumah tangga dan makanan. Kebiasaan duduk di tikar sudah ditinggalkan dan mulai diganti dengan kursi tamu. Untuk keperluan memasak di dapur orang sudah memakai kompor. Jenis-jenis makanan tertentu, seperti sayur asam, sayur lodeh, sambal terasi, rendang padang, gado-gado, tempe, dan tahu sudah tidak asing lagi bagi sebagian besar penduduk setempat.⁷³

⁷² Wawancara dengan Bapak Suroto, Kepala Dusun Sukadamai, 5 November 2013 di Bukit Hague. Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu.

⁷³ Wawancara dengan Hartati, 5 November 2013 di Bukit Hagu. Wawancara dengan Bapak Suroto, Kepala Dusun Sukadamai, 5 November 2013 di Bukit Hague. Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu.

8.5 Kegiatan kemasyarakatan

Penduduk pendatang sering mengikuti upacara-upacara atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dilakukan oleh penduduk setempat. Sebaliknya, ikut sertanya penduduk setempat pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh penduduk pendatang, pada dasarnya ditentukan oleh hubungan kedekatan karena tempat tinggal. Tempat tinggal yang saling berdekatan menimbulkan hubungan kerja sama di antara mereka. Tanah sawah yang terletak di dalam satu kompleks daerah persawahan memberi peluang bagi mereka untuk saling membantu. Apabila ada tetangga, walaupun berlainan suku, yang mendapat kemalangan (musibah), mereka datang mengunjunginya untuk melihat atau memberikan bantuan, baik berupa bahan makanan maupun uang. Demikian pula jika ada tetangga yang meresmikan perkawinan atau melahirkan, mereka ikut mengunjunginya.⁷⁴

8.6 Kegiatan Organisasi

Keterlibatan pendatang dengan masyarakat setempat di Aceh Utara yang menonjol adalah kegiatan organisasi. Kegiatan organisasi bersama tersebut ada yang berbentuk arisan, gotong-royong, lembaga sosial, pertemuan-pertemuan

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Suroto, Kepala Dusun Sukadamai, 5 November 2013 di Bukit Hague. Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu.

keagamaan di langgar atau mesjid, ataupun organisasi perkampungan lainnya.⁷⁵

9. Penutup

9.1 Simpulan

Penduduk Bukit Hagu merupakan transmigran yang ditempatkan oleh pemerintah melalui program-program pemindahan yang berencana. Selain itu, adapula yang datang dengan tujuan menunggu kesempatan untuk dapat pindah ke wilayah lain. Namun, ada yang datang secara sukarela (spontan).

- (1) Ketransmigrasian di Aceh Utara telah memacu lahirnya sentra-sentra produksi dan sentra ekonomi baru. Hal itu, merupakan dampak positif akibat keterpaduan pembangunan multisektor di sebuah daerah. Adanya transmigrasi saling memperkaya unsur-unsur kebudayaan, baik penduduk setempat maupun pendatang. Ciri-ciri khas berbagai unsur kebudayaan transmigran masih tetap kentara. Setiap kelompok etnis boleh dikatakan tetap merupakan pendukung unsur-unsur kebudayaan mereka sendiri.

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Suroto (Kepala Dusun Sukadamai), 5 November 2013 di Bukit Hagu. Wawancara dengan Suyati, 6 November 2013 di Bukit Hagu.

9.2 Saran-Saran

- (1) Keragaman asal-usul etnis kerap kali menimbulkan problema sosial budaya tertentu, walaupun di Aceh hal ini dapat dikatakan jarang terjadi. Oleh karena itu, perlu adanya program pembinaan keragaman asal-usul etnis sedini mungkin, sebelum problema sosial budaya muncul.
- (2) Untuk lebih mengenal latar belakang kebudayaan masing-masing kelompok etnis diperlukan penelitian yang mendalam dan intensif. Melalui penelitian yang demikian memungkinkan untuk dapat dihasilkan konsep-konsep tertentu yang berkembang dan dipunyai oleh setiap kelompok etnis.
- (3) Transmigrasi sebaiknya tidak lagi merupakan program pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *topdown* dari Jakarta, melainkan berdasarkan Kerjasama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk menjadi transmigrasi lokal.

Bab 2

Industri dan Migrasi di Kabupaten Aceh Utara (Studi Kasus: Pabrik Gula Cot Girek)

Sri Waryanti

1. Pendahuluan

1. 1. Latar Belakang Masalah

Pola mobilitas penduduk atau yang lebih sering disebut dengan migrasi antar kota ataupun antar pulau dalam satu negara, sangat menarik untuk didiskusikan karena berkaitan dengan penyusunan kebijakan pemerintah dalam pembangunan di daerah asal maupun daerah tujuan migrasi tersebut terjadi. Penduduk sebagai subyek pembangunan, mempunyai peranan dan pengaruh yang tinggi terhadap setiap kebijakan negara dalam aspek kependudukan. Ada alasan dan faktor yang mencetuskan terjadinya migrasi tersebut.

Peninjauan migrasi secara regional sangat penting untuk ditelaah secara khusus mengingat adanya desentralisasi (kepadatan) dan distribusi penduduk yang tidak merata, adanya faktor-faktor pendorong dan penarik bagi orang-orang untuk melakukan migrasi, adanya desentralisasi dalam pembangunan, di lain pihak, komunikasi termasuk transportasi semakin lancar.¹ Berdasarkan Sensus Penduduk

¹ Munir, R. 2000. *Migrasi*. dalam Lembaga Demografi FEUI. Dasar-dasar Demografi. Jakarta : UI. Hlm.115.

1971, Sensus Penduduk 1980, Sensus Penduduk 1990 dan Survei Penduduk Antar Sensus tahun 1995 tidak ada satu provinsi pun yang tidak mengalami perpindahan penduduk baik perpindahan masuk maupun perpindahan keluar.

Salah satu pendorong penduduk melakukan migrasi adalah karena adanya pembangunan industry. Karena pembangunan industri dapat menimbulkan lapangan pekerjaan baru dan kesempatan-kesempatan baru, baik yang langsung pada industri itu maupun yang tidak langsung. Orang yang tertarik (datang) ke daerah industri mempunyai motivasi yang sangat beragam yang dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan sebelumnya. Misalnya faktor ekonomi agar ada peningkatan taraf kehidupan dengan lapangan kerja barunya, faktor sosial di mana dengan penghidupan yang layak membuat mereka merasa jadi "orang" yang diperhitungkan dan juga faktor budaya dengan kebiasaan merantau.

Salah satu daerah industri di Aceh adalah Kabupaten Aceh Utara. Dalam dinamika sejarah industry, Aceh Utara merupakan salah satu daerah yang mengalami masa keemasan dengan pendapatan asli daerah yang bersumber dari industri besar di antaranya : Kertas Kraft Aceh (KKA), LNG Arun, Pupuk Iskandar Muda (PIM) , Pabrik Gula Cot Girek, dan lain sebagainya . Dengan kondisi ini Aceh Utara merupakan magnet tersendiri bagi sebagian orang khususnya dari Pulau Jawa untuk mencoba peruntungan mengadu nasib agar dapat meningkatkan taraf kehidupannya baik ekonomi maupun sosial.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam kajian ini, yaitu: (1) Bagaimanakah pembangunan Pabrik Gula Cot Girek? (2) Bagaimanakah cara memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk industri gula tersebut? (3) Bagaimanakah dampak migrasi penduduk terhadap kehidupan ekonomi dan sosial di Kabupaten Aceh Utara ?

1.3. Maksud dan Tujuan

Selanjutnya tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui (1) sejarah pembangunan pabrik gula Cot Girek di Kabupaten Aceh Utara; (2) pemenuhan tenaga kerja industri gula di Kabupaten Aceh Utara; dan (3) dampak migrasi penduduk terhadap kehidupan ekonomi dan sosial di Kabupaten Aceh Utara. Kajian tentang migrasi penduduk ini diharapkan dapat dimanfaatkan tidak hanya dari aspek akademis namun juga dari aspek praktis, yaitu (1) untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya tentang migrasi penduduk di Aceh Utara; dan (2) sebagai bahan masukan kepada instansi pembuat kebijakan kependudukan.

1.4. Kerangka Teoritis

Sebelum mengupas lebih jauh tentang migrasi penduduk, pada uraian ini akan diawali dengan membahas pengertian mobilitas penduduk. Secara umum dibedakan antara mobilitas penduduk secara horizontal dan mobilitas

penduduk secara vertikal. Mobilitas penduduk yang akan dibahas pada uraian berikut ini ditekankan pada mobilitas penduduk secara horizontal atau geografis, yang meliputi semua gerak penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu dalam periode waktu tertentu pula.² Batas wilayah yang dimaksud di sini adalah batas wilayah administrasi yaitu provinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan, atau dusun. Bentuk-bentuk mobilitas dibedakan menjadi mobilitas penduduk permanen atau migrasi dan mobilitas penduduk nonpermanen atau mobilitas sirkuler. Migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap di daerah tujuan. Sementara itu mobilitas nonpermanen adalah gerak penduduk dari satu tempat ke tempat lain dengan tidak ada niat untuk menetap di daerah tujuan.

Secara operasional, migrasi penduduk dapat diukur menurut ruang dan waktu, seperti yang digunakan dalam Sensus Penduduk. Dalam Sensus Penduduk, seseorang disebut sebagai migran, apabila orang tersebut melintasi batas wilayah provinsi dan lamanya bertempat tinggal di daerah tujuan minimal 6 bulan. Mengenai batas wilayah ini, sejak Sensus Penduduk (SP) tahun 2000 dikembangkan pula batas wilayah kabupaten. Namun demikian, dalam kajian ini karena ada maksud untuk membandingkan dan melihat kecenderungan pola dan arah migrasi penduduk, batas wilayah yang digunakan adalah batas wilayah provinsi.

² Mantra, Ida Bagoes. 2003. *Demografi Umum*. Edisi kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 23

Pertanyaan yang muncul adalah mengapa penduduk memutuskan pindah atau tetap tinggal di tempat asalnya? Para pakar ilmu sosial melihat mobilitas penduduk dari sudut proses untuk mempertahankan hidup. Proses mempertahankan hidup ini harus dilihat dalam arti yang luas, yaitu dalam konteks ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Meskipun demikian, banyak studi memperlihatkan bahwa bentuk-bentuk keputusan serta motivasi yang diambil oleh individu akan sangat berlainan, antara lain karena alasan ekonomi, alasan politik.³ Alasan kenapa migrasi dilakukan, bisa dibedakan menjadi dua yaitu adanya faktor pendorong serta adanya faktor daya tarik. Tjiptoherijanto menyatakan bahwa perpindahan atau migrasi yang didasarkan pada motif ekonomi merupakan migrasi yang direncanakan oleh individu sendiri secara sukarela (*voluntary planned migration*). Para penduduk yang akan berpindah, atau migran, telah memperhitungkan berbagai kerugian dan keuntungan yang akan didapatnya sebelum yang bersangkutan memutuskan untuk berpindah atau menetap di tempat asalnya. Dalam hubungan ini tidak ada unsur paksaan untuk melakukan migrasi.

Sebagai akibat dari sentralisasi pembangunan yang terjadi di Jawa, maka menyebabkan terjadinya *disparitas* sistem pengupahan tenaga kerja. Secara rasional, orang akan mencari

³ Tjiptoherijanto, Prijono 2000. "Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi", Naskah No. 20, Juni-Juli 2000.

pekerjaan dengan upah yang lebih tinggi. Adanya perbedaan sistem pengupahan yang lebih menjanjikan disebut juga merupakan salah satu faktor terjadinya migrasi. Dengan mendapatkan upah yang relatif lebih tinggi, individu akan berasumsi meningkatnya pendapatan dan pada akhirnya meningkatnya kesejahteraan individu yang bersangkutan. Hal ini didukung oleh adanya teori *neoclassical economics*, menekankan baik makro maupun mikro lebih memberikan perhatian pada perbedaan upah dan kondisi kerja antar daerah atau antar negara, serta biaya, dalam keputusan seseorang melakukan migrasi. Menurut aliran ini, perpindahan penduduk merupakan keputusan pribadi yang didasarkan atas keinginan untuk mendapatkan kesejahteraan yang maksimum. Sedangkan teori "*new economics of migration*", di lain pihak beranggapan bahwa perpindahan atau mobilitas penduduk terjadi bukan saja berkaitan dengan pasar kerja, namun juga karena adanya faktor-faktor lain. Aliran ini juga menekankan bahwa keputusan untuk melakukan migrasi tidak semata-mata keputusan individu saja, namun terkait dengan lingkungan sekitar, utamanya lingkungan keluarga. Dalam hal ini keputusan untuk pindah tidak semata ditentukan oleh keuntungan maksimum yang akan diperoleh, tetapi juga ditentukan oleh kerugian yang minimal yang dimungkinkan dan berbagai hambatan yang akan ditemui, dikaitkan dengan terjadinya kegagalan pasar (*market failures*).⁴

⁴ Ibid.

Aliran "*dual labor market theory*" mengemukakan bahwa migrasi penduduk terjadi karena adanya keperluan tenaga kerja yang bersifat hakiki (*intrinsic labor demand*) pada masyarakat industri modern.⁵ Menurut paham ini migrasi terjadi karena adanya keperluan akan klasifikasi tenaga kerja tertentu pada daerah atau negara yang telah maju. Kota sebagai pusat industri dan jasa, jelas lebih memberikan peluang berbagai macam jenis pekerjaan kepada semua orang. Banyaknya profesi yang bisa dipilih, membuat magnet bagi semua orang, tidak hanya yang mampu namun juga yang tanpa keahlian pun turut serta dalam proses migrasi tersebut. Dengan demikian migrasi terjadi bukan karena *push factors* yang ada pada daerah asal, namun lebih karena adanya *pull factors* pada daerah tujuan; keperluan akan tenaga kerja dengan spesifikasi tertentu yang tidak mungkin dielakkan. Mengacu pada berbagai pendapat tersebut, pembangunan ekonomi memang akan mendorong terjadinya mobilitas dan perpindahan penduduk. Penduduk akan berpindah menuju tempat yang menjanjikan kehidupan yang lebih baik bagi diri maupun keluarganya, yang tidak lain adalah tempat yang lebih berkembang secara ekonomi dibandingkan dengan tempat asalnya.⁶

Apa yang dilakukan oleh etnis Jawa berpindah ke Pulau Sumatera merupakan sebuah konsep yang disebut dengan migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat

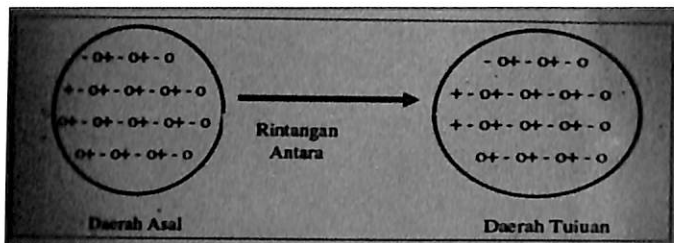
⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid.*

lain melampaui batas politik/negara ataupun batas administrasi/batas bagian dalam suatu negara. Menurut Everet S. Lee migrasi dalam arti luas adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen. Di sini tidak ada pembatasan, baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah perbedaan itu bersifat sukarela atau terpaksa. Jadi migrasi adalah gerakan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan ada niatan menetap di daerah tujuan. Faktor-faktor migrasi (Teori Dorong-Tarik Everet S. Lee) :

1. Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal.
2. Faktor-faktor yang terdapat di daerah tujuan.
3. Faktor penghalang antara.
4. Faktor-faktor pribadi (individu).

Untuk Indonesia sendiri, tanpa mempersoalkan jauh dekatnya perpindahan, mudah atau sulit, setiap migrasi mempunyai tempat asal, tempat tujuan dan bermacam-macam rintangan yang menghambat. Faktor jarak merupakan faktor yang selalu ada dari beberapa faktor penghalang.



Faktor Daerah Asal dan Daerah Tujuan serta Rintangan Antara dalam Teori Migrasi Evert S. Lee

Dalam setiap daerah banyak sekali faktor yang mempengaruhi orang untuk menetap di suatu tempat atau menarik orang untuk pindah ke tempat itu. Perbedaan sikap antara setiap migran dan calon migran terdapat faktor positif dan faktor negatif, yang terdapat baik di tempat asal maupun tujuan. Faktor positif (+) daerah asal berarti mempunyai daya dorong terhadap seseorang untuk pergi meninggalkan daerah tersebut, sebaliknya faktor positif di daerah tujuan berarti mempunyai daya tarik terhadap seseorang untuk datang ke daerah tersebut. Sedangkan faktor negatif (-) di daerah asal akan berfungsi sebagai penghambat seseorang untuk pindah ke daerah lain. Begitu pula faktor negatif (-) di daerah tujuan adalah faktor yang tidak disenangi oleh seseorang, dengan demikian juga akan menghambat masuknya seseorang ke daerah tersebut. Faktor netral (0) pada dasarnya tidak berpengaruh terhadap seseorang untuk bermigrasi.

Penilaian seseorang terhadap suatu faktor tertentu dapat positif (+), negatif (-), atau netral (0). Hal ini bergantung kepada keadaan pribadi orang tersebut yang dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, kebutuhan dan sifat-sifat pribadi. Begitu pula persepsi seseorang terhadap faktor penghalang berbeda-beda dengan orang lain. Beberapa jenis penghalang adalah jarak, penghalang alami, biaya perjalanan, peraturan atau undang-undang imigrasi, dan besarnya anggota keluarga.⁷

⁷ Lee, Everett S. 1970. "A Theory of Migration", in George J. Demko, Harrold M. Rose, and George A. Schnell (eds), *Population Geography: A Reader*. 228-298.

Berdasarkan kasus perpindahan etnis Jawa ke Pulau Sumatera diduga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti disebutkan dalam teori Everet S. Lee. Selain itu, terdapat pula faktor negatif dan faktor positif yang dapat menjadi faktor pendorong dan penarik etnis ini melakukan migrasi.

1.5. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan sumber sejarah, sejarawan dapat menempuh dua cara yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Sumber sejarah dapat diperoleh di perpustakaan, arsip, museum, dan masyarakat.⁸ Sebelum dilakukan penulisan dan penerbitan buku ini tim melakukan penelitian dengan menggunakan cara pengumpulan data melalui teknik wawancara. Wawancara mendalam terhadap informan dan responden yang diperkirakan mengetahui sejarah migrasi dan pabrik gula Cot Girek di Aceh Utara. Dengan metode ini diharapkan menghasilkan sebuah penelitian yang benar-benar mencerminkan kondisi yang ada di lapangan. Penelitian ini juga tentunya didukung oleh data-data primer dan sekunder melalui studi kepustakaan. Sebagai sebuah penelitian sejarah, maka peneliti melakukan beberapa langkah yang lazim dalam penelitian sejarah, yaitu *heuristik* (pengumpulan sumber), kritik sumber, interpretasi dan historiografi

⁸Rusdi Sufi dkk. 2000. *Keanekaragaman Budaya dan Suku Bangsa Di Aceh*. Banda Aceh: BKSNT Banda Aceh. Hlm.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1. Selintas Kabupaten Aceh Utara

Letak Kabupaten Aceh Utara secara geografis berbatasan langsung dengan : Sebelah Utara dengan Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka; Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bener Meriah; Sebelah Timur dengan Kabupaten Aceh Timur; dan Sebelah Barat dengan Kabupaten Bireuen. Buku Aceh Utara Dalam Angka 2010 menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Utara memiliki luas wilayah sebesar 3.296,86 km² atau 16,24% d dari total luas Provinsi Aceh.

Luas wilayah tersebut terbagi ke dalam 27 kecamatan. Di antara 27 kecamatan, Kecamatan Paya Bakong, Kecamatan Sawang dan Kecamatan Geureudong Pase adalah wilayah terluas. Selain itu, kecamatan lain yang tergolong luas wilayahnya adalah Kecamatan Lhoksukon, Meurah Mulia, Cot Girek, Tanah Jambo Aye, Baktiya, Kuta Makmur, Langkahan dan Seuneudon

Jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2010 di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 529.746 jiwa yang terdiri atas 262.101 laki-laki dan 267.645 perempuan. Kecamatan Dewantara merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 46.277 jiwa, sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Geureudong Pase yakni hanya 3.705 jiwa. Jika dilihat laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Utara adalah sebesar 1,52 % pertahun. Kecamatan yang paling tinggi laju pertumbuhan penduduknya adalah Kecamatan Simpang Keuramat yakni sebesar 6,57 %, sedangkan Kecamatan yang paling rendah laju pertumbuhan

penduduknya adalah Kecamatan Dewantara yakni sebesar 0,05 %. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kecamatan Simpang Keuramat disebabkan karena Kecamatan Simpang Keuramat merupakan Kecamatan yang letaknya relative jauh dari ibukota Kabupaten Aceh Utara yang merupakan pusat kegiatan sosial ekonomi masyarakat Aceh Utara. Sedangkan Kecamatan Dewantara dengan laju pertumbuhan penduduk yang paling rendah disebabkan Kecamatan Dewantara merupakan kecamatan yang lebih maju karena di wilayah tersebut terdapat proyek vital yaitu LNG Arun dan PIM.

2.2. Selintas Pabrik Gula Cot Girek

Gula merupakan bagian penting dari kehidupan ; karena sejarah gula sebagai bagian budaya yang sudah melewati masa perjalanan yang panjang. Menurut sejarah yang terdokumentasi, gula yang berasal dari tebu pertama kali dikenal oleh orang-orang Polinesia, dan selanjutnya berkembang ke daerah India. Disebutkan bahwa Raja Darius dari Kerajaan Persia pada tahun 510 sebelum Masehi, menguasai India, dia menemukan "batang rerumputan yang menghasilkan madu tanpa lebah". Penemuan tebu pada saat itu dirahasiakan karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi sehingga mereka merasa penemuan ini harus dijaga secara ketat, sedangkan produk olahannya diekspor dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

Akan tetapi penemuan tebu yang telah dirahasiakan dalam waktu yang lama akhirnya terbongkar setelah terjadi ekspansi besar-besaran oleh orang-orang Arab pada abad

ketujuh sesudah masehi. Ketika mereka menguasai Persia pada tahun 642 mereka menemukan tanaman tebu dan kemudian mempelajari cara pembuatan bagaimana memproses tebu yang akhirnya menjadi gula yang dapat dikonsumsi. Masa-masa selama masa ekspansi, dimanfaatkan mereka untuk mendirikan pabrik pengolahan gula di berbagai daerah yang mereka kuasai, termasuk di Afrika Utara dan Spanyol.

Benua Eropa sebagai akar peradaban pada masa itu, mengenal gula berbarengan dengan terjadinya Perang Salib pada abad ke 11. Para prajurit yang pulang dari jazirah Arab menceritakan keberadaan "rempah baru" yang enak dan manis ini. Gula pertama diketahui tercatat keberadaannya di Inggris pada tahun 1099, dan pada abad berikutnya merupakan periode ekspansi besar besaran perdagangan Eropa bagian barat dengan dunia timur, termasuk impor gula. Sebagai perbandingan, dalam sebuah catatan pada tahun 1319 harga gula di London sebesar "dua *shilling* tiap pon". Nilai ini setara dengan beberapa bulan upah buruh rata-rata, sehingga dapat dikatakan gula sangatlah mewah dan merupakan barang yang mahal harganya pada waktu itu dan tidak semua orang biasa dapat menikmati secara bebas. Selain menjadi bahan makanan dan minuman, pada saat itu gula juga dikenal sebagai obat, di mana banyak petunjuk kesehatan dari abad ke 13 hingga 15 yang merekomendasikan pemberian

gula kepada orang sebagai obat penambah kekuatan penghasil kalori.⁹

Sebagai salah satu komoditi perdagangan, industri gula didominasi dan dimonopoli oleh Venesia sampai abad 15, bersamaan dengan terbukanya jalur langsung dari Eropa menuju India yang dipelopori oleh Vasco Da Gama pada 1498. Dominasi yang berpindah ini juga tidak berlangsung lama karena ketika Columbus menemukan Amerika ; salah satu prioritas dalam ekspansinya tersebut adalah membudidayakan tanaman tebu untuk menghasilkan gula secara terorganisir dengan membuka lahan pertanian tebu secara besar besaran dan mendatangkan tenaga kerja dari Afrika ke Negara kawasan Karibia.¹⁰

Peran gula yang sudah menjadi komoditi strategis di Eropa, menimbulkan efek samping bagi masyarakat Eropa untuk mengelola budidaya tebu secara terorganisir dan lebih berdaya ekonomis di kawasan Karibia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di Eropa. Untuk selanjutnya sesuai dengan pergerakan ekspansi bangsa-bangsa Eropa, maka ekspansi ini sampai ke kawasan Asia Tenggara yang

⁹ Martum Pulungan. "MENGENAI PABRIK GULA COT GIRES". <http://plantersclub.blogspot.com/2013/09/pabrik-gula-tjot-girek.html> (diakses tanggal 15 Nopember 2013).

¹⁰ *Ibid.*

secara struktur dan iklim cocok untuk ditanami tebu sebagai penghasil gula.¹¹

Di Indonesia, menurut Robert Cribb dan Audrey Kahin menyebutkan bahwa tebu (*Saccharum officinarum*) kemungkinan adalah tanaman asli Indonesia. Walau demikian, masyarakat zaman dulu lebih memilih menggunakan aren, madu atau lontar sebagai pemanis bukannya tebu. Pemakaian tebu sebagai bahan baku gula dimulai setelah Vere (VOC) mendukung pemukiman Cina di Jawa untuk menghasilkan tebu pertama kali secara komersial di pedesaan sekitar Batavia pada abad 17.¹²

Industri gula ini mulai berkembang menjelang abad ke 19 NHM (*Nederlandsche Handel Maatschappij*) yang melakukan monopoli gula dan didukung oleh pemerintah kolonial untuk melakukan program tanam paksa sehingga bahan baku dapat diperoleh dengan mudah. Strategi ini ditempuh untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan baku untuk memproduksi gula. Pada periode ini penggilingan tebu swasta kebanyakan dimiliki pengusaha yang berasal dari Eropa yang kemudian menjual hasil gulanya kepada NHM. Pengusaha yang menjual tebunya kepada NHM harus mengikuti aturan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu, namun keuntungan tetap masih diperoleh oleh pengusaha.

¹¹ *Ibid.*

¹² Sirajudin Hasbi. " Perjalanan Industri Gula di Indonesia : (Tidak) Selalu Terasa Manis". Dalam [id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/perjalanan-industri-gula-di-Indonesia-tidak;selalu-terasa manis-070313971.html](http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/perjalanan-industri-gula-di-Indonesia-tidak;selalu-terasa-manis-070313971.html) (diakses tanggal 10 Desember 2013)

Selanjutnya pada awal abad ke-19 gula menjadi komoditas ekspor utama dari Jawa dan nilainya mencapai 77,4 persen dari nilai total ekspor pada tahun 1840.¹³

Berikutnya tahun 1883 perusahaan gula swasta berskala kecil mulai menghentikan operasionalnya karena pengaruh dari adanya krisis ekonomi dunia dan nilai eksportnya menurun. Pada saat itu kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh NHM untuk melakukan investasi modal dalam jumlah yang besar dengan mendirikan dan memperbaiki pabrik gula yang berada di Pulau Jawa dengan memperbaharui sistem teknologi. Dengan perbaikan teknologi yang dilakukan, hal ini membawa dampak positif bagi pabrik gula di Jawa yang dapat menerapkan prinsip efisiensi dalam memproduksi gula. Sehingga masa kejayaan pabrik gula di Jawa terjadi dalam kurun waktu tahun 1931 dan tercatat sebagai eksportir gula terbesar kedua di dunia.¹⁴

Dalam sumber yang lain dikemukakan bahwa industri gula dimulai dengan ekspansi bangsa Eropa di Indonesia pada abad 17 dimulai di daerah sekitar Jakarta dan berkembang ke arah timur Pulau Jawa. Puncak kegemilangan industri gula di Indonesia terjadi pada tahun 1930an, dengan beroperasinya 179 pabrik pengolahan dan menghasilkan produksi sebanyak kurang lebih 3.000.000 ton gula per tahun. Terjadinya krisis ekonomi malaise dan dua kali perang dunia memukul industri gula di Indonesia ; sehingga mengakibatkan pada awal 1950an hanya tersisa 30 pabrik pengolahan yang beroperasi dengan

¹³*Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

menghasilkan produksi sebanyak 500.000 ton gula pertahun. Kondisi tersebut menyebabkan Indonesia berubah peran yang sebelumnya sebagai eksportir gula terbesar di dunia menjadi importir mulai tahun 1950an.

Pengakuan Kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, melengkapi status kemerdekaan RI secara *de facto* dengan *de jure*. Segera setelah pengakuan kedaulatan, seluruh elemen bangsa bersatu padu, bahu membahu dalam rangka mengisi kemerdekaan dengan tujuan untuk mensejahterakan setiap insan rakyat Indonesia. Sumitro Djojohadikusumo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada kabinet Natsir merancang suatu cetak biru dari perekonomian yang tidak bersandar kepada ekspor produk primer ke pasar dunia, suatu kerentanan yang menjadi pelajaran pahit yang diterima saat depresi melanda seluruh dunia pada 1930an. Selain dari merestruktur dan mereformasi sistem perdagangan ; Sumitro juga merancang penguatan ekonomi negara dengan cara menasionalisasi perusahaan bermodal asing untuk dapat dimiliki oleh Indonesia. Dalam rangka hal tersebutlah maka pemerintah berencana membuka pabrik gula di Aceh dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia umumnya dan provinsi Aceh dan Sumatera Utara khususnya.

Pabrik Gula tersebut yang diberi nama "Pabrik Gula Tjot Girek" berlokasi (saat ini) di kampung Cot Girek, Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara ; sekitar 15 Kilometer dari arah Lhoksukon , 35 Kilometer dari Kota Lhokseumawe dan 200 Km dari Medan. PG Tjot Girek berawal

dari konsesi Schamhuyzer dengan atas hak keputusan *Gouverneur van Atjeh en Onderhorigheden* tanggal 30 Desember 1919, untuk selanjutnya berpindah kepada NV. Cultuur "Lhoksukon" 22 Februari 1930 dan 14 Desember 1932 untuk tanah seluas 7890.7 Ha yang terdiri dari 2.000 Ha Hutan sekunder dan 5.890 Ha tanah berbukit.

Pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949, menjadi alasan pengalihan kepemilikan NV. Cultuur "Lhoksukon" kepada PPN Lama yaitu perusahaan Negara bentukan pemerintah yang mengelola perkebunan pemerintah Belanda. Pada era PPN lama ini areal eks "Lhoksukon" direncanakan untuk dieksploitasi seluas 1.200 Ha dengan penggunaan seluas 750 Ha sebagai sawah irigasi dan 450 Ha sebagai sawah tadah hujan. Usaha eksploitasi padi dan karet akhirnya terhenti akibat kendala gangguan situasi keamanan di Propinsi Aceh berupa munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Pada saat berakhirnya usaha eksploitasi era PPN Lama ini telah dapat direalisasikan 750 Ha sawah irigasi, 450 Ha sawah tadah hujan. Mulai tahun 1960 ditambah dengan tanaman percobaan berupa karet seluas 460 Ha dan tebu.

Bibit tebu pertama yang ditanam di Cot Girek adalah tebu jenis POJ 2878, POJ 3016 dan POJ 3067 . Bibit-bibit yang ditanam di Cot Girek berasal dari Pasuruan Jawa Timur. Tebu tersebut dibawa langsung ke Cot Girek oleh Ir T Soekarno, Ir. Soedarsono dan Subandi pada bulan Agustus 1959. Berdasarkan penelitian terhadap hasil tanaman percobaan awal, dapat disimpulkan bahwa manajemen budidaya tebu di Cot Girek harus mengadakan seleksi bibit secara luas dan

perlu ditambah dengan bibit import dari jenis yang mempunyai produksi kristal yang tinggi.

Pada tataran pemerintah sendiri, semangat Rencana Pembangunan yang digagas Soemitro tetap berjalan. Rencana yang bernafaskan kepada kemandirian ekonomi daerah tersebut adalah berkaitan dengan alasan ekonomis untuk menambah konsumsi gula perkapita sesuai dengan amanat MPRS serta dikarenakan rendahnya produktivitas pabrik di Jawa. Produktivitas yang menurun tersebut dipengaruhi krisis ekonomi yang melanda dunia. Selain daripada pertimbangan stabilisasi politis dan keamanan, kebijakan tersebut juga mengambil peran sebagai *agent of development*. Hal tersebut menjadi dasar pengambil keputusan untuk mendirikan pabrik gula di luar Pulau Jawa yaitu di Sulawesi dan Sumatera.

Pembangunan pabrik gula di Aceh menjadi bagian dari perjanjian bilateral ekonomi antara Indonesia dan Polandia, yang ditandatangani di Jakarta pada 11 Agustus 1961 antara Wakil Perdana Menteri (Waperdam) Chairul Saleh sebagai wakil Republik Indonesia dan Menteri Negara Republik Rakyat Polandia Prof Dr Witold Trampezyński .

- 6 -

PABRIK 3.

Terdapat perjanjian yang Persewaan ini dapat dipelajari sepenuhnya serta lembar perantaraannya, maka setelah itu pada Persewaan ini telah akan berakibat, sehingga bila telah ditetapkan akan diadakan kembali perantaraannya Persewaan ini.

Disamping akan diadakan pula perjanjian untuk satu pihak akan diadakan waktu 2 tahun untuk tugas pemerintah tersebut diadakan, sehingga untuk diadakan di Aceh Utara dan sekitarnya.

PABRIK 4.

Persewaan ini akan diadakan pula Persewaan ini akan diadakan dan akan tetap berakibat untuk semua perantaraannya yang tidak karena seluruhnya Persewaan ini akan akan Persewaan ini akan diadakan.

Disamping di Aceh Utara pula di sekitar Aceh, akan diadakan pula yang telah, sehingga akan diadakan Persewaan, Persewaan dan Persewaan, dan akan diadakan Persewaan ini akan akan.

Sebelum tahun 1962, pemerintah akan mengadakan Persewaan, maka Persewaan ini akan akan diadakan Persewaan ini akan akan Persewaan ini akan akan Persewaan ini akan akan.



DITOLONG PABRIK 3
KABUPATEN ACEH UTARA

Prof. Dr. H. Tjallingii
Prof. Dr. H. Tjallingii

DITOLONG PABRIK 4
KABUPATEN ACEH UTARA

Prof. Dr. H. Tjallingii
Prof. Dr. H. Tjallingii

Gambar Diambil dari Martum Pulungan. MENGENAI PABRIK GULA COT GIREK. (<http://plantersclub.blogspot.com/2013/09/pabrik-gula-tjot-girek.html>)

Tindak lanjut dari perjanjian bilateral ini, maka pada tanggal 30 Nopember 1962 diterbitkan sebuah kontrak pengadaan pabrik gula antara Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Agraria Mr Koslan A Tohir dan Menteri Pertanian Ir Soesilo H. Prakoso serta Jan Giedwids dan Edward Cichechi dari pihak CEKOP suatu BUMN milik Republik Rakyat Polandia. Pengadaan pabrik gula dengan nama "Projek Gula Tjot Girek" yang terdiri dari pabrik gula berkapasitas giling maksimal 2.500 Ton tebu/Hari, dan luas tanaman tebu giling sebesar 4.000 Ha tersebut terdaftar sebagai Projek Industrie A.I.163.

Keputusan pendirian pabrik gula di Cot Girek adalah suatu keputusan yang didasarkan kepada hasil penelitian komprehensif yang dilakukan dengan bantuan Lembaga Penelitian RISPA Medan dan BP3G Pasuruan. Penelitian dan riset untuk budidaya telah dilakukan pada 1959 - 1963 oleh Ir T Soekarno dari BPU PPN dan Ir Sarjadi dari BP3G Pasuruan. Kemudian pada tahun 1963 - 1965 oleh Ir Simatupang, Kepala *Research* dan Ir Sarjadi dari BP3G Pasuruan, dilanjutkan terus pada tahun 1965 - 1967 oleh Ir Soedjono di bawah pengawasan BP3G Pasuruan, tahun 1968 - 1970 oleh Ir TM Joesoef, Kepala *Research* dibawah pengawasan BP3G Pasuruan. CEKOP sendiri pada tahun 1963 mendatangkan Gelsinki dan Symzioh untuk ikut mengadakan penelitian dan riset tanah terhadap kecocokan tanah di Cot Girek untuk penanaman tebu sebagai bahan baku pengolahan tebu.

Penelitian dan riset kelayakan untuk pembangunan pabrik serta sarana dan prasarana pendukung dilakukan pada 1963 oleh Prof. Willun dari Polandia dengan didampingi Ir Sumara dari Lembaga Tanah Institut Teknologi Bandung ; di mana hasil survey menetapkan posisi *main building* adalah berada tepat di tengah luas hamparan tanah yang sebesar 7.800 Ha. Hasil riset terhadap tanah ditindak lanjuti dengan tahapan perencanaan mesin dan peralatan yang akan digunakan. Tim perencana terdiri dari tim CEKOP yang diketuai Gelsinki dan tim Indonesia yang diketuai Ir Soedarsono (Ahli Mesin), dengan anggotanya Ir Liem Tjiang Hwat / Ir Halim (Ahli Teknologi Gula), Ir Njoo Hwat Boen (Ahli Mesin), Liau Koh Tjie (Ahli Teknologi Gula), Ir Tan Gwan An (Ahli Listrik), Liem In Tjioe (Ahli Mesin) dan

Lessoemardjo (Ahli Mesin). Sementara itu, perencanaan pembangunan sipil dilaksanakan oleh Biro Insinjur dan Arsitek Artistica Bandung dengan pengawasan / *directie voering* oleh pihak PG Tjot Girek.

Pada permulaan tahun 1970 dilakukan *feasibility study* oleh *American Factors Associate* dengan tujuan untuk mengadakan penelitian secara mendalam dalam rangka menjawab pertanyaan apakah Proyek Gula Tjot Girek dimasa depan mempunyai potensi ekonomi dan potensi bisnis yang layak dalam kurun waktu yang panjang.

Hasil daripada studi yang dilakukan didapat kesimpulan bahwa "*Tjot Girek Project can be made economically feasible under the assumptions and the work program recommended*" ; dalam laporannya penekanan diutamakan kepada manajemen yang sehat. Akhir tahun 1964 paket mesin dan peralatan tahap pertama dari Polandia mulai datang ke Indonesia melalui pelabuhan Belawan dan Lhokseumawe, di mana secara khusus di pelabuhan Lhokseumawe dibangun sebuah dermaga dari kayu sepanjang 95 M, dibantu dengan sebuah *crane* dari Pertamina untuk keperluan *handling* mesin dan peralatan yang beratnya bisa mencapai 25 Ton. Kegiatan *handling* di dermaga pelabuhan Belawan maupun Lhokseumawe berlangsung terus dan dinyatakan lengkap pada 1967, dengan total *handling* sebesar 17.000 Ton.

Pada pertengahan April 1965 dimulai seremonial pembangunan Pabrik Gula Tjot Girek yaitu upacara menanam kepala kerbau ditempat di mana *main building* akan didirikan.

Kepala kerbau tersebut ditanam oleh Letnan Kolonel Harsono, Perwira Pengawas dari BPU Perusahaan Negara Bangunan.



Pembangunan fisik selesai pada pertengahan bulan Agustus 1970 dan secara resmi dinyatakan siap secara operasional pada hari Senin tanggal 31 Agustus 1970 jam 14.15 WIB yaitu saat dimulainya *first trial run / giling percobaan pertama*. Lambatnya waktu pembangunan yang mencapai enam tahun tersebut disebabkan oleh rumitnya sumber pendanaan yang berkisar antara pembiayaan oleh Pemerintah RI atau BPU PPN Gula yang mana permasalahan dari mana sumber pendanaan ini baru terselesaikan pada pertengahan tahun 1968.¹⁵ Dalam penyampaian pokok-pokok RAPBN 1970/1971 di hadapan rapat pleno terbuka DPR-GR Presiden

¹⁵Martum Pulungan.

Soeharto menyampaikan bahwa laju inflasi tahun 1969 mencapai kurang 10 % sehingga menghasilkan kemantapan harga-harga, terutama sembilan bahan pokok. Nilai rupiah semakin stabil dan suku bunga deposito terus menurun sehingga beberapa pabrik yang sebelumnya mengalami pasang surut dalam pembangunannya dapat segera terealisasi dan diselesaikan pembangunannya, di antaranya yaitu : pabrik kertas di Banyuwangi dan Goa, pabrik ban di Palembang, pabrik petrokimia di Gresik, serta pabrik gula di Cot Girek Aceh Utara.¹⁶



¹⁶ 1970-01-05 Menyampaikan RAPBN 1970/1971, dalam soeharto.co/tag/nilai/ (diakses tanggal 16 Nopember 2013)

Produksi gula kristal sebagai hasil pengolahan “PG Tjot Girek” dihasilkan pada tanggal 6 September 1970 jam 10.00 WIB dan masih belum sempurna karena bahan pokoknya ialah tebu yang sudah berumur diatas 14 - 15 bulan, sedangkan *rendement* pada hari hari pertama adalah 5,5 % dengan RQ = 66.

Pada saat dimulainya musim giling yang pertama , keterlibatan tenaga kerja sangat menentukan. Oleh karena kita ketahui bahwa perusahaan ini di samping membutuhkan modal yang tidak sedikit juga membutuhkan keterlibatan tenaga kerja dalam jumlah yang besar atau meminjam istilah periode Orde Baru diistilahkan dengan padat modal dan padat karya. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pabrik gula Cot Girek salah satu langkah pemerintah yang ditempuh adalah dengan melaksanakan transmigrasi . Diharapkan dengan transmigrasi ini dapat mengurangi tekanan penduduk di Pulau Jawa dan sekaligus memberikan stimulus bagi pembangunan dan pengembangan wilayah khususnya di daerah-daerah tujuan transmigrasi. Sehingga pada tahun 1976 sekitar 300 KK transmigran dari Jawa ditempatkan di Cot Girek. Di samping itu menurut salah satu informan Bapak Suharno menyampaikan bahwa salah satu cara memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pabrik adalah melibatkan kader pramuka yang nantinya menjadi tenaga inti

atau karyawan yang menangani mesin, laboratorium, pengolahan gula itu sendiri.¹⁷

Adapun kader pramuka ini didatangkan dari Jawa, Medan, Kualasimpang dan Takengon. Dari kader pramuka ini ada yang menjadi tenaga inti dan menjadi tenaga musiman. Tenaga musiman ini menjadi tenaga tebang di kebun yang dikerahkan pada saat panen raya tebu yang memang membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan juga diistilahkan menjadi tenaga kampanye.¹⁸ Saat musim panen raya ini juga dikerahkan tenaga perempuan yang ikut melakukan panen raya seperti yang dikemukakan oleh Ibu Hartatik yang menjadi koordinator untuk kurang lebih 100 orang tenaga perempuan yang berasal dari daerah sekitar lokasi transmigrasi. Para pekerja perempuan ini mulai berangkat kerja pukul 5 pagi dan pulang menjelang maghrib. Lama waktu bekerja ini termasuk untuk menunggu mobil jemputan yang disediakan oleh pabrik. Saat itu kondisi jalan di sekitar Alueleuhop dan Bukit Hagu sudah lumayan dapat dilalui kendaraan roda empat karena sudah dibuka jalannya oleh Pertamina. ¹⁹Sebagai tenaga tebang tebu yang sekaligus membawahi pekerja perempuan, Ibu Hartatik mendapat upah sebesar Rp 1.700 untuk bekerja selama dua minggu. Selain mendapat upah Ibu Hartatik juga mendapatkan

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Suharno, Cot Girek, tanggal 4 Nopember 2013

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Suharno, Cot Girek, tanggal 4 Nopember 2013

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Hartatik pada tanggal 5 Nopember 2013

fasilitas kesehatan dengan mendapatkan pengobatan secara gratis di balai pengobatan yang disediakan oleh pabrik. Namun fasilitas ini hanya berlaku untuk Ibu Hartatik, sedangkan anak buahnya sebagai tenaga tebang tidak mendapatkan pengobatan gratis, sehingga apabila ada yang sakit dengan sukarela Ibu Hartatik membantu untuk biaya pengobatan.²⁰

Selain Ibu Hartatik yang bekerja sebagai koordinator pekerja perempuan untuk tenaga tebang, suaminya yang bernama Bapak Sunarto (almarhum) saat itu menjabat sebagai mandor tebu di kebun atau pengawas. Tugasnya mengawasi tenaga tebang tebu pada saat proses panen dan saat menanam tebu. Oleh karena saat itu harus ada pemilahan berbagai jenis tebu di antaranya ada jenis tebu yang bernama tebu manggis.

"PG Tjot Girek" pernah dikunjungi Presiden Soeharto pada Mei 1970. Saat itu masyarakat Aceh sangat bangga dengan hadirnya pabrik tersebut. Banyak mimpi-mimpi indah yang terhembus di Aceh jika pabrik ini nantinya mampu mandiri dan akan dapat menopang perekonomian Aceh khususnya Aceh Utara. Oleh karenanya tidak heran, saat presiden akan berkunjung ada dua kelompok yang paling sibuk menghadapi kunjungan Presiden. Yang pertama adalah anak-anak sekolah, khususnya anak murid SD se Kecamatan Syamtalira Arun (saat itu sekecamatan dengan Cot Girek)

²⁰ Wawancara dengan Ibu Hartatik pada tanggal 5 Nopember 2013

Penampungan Air : 258 HA, Jalan, Rail Ban, Saluran Air : 125 Ha, Areal Berbukit tidak dapat dipergunakan untuk tanaman tebu : 4.240 Ha, dan Luas Areal Yang Dapat Dipakai Untuk Tanaman Tebu : 2.500 Ha.

Pada saat pertama kali beroperasi tenaga kerja yang bekerja pada pabrik adalah 1.145 orang dengan rincian penggunaan (orang) : Pimpinan 2, Bagian TUK 26, Bagian Instalasi 378, Bagian Tanaman 122, Sub Bagian Teknik Sipil 131, Sub. Bagian Angkutan 123, Sub. Bagian Irigasi 14, Sub. Bagian Research, Sub. Bagian Mekanisasi 66, Bagian. Teknologi 65, Bagian Umum 129, Keamanan 40, Usaha Sampingan 147, Guru Negeri 9. Selama giling ditambah dengan tenaga musiman Tanaman : 600 orang dan Pabrik : 400 orang.

Tidak ada yang menyangka, usaha besar dengan latar belakang yang ideal dari satu sisi, serta kehati hatian dalam pengambilan keputusan ternyata tidak dapat berjalan sebagaimana diharapkan. *Feasibility study* yang dikerjakan oleh Tim CEKOP dari Polandia pada 1963 dan oleh *American Factors Associate* dari Amerika Serikat pada 1970 ternyata meleset.



Foto bekas bangunan Pabrik Gula Cot Girek dari sisi yang lain



Foto tempat pemrosesan gula yang masih tersisa dan menjadi besi tua dan berkarat.

Tidak ada data yang pasti untuk dapat mengetahui alasan kenapa “Pabrik Gula Tjot Girek” ditutup. Ada beberapa keterangan, tetapi sangat diragukan keabsahannya. Yang paling banyak disebutkan adalah tingginya beban pokok penjualan gula. Tingginya BPP ini disebutkan karena kurangnya subsidi yang diberikan pemerintah terlalu kecil, sehingga mengakibatkan unit cost gula yang diproduksi tidak ekonomis.

Menurut keterangan beberapa informan bahwa alasan penutupan pabrik gula ini sangat tersamar, di antaranya yang dikemukakan Bapak Suharno bahwa ada pengumuman bahwa sementara libur dulu, kalau ada aktivitas nanti akan dipanggil lagi. Namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada keterangan yang pasti dan satu persatu semua aktivitas di pabrik berhenti secara total. Hal itu diperkuat dengan keterangan Ibu Hartatik yang menyampaikan bahwa dia diberitahu oleh suaminya (Sunarto, alm.) bahwa pabrik sementara libur dahulu tapi tidak langsung diberitahu bahwa pabrik akan tutup, akan tetapi hanya disampaikan bahwa pengeluaran pabrik lebih besar dari pemasukannya.²¹ Sehingga lambat laun mereka merasa bahwa pabrik betul-betul tidak beroperasi lagi dan tidak pernah terdengar lagi mesin penggilingan tebu itu mengeluarkan suara sebagai tanda dimulainya musim giling seperti waktu sebelumnya.

Salah satu alasan di atas dianggap terlalu lemah ; karena terutama setelah tahun 1982 pupuk urea yang sangat

²¹ Wawancara dengan Ibu Hartatik, Bukit Hagu, 5 Nopember 2013.

dibutuhkan tersedia dengan mudah dan murah. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 1982 telah berdiri PT Pupuk Iskandar Muda di Lhok Seumawe yang hanya berjarak 35 Km dari Cot Girek.

Alasan lain adalah kondisi keamanan, hal ini juga dirasakan lemah karena posisi Kabupaten Aceh Utara dengan adanya PT PIM dan PT Arun LNG merupakan obyek vital dari segi keamanan, berdasarkan keterangan yang didapat area tersebut dijaga dengan ketat ; sebagai gambaran sepanjang jalan mulai dari kilometer I lintas Lhok Sukon menuju Cot Girek hingga Seureuke dijaga lebih dari 25 unit pos tentara. Sebagian pos berada di jalan line pipa, sebagai pasukan Pengamanan Proyek Vital Exxon Mobil.²²

Alasan selanjutnya yang sering dikemukakan adalah kekurangan tenaga kerja terutama untuk buruh tanam dan tebang. Hal ini juga terasa kurang tepat ; karena untuk kebutuhan tenaga kerja, dibantu pemerintah dengan pelaksanaan pola transmigrasi yang diarahkan berdekatan dengan lokasi perkebunan sebagai sumber tenaga kerja.

²² (<http://www.andreasharsono.net/2006/02/transmigran-jawa-dua-masa.html>).



Foto sisi dalam bekas bangunan utama Pabrik Gula Cot Girek.

Foto diambil 4 Nopember 2013

Kalau melihat capaian produksi rasanya perlu dicermati rendahnya produktifitas baik dari bahan baku tebunya maupun capaian *rendement akhir*. Hasil penelitian berdasarkan capaian tanaman percobaan disimpulkan bahwa perusahaan wajib menjaga mutu bibit dengan menambah varietas dengan bibit yang diimpor. Sedangkan berdasarkan kajian American Factors Associate disimpulkan bahwa "*Proyek Cot Girek merupakan proyek yang sehat dan can be made economically feasible under the assumptions and the work program recommended*". Artinya ancaman terhadap keberadaan perusahaan telah dideteksi secara dini melalui kajian yang dibuat oleh pakar dari Polandia dan pakar dari Amerika Serikat.

"Pabrik Gula Tjot Girek" akhirnya berhenti beroperasi pada 1985, setelah beberapa tahun terakhirnya dalam kondisi yang tidak sehat. Tanaman tebu dikonversi ke tanaman sawit dan sebagai unit pengolahannya didirikan sebuah Pabrik Kelapa Sawit. Konversi tanaman kelapa sawit di Kebun Cot Girek dibiayai secara bersama oleh PTP II, PTP III dan PTP VII dengan membentuk PT. Cot Girek Baru (Persero) sedangkan untuk pembangunan PKS dibiayai oleh PTP IX sehingga namanya menjadi PKS Cot Girek PT. Perkebunan IX (Persero).

2.3.. Migrasi Orang Jawa ke Daerah Aceh

Kerjasama dan perpindahan penduduk secara tradisional sebelum kerajaan Sriwijaya dan Majapahit tidak banyak sumber yang didapatkan. Namun pada tahun 1511, Portugis berkuasa di Malaka. Kerajaan Demak yang dipimpin Raden Patah mengirimkan pasukannya untuk mengusir Portugis. Pasukan Demak itu dipimpin oleh Pati Unus. Ia dibantu oleh armada dari Aceh. Usaha mengusir Portugis di Malaka ini gagal karena kalah persenjataan dan kekuatan pasukan. Kekalahan ini menguras banyak persediaan, kapal banyak yang mengalami kerusakan serta banyaknya pasukan yang terluka. Aceh menjadi tempat persinggahan untuk memulihkan kekuatan dan banyak dari pasukan Demak tidak kembali ke Jawa dan mendirikan perkampungan seperti Gampong Jawa di Banda Aceh dan lainnya terutama di pesisir utara dan tengah Aceh seperti Aceh Besar, Bireuen, Bener Meriah, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Aceh Utara, Langsa,

Aceh Timur, dan Aceh Tamiang. Hal ini dibuktikan banyak kampung Jawa sudah berdiri sebelum adanya program transmigrasi tahun 1964.

Berawal dari penaklukan Sultan Iskandar Muda terhadap Deli pada sekitar tahun 1612 M, bahwa juga diceritakan Sultan Iskandar Muda mendirikan kampung Gunung Klarus, Sampali, Kota Bangun, Pulau Brayan, Percut, Sigara-gara, Kota Rengas dan Kota Jawa yang ikut membuka kran perpindahan penduduk dari tanah Deli ke Aceh. Aceh sebagai daerah terakhir yang bisa ditaklukan penjajah yang diduduki secara *de jure* sejak Sultan Muhammad Dawud menyerahkan diri kepada Belanda tahun 1903, dan akhirnya Kesultanan Aceh runtuh tahun 1904, menjadi tempat pelarian yang aman oleh banyak pekerja paksa dari Deli yang sudah diduduki Belanda terlebih dulu.

Pasca runtuhnya Kesultanan Aceh tahun 1904, Belanda mulai mendirikan perkebunan seperti perkebunan kopi, tebu dan teh di Aceh yang banyak mendatangkan pekerja dari Jawa dan kebanyakan dari keturunannya masih menetap sampai sekarang dan dilanjutkan kemudian oleh penjajahan Jepang yang juga mendatangkan pekerja dari Jawa.

Jawa menjadi sumber buruh yang sangat potensial di Hindia Belanda karena pulau ini mengalami kelebihan penduduk sejak 1880-an. Penduduk Jawa tumbuh dari 9,3 juta pada tahun 1850 menjadi 28 juta pada tahun 1900, dan melonjak drastis menjadi 60,7 pada tahun 1930. Pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi setelah 1880 disebabkan oleh tingkat kematian yang lebih rendah dan tingkat kelahiran

yang agak lebih rendah. Tingkat kematian yang lebih rendah disebabkan oleh sejumlah perkembangan struktural jangka panjang (vaksinasi, komunikasi yang lebih baik, "deurbanisasi"²³.

Banyaknya buruh asal Jawa yang bekerja ke luar Jawa sangat berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi di Jawa itu sendiri sebagai dampak negatif dari Sistem Tanam Paksa. Sistem Tanam Paksa (1830-1870) yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda telah menyebabkan semakin menyempitnya tanah pertanian di Jawa, dan telah menyebabkan terjadinya kemiskinan sebagian besar masyarakatnya. Untuk mengatasi himpitan hidup ini, banyak penduduk melakukan migrasi ke Sumatera dengan menandatangani kontrak menjadi buruh di perkebunan-perkebunan.²⁴

Daerah tempat asal buruh di Jawa adalah daerah-daerah di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat. Sebelum diberangkatkan, mereka didata pada pos-pos registrasi yang tersebar diseluruh Jawa. Setelah didata mereka diberangkatkan ke Luar Jawa melalui tiga pelabuhan embarkasi, yaitu Batavia, Semarang dan Surabaya.

²³ Peter Boomgaard. *Anak Jajahan Hindia Belanda; Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*, Terj. Koesalah Soebagyo dkk. (Jakarta: KITLV-Jakarta dan Djambatan, 2004), hlm. 341.

²⁴ Clifford Geertz. *Agriculture Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia*. (Berkeley: University of California Press, 1963), hlm 35.

Tabel 1
Jumlah buruh yang terdaftar pada pos-pos registrasi
(1 Juni 1909-1 Oktober 1910)

Pos Registrasi	Jumlah Kuli yang Terdaftar
Batavia	1.800 (1909), 5.508 (1910)
Surabaya	3.569
Kutoarjo	2.935
Semarang	2.654
Purworejo	2.462
Bandung	2.382
Surakarta	2.222
Malang	1.852
Pare	1.144
Karanganyar	1.072
Yogyakarta	1.036 (1910)
Madiun	982
Blitar	720
Jombang	653
Magelang	561

Sumber: Vincent J.H. Houbben, (1999), hlm. 42.

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa jumlah buruh yang terdaftar tahun 1909 dan 1910 paling banyak pada pos

registrasi Batavia dan Surabaya, dan yang paling sedikit pada pos registrasi di kota-kota lain di Jawa Timur. Meskipun jumlah buruh yang terdaftar pada pos-pos registrasi di kota-kota di Jawa Tengah tidak sebanyak di Batavia dan Surabaya, tetapi dari segi jumlah keseluruhan, jumlah buruh dari Jawa Tengah jauh lebih besar dari daerah lain di Pulau Jawa.

Tabel 2

Jumlah Buruh yang diberangkatkan melalui Tiga Embarkasi di Pulau Jawa (April 1916-April 1917)

Jenis Kelamin dan Keluarga	Pelabuhan-pelabuhan Embarkasi dan Jumlah Buruh yang Diberangkatkan			
	Batavia	Semarang	Surabaya	Jumlah
Pria	7.415	3.828	5.786	17.029
Wanita	4.021	2.702	6.032	12.755
Keluarga	347	655	158	1.160

Sumber: Vincent J.H. Houbben, (1999), hlm 42.

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa jumlah buruh yang berangkat secara individu lebih banyak dibandingkan dengan keluarga. Bila dilihat dari sudut jenis kelamin secara keseluruhan, buruh laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan buruh perempuan (17.029 orang berbanding 12.755 orang). Menariknya, pada pelabuhan embarkasi Surabaya, jumlah buruh perempuan malah lebih banyak dibandingkan dengan buruh laki-laki (6.032 orang berbanding 5.786 orang).

Oleh karena perkebunan di Aceh Timur merupakan perluasan perkebunan dari Sumatera Timur, maka sistem perekrutan dan peraturan buruh pada kedua wilayah ini tidak terpisahkan. Dalam proses perekrutan buruh, Pemerintah Hindia Belanda ikut berperan aktif. Mereka secara resmi mengirim utusan ke wilayah yang sangat miskin di Cina Selatan dan mendirikan pos-pos perekrutan kuli di pelabuhan-pelabuhan strategis di Jawa Tengah. Dukungan Pemerintah ini telah menjadi suatu kontroversi pada awal abad ke-20.

Pencarian dan pengapalan buruh kontrak untuk ke luar Jawa dan koloni asing merupakan suatu persoalan yang secara resmi diatur dengan Peraturan Kuli yang termuat dalam Lembaran Negara no.123 tahun 1909 dan tambahannya. Peraturan ini merupakan perbaruan Peraturan Kuli tahun 1880. penerapan peraturan ini merupakan usaha pemerintah yang mengarah pada langkah *Etis*, untuk melindungi buruh pribumi dari perlakuan yang tidak manusiawi pada perkebunan-perkebunan khususnya di luar Jawa. Meskipun demikian, keadaan tetap masih tidak berubah sama sekali. Buruh pribumi sama sekali tidak memahami hal tersebut; mereka datang dan pergi seperti ternak, tanpa menyadari untuk apa mereka pergi. Bagi mereka ada imbalan kontrak yang sementara ini telah ditujukan dengan menerima pakaian dan beberapa gulden sebagai mata uang, karenanya dan sering juga karena alasan khusus sehubungan dengan masa lalunya yang tidak baik mereka meninggalkan tanah kelahirannya. Dengan demikian penerapan secara jelas

aturan-aturan kontrak oleh Pemerintah tetap menjadi keinginan semu.²⁵

Pencarian buruh merupakan jenis kebrutalan, sebagian besar berlangsung kasar, dan caranya juga tidak sopan dengan tujuan utamanya adalah mencari uang. Para pencari buruh memandang orang Jawa sebagai barang dagangan seperti kopra. Para pemilik modal memberi uang muka pada pencari buruh ratusan sampai ribuan gulden untuk berkeliling selama setahun. Apabila berhasil mendapatkan buruh seperti yang diinginkan, mereka kembali menerima kembali uang muka yang lebih besar. Oleh karena buruh yang tidak baik banyak, para pencari menuntut harga yang semakin lama semakin tinggi. Jika sebelum abad ke-20, harga seorang buruh antara *f* 20- *f* 25 (*f*, singkatan dari *florin* atau *Gulden*), awal abad ini harganya bisa naik menjadi *f* 65. bagi seorang pencari buruh yang gesit bisa memperoleh pendapatan *f* 1.000- *f* 1.500 per bulan. Sebaliknya, buruh Jawa hanya menerima *f* 5 dan ditambah satu baju dan celana. Mereka tidak menerima uang muka atas upah yang diberikan untuk diserahkan kepada orang tua atau keluarganya.

Di Batavia yang penduduknya relatif jarang banyak pencari buruh yang harus berkeliaran untuk mendapatkan buruh. Di Jawa Tengah, Yogyakarta, Purworejo dan Kutoarjo, daerah-daerah yang penduduknya sangat padat sebaliknya, pencarian sangat mudah dilakukan. Oleh karena pencarian berkembang, barak-barak buruh semakin penuh terisi. Pada

²⁵R.A. Ezerman, "Een en Ander Omtrent de Koeliwerving", IG no.II, 1912.hlm. 1261-1262

barak-barak di kota-kota besar, calon buruh dihibur dengan wayang, perjudian, adu ayam, dan lain-lain hiburan, supaya para mereka bersedia tinggal dan tidak melarikan diri.

Untuk mendapatkan tenaga buruh dalam jumlah banyak, berbagai metode perekrutan dilakukan. Selain diperoleh dengan cara penyaringan atau pengwerekkan, banyak calon buruh didapat dengan cara penipuan. Mereka ada yang diajak untuk pergi menonton hiburan, tetapi ternyata dimasukkan ke kapal, dan ada juga yang dijanjikan kerja di Johor, ternyata dibawa ke Sumatera.²⁶ Dengan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa migrasi penduduk dari Jawa ke Sumatera sudah lama dimulai dan sampai saat ini mereka dapat hidup lebih baik dari segi sosial maupun ekonominya.

Pasca kemerdekaan program transmigrasi di Aceh pada 1964 dimulai dengan menempatkan 100 KK warga transmigran di Blang Peutek, Padang Tiji, Kabupaten Pidie. Namun, warga transmigran di kawasan kaki Gunung Seulawah Inong itu tidak bertahan lama. Ini disebabkan, karena setahun kemudian, 1965, terjadi tragedi nasional dengan meletusnya peristiwa G-30-S/PKI di Indonesia. Program transmigrasi di Pidie itu pun bubar. Lalu, sejumlah warga transmigran di situ meninggalkan UPT Blang Peutek, dan mereka pun eksodus dan mencari penghidupan baru di

²⁶ Lukitaningsih, "Buruh Perempuan di Perkebunan Karet Sumatera Timur 1900-1940". *Tesis S-2*, UGM.2003, hlm.6

Saree, Aceh Besar. Sebagian di antaranya bahkan bekerja di PT Socfindo di Aceh Barat. Dan, sebagian lagi berpindah ke Sigli.

Transmigrasi di Aceh, setelah Blang Peutek, tidak lantas berhenti. Pada 1973 pembukaan kawasan baru pun dirintis di Aceh Utara. Lalu, pada tahun 1975/1976 program transmigrasi kembali hadir di Aceh dengan ditempatkan 300 KK warga transmigran di Cot Girek yang hampir bersamaan bilangan tahunnya dengan penempatan petani tebu di Silih Nara dan karyawan Pabrik Gula Mini (PGM) Silih Nara yang didatangkan pekerja dari Pulau Jawa.

Hal di atas semakin menguatkan bahwa salah satu strategi dalam memperkuat penyediaan tenaga kerja khususnya tenaga kerja pabrik gula adalah dengan pola transmigrasi. Hal itu didukung oleh fakta lapangan saat ini, bahwa mantan para pekerja pabrik gula tersebut sebagian besar adalah para transmigran yang bermukim di daerah transmigrasi diantaranya Bukit Hagu dan Alueleuhop yang terletak tidak terlalu jauh dari pabrik gula Cot Girek.

Ketransmigrasian di Aceh telah memacu lahirnya sentra- sentra produksi dan sentra ekonomi baru. Ini adalah dampak positif akibat keterpaduan pembangunan multisektor di sebuah daerah. Lahirnya kawasan ekonomi Patek (Aceh Jaya), Jantho (Aceh Besar), Jagong Jeget (Aceh Tengah), Trumon (Aceh Selatan), Peunaron (Aceh Timur), Subulussalam, dan lainnya.

**Sejarah Pendidikan di Aceh Utara:
dalam “Perang dan Damai”**

Nasruddin AS

1. Sekilas Pendidikan di Aceh

Sejak berdirinya lembaga pendidikan di Aceh terdapat 3 (tiga) nama, yaitu *dayah*, madrasah dan sekolah. Sekalipun urutan namanya masih belum seragam di antara ahli pendidikan. M. Hasbi Amiruddin menuliskan: sekolah, madrasah dan *dayah*¹. Sementara Yusni Saby menyebutkan *dayah* yang asal katanya dari *zawiyah*, madrasah yang awalnya *meunasah*² dan sekolah. Namun Yusni Saby menambahkan sebuah nama lagi yang dikhususkan untuk perempuan yaitu *Rumoh Tengku* atau *rumoh Beut*, yaitu rumah pribadi seseorang atau sekeluarga yang dianggap mempunyai ilmu agama yang berada di suatu *gampong* dan bersedia menerima anak-anak remaja untuk belajar mengaji, khususnya perempuan³. Ketiga lembaga pendidikan tadi sampai

¹ M. Hasbi Amiruddin, Jami'atu Al-Diniyah : Pemrakarsa Lahir Madrasah di Aceh, " Dalam Jurnal Sosial dan Keagamaan, Vol. 6, 2011, P3KI IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 29.

² Yusny Saby, Strategi Pembinaan Dayah untuk Masa Depan Aceh, Sda, hlm. 17.

³ *Ibid.*

sekarang masih eksis dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Kehadiran pendidikan di Aceh sama tuanya dengan kehadiran agama Islam di daerah ini, sebab antara pendidikan yang khususnya pendidikan Islam dengan proses islamisasi merupakan satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, tetapi kapan Islam mulai berada di Aceh masih silang pendapat di antara para ahli, namun mayoritas menyebutkan pada abad Pertama Hijriyah atau 7 Masehi.⁴

Strategi penyampaian pendidikan pada waktu itu dilakukan dengan sistem dakwah dan dakwah yang paling digemari oleh masyarakat adalah hikayat. Hikayat merupakan media pendidikan yang penting di samping media lainnya, melalui hikayat dimasukkan unsur-unsur ajaran Islam yang digambarkan sebagai bibit unggul bila dibandingkan dengan dasar-dasar kepercayaan Hindu/Budha. Dalam waktu yang relative singkat terbentuk pula keluarga-keluarga Islam terutama di *gampong-gampong* sekitar kota pelabuhan. Orang-orang tua yang telah menganut agama Islam sangat peka terhadap pendidikan keluarganya, mereka mengajarkan ilmu tauhid, ibadah dan muamalah kepada anaknya di rumah masing-masing. Semakin hari semakin bertambah jumlah penganut Islam dan bertambah pula rumah-rumah pendidikan, maka sejak itu muncul pengajian-pengajian di

⁴ Zakaria Ahmad (Konsultan), Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Departemen P&K, Pusat Penelitian Sejarah Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dukumentasi Kebudayaan Daerah, Tahun 1980/1981, hlm. 19.

rumah-rumah yang dianggap alim oleh penduduk setempat, sehingga dapat disebutkan *rumoh* (rumah) merupakan lembaga pendidikan formal pertama di Aceh.⁵

Semenjak itu pendidikan Islam terus dimulai dan berkembang sehingga pada abad ke 3 Hijriah atau abad 10 Masehi pendidikan di Aceh sudah lengkap dari tingkat rendah sampai ke perguruan tinggi seperti *Dayah* Cot Kala yang bertempat di Cot Kala Aceh Timur sekarang. M. Hasbi Amiruddin yang mengutip tulisan Ismuha menyebutkan, "... baru pada akhir abad ke 3 H atau awal abad ke 10 M didirikan pusat pendidikan agama yang lengkap mulai dari pendidikan rendah, menengah dan pendidikan tinggi, bertempat di Cot Kala Aceh Timur, kira-kira wilayah Bayeun sekarang."⁶

Dayah Cot kala ini merupakan pusat pendidikan tinggi yang pertama di Aceh, *dayah* inilah yang mempunyai jasa besar dalam pengembangan Islam di Nusantara. Dari alumni-alumni *dayah* ini kemudian mendirikan *dayah-dayah* lain baik di sekitar Aceh Timur sekarang maupun kerajaan Islam lain, seperti Kerajaan Samudra Pase, Kerajaan Islam Benua, Kerajaan Indra Jaya dan kerajaan Aceh Darussalam.

Pada abad XIV Kerajaan Pasei menurut Ibnu Batutah merupakan pusat studi Islam di Asia Tenggara dan di sini banyak berkumpul ulama-ulama dari negeri Islam dan juga disebutkan bahwa sultan Malikul Zahir (1297 -1326) adalah orang yang cinta kepada ulama dan ilmu pengetahuan, beliau

⁵*Ibid.*

⁶ M. Hasbi, 2011. *Op.cit.*

setiap selesai shalat selalu mengadakan diskusi dengan para ahli ilmu pengetahuan agama.⁷

Selain di dua kerajaan yang telah disebutkan tadi, pada abad ke XVI yaitu masa kerajaan Aceh Darussalam juga telah berkembang ilmu pengetahuan yang begitu pesat. Perkembangan ini ditandai dengan kehadiran sejumlah ahli ilmu pengetahuan dengan disiplin ilmunya masing-masing dan mendirikan sejumlah lembaga pendidikan di seluruh wilayah kerajaan. Di samping itu juga membina lembaga pendidikan yang telah ada baik yang ada di pusat kerajaan maupun di luarnya. Salah satu lembaga pendidikan yang sangat populer pada waktu itu adalah Jami'ah Baitur-Rahman. Jamia'ah ini dapat disamakan dengan sebuah Universitas sekarang ini, karena mempunyai beberapa Fakultas dan konsentrasi ilmu.

Adapun nama-nama Fakultas ataupun lembaga sebagai berikut:

1. Ilmu Tafsir Hadis
2. Ilmu Hukum
3. Ilmu Teologi
4. Ilmu Nahwu/Bahasa Arab
5. Ilmu Penbandingan Mazhab
6. Ilmu Filsafat
7. Ilmu Logika
8. Ilmu Falak
9. Ilmu Sejarah

⁷ Zakaria Ahmad. *Op.cit.* Hlm. 25.

10. Ilmu Peperangan
11. Ilmu Thabib/Kesehatan
12. Ilmu Kimia
13. Ilmu Politik
14. Ilmu Pemerintahan
15. Ilmu Keuangan Negara
16. Ilmu Pertanian
17. Ilmu Pertambangan⁸

Sampai dengan abad XVII lembaga pendidikan masih bersinar di Kerajaan Aceh Darussalam, namun setelah kerajaan ini mengalami kemunduran terutama saat dipimpin oleh raja dan ratu yang lemah kondisi pendidikan sudah mulai agak memudar, tetapi tidak mati ataupun lenyap. Dapat juga disampaikan di sini bahwa model lembaga pendidikan sampai dengan pertengahan abad ke XIX masih menggunakan istilah *Dayah*, *Meunasah*, Mesjid dan *Ranggang*.

2. Riwayat Pendidikan di Aceh Utara

2.1. Masa Awal Islam

Pengkajian riwayat pendidikan di Aceh Utara pada masa awal Islam tidak terlepas pembahasannya dengan masa kerajaan Samudra Pasei, karena wilayah Samudra Pasei saat ini berada dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Utara. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya kehadiran pendidikan di Aceh Utara sama tuanya dengan kehadiran Islam di sana, artinya pada saat Islam masuk ke Samudra

⁸ *Ibid.* Hlm. 27.

Pasei sudah disertai dengan pengajaran, bimbingan kepada masyarakat melalui para guru, *da'i* dan *muballiq*, minimal ditingkat keluarga.

Pendidikan Islam di Samudra Pasei lebih cepat berkembang bila dibandingkan dengan kerajaan lainnya, seperti kerajaan Daya, Lamuri dan Pedir. Pada abad XIV kerajaan ini telah hadir guru-guru terkemuka dari luar untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada warga. Tome Pires mengatakan bahwa di Samudra Pasei banyak terdapat kota-kota besar di mana di antara warga kota itu terdapat pula orang-orang yang berpendidikan.⁹

Di antara Ulama dan cendekiawan yang telah hadir ke Samudra Pasei pada waktu itu adalah:

- a. Amir Abdullah dari Delhi
- b. Sidhi Amir Said dari Shiraz
- c. Tajuddin dari Isfahan
- d. Tengku Cot Mamplam dari Pasei
- e. Tengku Cot Geuredong dari Pasei.¹⁰

Kejayaan dan kemajuan pendidikan di Samudra Pasei hanya bertahan pada saat keberadaan kerajaan itu sendiri, ketika tidak lagi berkuasa atau telah dianeksasi oleh Kerajaan Aceh kondisi pendidikan di daerah ini telah memudar, karena sebagian dari *muballiq* dan cendekiawan pindah pula ke pusat kerajaan Aceh Darussalam. Walaupun demikian lembaga-lembaga pendidikan yang masih tersisa tetap hidup

⁹ *Ibid.* Hlm. 25.

¹⁰ *Ibid.*

dan dibina oleh Kerajaan Aceh Darussalam hingga kehadiran kolonial di Aceh.

2.2. Masa Kolonial Belanda Sampai dengan Kemerdekaan

Pembahasan tentang pendidikan pada masa kolonial hanya disinggung secara singkat dan khusus pada masa Belanda dan Jepang, sementara penjajah Spanyol tidak membawa pengaruh terhadap pendidikan di Aceh karena Spanyol hanya sebentar singgah di Aceh dan misinya hanya persoalan perdagangan. Belanda sudah hadir di bumi Aceh pada tahun 1873 tetapi pelaksanaan pendidikan secara meluas baru dapat dimulai pada awal tahun 1920-an, karena masa-masa sebelumnya kondisi Aceh belum begitu aman untuk orang Belanda sekalipun sultan terakhir telah berdamai, masih saja terjadi peperangan dan kekacauan antara orang Aceh dengan Belanda baik secara kelompok maupun perorangan.

Pada awal pendirian sekolah Belanda yang menjadi murid hanyalah anak dari orang-orang bangsawan atau Uleebalang, tetapi pada saat Belanda sudah membutuhkan tenaga-tenaga pribumi untuk dipekerjakan baik di kantor maupun di lapangan, maka mau tidak mau anak-anak pribumi biasapun mendapat kesempatan untuk bersekolah. Belanda punya tujuan menyekolahkan anak-anak pribumi, antara lain untuk mendapatkan pegawai-pegawai yang terampil menurut ukuran mereka. Pegawai-pegawai yang berasal dari kalangan pribumi ini diusahakan agar dapat

dijadikan sebagai petugas yang efektif dalam melancarkan sistem ekonomi dan struktur birokrasi mereka.¹¹

Setelah anak-anak pribumi yang disekolahkan oleh Belanda menjadi pintar tidak semuanya memihak dan bekerja kepada Belanda tetapi mereka muncul sebagai tokoh dan cendekiawan yang membela kaumnya sendiri dan bahkan ada di antara mereka sebagai tokoh pembangkit kesadaran nasional dan perjuangan untuk kemerdekaan khususnya di Aceh. Mulai saat itulah mereka mendirikan lembaga pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pada tahun 1927 sebuah lembaga pengajian di dirikan di Lhok Seumawe Aceh Utara sekarang dengan nama *Jamia'ah al-Islam wal Irsyad al-Arabia* yang dipimpin oleh seorang Arab yang bernama Syekh Muhammad Ibnu Salim al-Kalaly. Kemudian dibuka pula sebuah Madrasah cabang dari *al-Irsyad* Surabaya yang dipimpin oleh Tgk, Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy yang sebelumnya telah menamatkan pendidikannya di Madrasah *al-Irsyad* tingkat 'Aliyah di Surabaya.¹²

Pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1348 H bertepatan dengan 14 November 1929, ada juga yang menyebutkan 14 November 1929¹³ di Matang Geulumpang Dua Aceh Utara berdiri sebuah Organisasi yang diberi nama Al-Muslim.

¹¹*Ibid.* hlm. 57.

¹² *Ibid.* hlm. 98.

¹³ Agus Irwanto, Sejarah Lahirnya Al-Muslim Peusangan : <http://www.acehbaru.com/sejarahlahirnya-almuslim-peusangan/>

Organisasi ini dilengkapi dengan sejumlah pengurus sebagai berikut:

N0	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Tgk. Abd. Rahman Meunasah Meucap	Ketua	Ulama
2	Tgk. H.M.Amin Bugak	Wakil Ketua	Qadhi Negeri Peusangan
3	Tengku Nurdin	Sekretaris	Guru Vervolschool
4	Guru Husen Samalanga	Bendahara	Kepala Vervolschool
5	T.Haji Muhammad Ali	Komisaris	Tokoh Masyarakat
6	Tgk.Abdul Razak Jangka	Komisaris	Tokoh Masyarakat
7	Tgk.Syeikh Hamzah	Komisaris	Tgk. Syeikh Peusangan ¹⁴

Tujuan organisasi ini adalah untuk mendirikan sebanyak mungkin Madrasah dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan agama di kenegerian Peusangan khususnya dan Aceh Utara umumnya. Realisasi dari program ini tanggal 13 April 1930 diresmikan Madrasah Al-Muslim Peusangan dengan kepala Madrasah pertama adalah Habib Mahmud

¹⁴ *Ibid.*

serta Tgk. H.M. Ridwan ditunjuk sebagai guru bantu. Madrasah baru ini mendapat sambutan dari masyarakat sehingga banyak yang mendaftar anaknya untuk menjadi murid, guna menampung murid-murid yang telah mendaftar dibuka dua kelas paralel untuk tahun pertama.¹⁵ Bangunan sekolah dibuat darurat yang bahan-bahannya diambil kayu-kayu bekas yang dipergunakan pada acara perayaan perkawinan anak dari Ampon Chik Peusangan. Lokasinya tetap dekat mesjid Matangglumpang Dua (yaitu di tempat berdirinya SMP Negeri sekarang). Untuk pertama kali dibangun dua lokal dan brosur pun disebar ke seluruh Aceh Utara. Setelah beridirinya Madrasah al-Muslim ini tahun berikutnya berdiri pula beberapa madrasah di Cot Meurak Bireun, Cot Batee, Balee Seutai, Jangka, Bugak, Krueng Baro, Uteun Gathom dan Lueng Leubu.¹⁶

Pada awal pendiriannya madrasah Al-Muslim belum memiliki gedung dan kurikulum untuk diterapkan dalam pembelajarannya, karena itu pengurus mengirim 2 orang peninjau ke Sumatera Thawalib Padang Panjang (Sumatera Barat) sekarang, karena Sumatera Thawalib merupakan sekolah Islam modern pertama di Indonesia¹⁷ yang sudah memiliki gedung dan kurikulum pendidikan modern. Orang yang diutus tersebut adalah Tgk. Abdul Rahman Meunasah Meucap, Tgk. Umar Gampong Raya dan Ustaz Mustafa Salim

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Thawalib

Pimpinan Madrasah Islamiyah Bireun sebagai petunjuk jalan, karena beliau adalah berasal dari Sumatera Barat.¹⁸

Utusan yang dikirim tidak sia-sia, mereka membawa pulang sesuatu yang sangat berharga bagi kemajuan pendidikan Madrasah Al Muslim, secara beransur mulai diterapkan kurikulum modern dengan memasukkan mata pelajaran umum, seperti ilmu bumi, ilmu kesehatan, ilmu olahraga dan lain-lain ke kurikulum madrasah. Disamping juga ilmu-ilmu agama yang menjadi andalan madrasah tersebut, meskipun semua mata pelajaran menggunakan bahasa arab sebagai bahasa pengantarnya. Bahkan ini menjadi positif bagi siswa karena dapat memperlancar bahasa arab mereka.

Dalam beberapa tahun saja madrasah Al Muslim mengalami kemajuan dan perkembangan sehingga banyak daerah yang ingin membuka cabang madrasah ini seperti di Aceh Besar (sekarang) ada Al Muslim Lam Sie, Teubang Phui, Hoho, Peudaya, Lamteuba dan lain-lain, di Pidie (sekarang) ada Madrasah Al Muslim Padang Tiji, Tanjong, Kunyet, Beurabo dan lain-lain. Aceh Barat (sekarang) Al Muslim Teunom dan Al Muslim Sinabang. Aceh Selatan; Al Muslim Susoh, Sawang, Terbangun, Lhok Bangkuang dan lain-lain.¹⁹ Di samping juga dalam wilayah Aceh Utara, seperti Bireun, Cot Meurak, Geurugok dan lain-lain.

¹⁸ Ahmad, Zakaria. *Op.cit.* Hlm.99

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 103-104.

Selain madrasah Al Muslim pada tahun yang hampir bersamaan tumbuh pula beberapa madrasah lainnya di berbagai daerah dengan nama yang berbeda-beda , seperti a. Madrasah *Saadah Adabiyah* di Blang Paseh Pidie yang dipimpin oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh dan sebagai staf pengajar H. Abdullah Ujong Rimba. b. *Jami'ah Diniyah Al Muntasyiah* (JADAM) di Montasik Aceh Besar yang dipimpin oleh Tgk. Ibrahim Lamnga. c. Madrasah Darul Huda di Bambi Pidie, d. Madrasah *Bustanul Ma'arif* di Blang Jruen Aceh Utara, e. Madrasah al Ikhlas di Keude Dua, f. Madrasah *Ishlah* di Samalanga dan g. Madrasah *Darul 'Ulum* di Geurugok juga di Aceh Utara.

Untuk lebih lengkapnya di bawah ini disampaikan jumlah Madrasah di seluruh Aceh yang sempat didata oleh peneliti sebelumnya yaitu pengurus Jami'ah Al-Islahiyah Sungai Limpah Sibreh Aceh Besar pada tahun 1936. Hampir semua Madrasah yang akan disebutkan itu merupakan perkembangan dari dua Madrasah awal, yaitu : Madrasah *Al-Muslim* Peusangan dan Madrasah *Saadah Adabiyah* di Blang Paseh Pidie. Adapun nama-nama madrasah tersebut adalah sebagai berikut:

**Daftar Nama-Nama Madrasah Setelah Terbentuknya
Madrasah Al-Muslim Dan Madrasah Saadah Adabiyah**

NO	NAMA MADRASAH	LOKASI	K T R
1	Madrasah Islahiyah	Leubuk (Aceh Besar)	
2	Madrasah Diniyah	Bung Cala (Aceh Besar)	
3	Madrasah Diniyah	Mieruk (Aceh Besar)	

4	Madrasah Diniyah	Ulee Kareng (Aceh Besar)	
5	Madrasah Darussalam	Merduati (Kutaraja)	
6	Madrasah Taman Perguruan	Neusu (Kutaraja)	
7	Madrasah Taman Perguruan	Pungee (Kutaraja)	
8	Madrasah Diniyah	Lampeuneurut (Aceh Besar)	
9	Madrasah Diniyah	Lam Teungoh (Aceh Besar)	
10	Madrasah Diniyah	Lam Lhom (Aceh Besar)	
11	Madrasah Diniyah	Kulu (Aceh Besar)	
12	Madrasah Diniyah	Blang Me (Aceh Besar)	
13	Madrasah Jadam	Montasik (Aceh Besar)	
14	Madrasah Islahiyah	Sungai Limpah (Aceh Besar)	
15	Madrasah Hasbiyah	Indrapuri (Aceh Besar)	
16	Madrasah Tadrijiyah	Lam Jampok (Aceh Besar)	
17	Madrasah Al-Muslimin	Lam Sie (Aceh Besar)	
18	Madrasah Perguruan Islam	Keunalau Seulimum (Aceh Besar)	
19	Madrasah Al-Muslimin	Lam Tamot (Aceh Besar)	
20	Madrasah Hasbiyah	Heu (Aceh Besar)	
21	Madrasah Islahiyah	Kreung Raya (Aceh Besar)	

22	Madrasah Falahiyah	Pieuyeung (Aceh Besar)	
23	Madrasah Al-Muslimin	Tibang Phui (Aceh Besar)	
24	Madrasah Al-Muslimin	Hoho (Aceh BEsar)	
25	Madrasah Al-Muslimin	Cot Sal Oran (Aceh Besar)	
26	Madrasah Ishlahiyah	Lam Birah (Aceh Besar)	
27	Madrasah Al Muslimin	Jeureula (Aceh Besar)	
28	Madrasah Seupakat	Bukloh (Aceh Besar)	
29	Madrasah Ishlahiyah	Meunasah Keurade (Aceh Besar)	
30	Madrasah Al-Muslimin	Lam Panah (Aceh Besar)	
31	Madrasah Al-Muslimin	Lam Teuba (Aceh Besar)	
32	Madrasah Al-Muslimin	Padang Tiji (Pidie)	
33	Madrasah Al-Muslim	Peudaya (Aceh BEsar)	
34	Madrasah Al-Muslim	Kunyet (Pidie)	
35	Madrasah Al-Muslim	Tanjong(Pidie)	
36	Madrasah Al-Muslim	Beurabo (Pidie)	
37	Madrasah Al-Muslim	Neucah (Pidie)	
38	Madrasah Al-Muslim	Gogo (Pidie)	
39	Madrasah Al-Ummahat	Montasik (Aceh Besar)	
40	Madrasah Diniyah	Blang Paseh Sigli (Pidie)	
41	Madrasah Darul Huda	Bambi (Pidie)	
42	Madrasah Khairiyah	Blang Anoe (Pidie)	

43	Madrasah Darul Ma'rif	Garot (Pidie)	
44	Madrasah Persatuan Islam	Peukan Pidie (Pidie)	
45	Madrasah Diniyah	Teupin Raya (Pidie)	
46	Madrasah Persatuan Islam	Sangue (Pidie)	
47	Madrasah Wathaniyah	Ie Leubeu (Pidie)	
48	Madrasah Kahiriyah	Paru (Pidie)	
49	Madrasah Islam Sejati	Kota Bakti (Pidie)	
50	Madrasah Diniyah	Teubung (Pidie)	
51	Madrasah Diniyah	Tangse (Pidie)	
52	Madrasah Diniyah	Geupang (Pidie)	
53	Madrasah Diniyah	Kampung Pukat Meureudu (Pidie)	
54	Madrasah Perguruan Tajungan	Bireun (Aceh Utara)	
55	Madrasah Perguruan Kuta Blang	Aceh Utara	
56	Madrasah Mesjid Keude Samalanga	Aceh Utara	
57	Madrasah Al-Muslim	Cot Meurak (Aceh Utara)	
58	Madrasah Al-Muslim	Matang Glumpang Dua (Aceh Utara)	
59	Madrasah Diniyah	Geurugok (Aceh Utara)	
60	Madrasah Darul Ulum	Bale Seutui Peusangan (Aceh Utara)	
61	Madrasah Khairiyah	Takengon (Aceh Tengah)	
62	Madrasah Khairiyah	Teritet (Aceh Tengah)	

63	Madrasah Diniyah	Idi Rayeuk (Aceh Timur)	
64	Madrasah Diniyah	Blang Sekooi (Aceh Timur)	
65	Madrasah Diniyah	Madat (Aceh Timur)	
66	Madrasah Diniyah	Simpang Ulim (Aceh Timur)	
67	Madrasah Madaniyah	Idi (Aceh Timur)	
68	Madrasah Diniyah	Kampung Jawa Langsa (Aceh Timur)	
69	Madrasah Jadam	Calang (Aceh Barat)	
70	Madrasah Jadam	Lagueun (Aceh Barat)	
71	Madrasah Jadam	Krueng Sabe (Aceh Barat)	
72	Madrasah Islaniyah	Keutapang (Aceh Barat)	
73	Madrasah Khairiyah	Lhok Kreut (Aceh Barat)	
74	Madrasah Hadinah	Petek (Aceh Barat)	
75	Madrasah Diniyah	Lam No (Aceh Barat)	
76	Madrasah Al-Muslim	Teunom (Aceh Barat)	
77	Madrasah Washliyah	Meulaboh (aceh Barat)	
78	Madrasah Perguruan Muda	Lhok Dubon (Aceh Barat)	
79	Madrasah Diniyah	Jeuram (Aceh Barat)	
80	Madrasah Diniyah	Peureume (Aceh Barat)	

81	Madrasah Al-Muslim	Sinabang (Aceh Barat)	
82	Madrasah Diniyah	Alur Bilie (Aceh Barat)	
83	Madrasah Diniyah	Lama Inong (Aceh Selatan)	
84	Madrasah Diniyah	Kampung Rawa (Aceh Selatan)	
85	Madrasah Al-Muslum	Susoh (Aceh Selatan)	
87	Madrasah Perguruan Muda	Kuta Buloh (Aceh Selatan)	
88	Madrasah Tedris	Labuhan Haji (Aceh Selatan)	
89	Madrasah Al-Muslim	Sawang (Aceh Selatan)	
90	Madrasah Al-Muslim	Lhok Bangkuang (Aceh Selatan)	
91	Madrasah Diniyah	Tapak Tuan (Aceh Selatan)	
92	Madrasah Al-Muslim	Terbangan (Aceh Selatan) ²⁰	

Setelah menyebutkan 92 Madrasah, pengurus *Jami'ah Al Islahiyah* masih meragukan jumlah tersebut, mereka yakin masih ada sejumlah Madrasah yang belum terdata sehingga belum dimasukkan ke dalam daftar 92 di atas. Zakaria Ahmad menambahkan sejumlah Madrasah dari hasil penelitian timnya, yaitu:

²⁰ *Ibid.* Hlm. 102 -104.

NO	NAMA MADRASAH	LOKASI	K T R
1	Madrasah Al-Huda	Geudong Aceh Utara	
2	Madrasah Al-Ikhlash	Keude Dua Aceh Utara	
3	Madrasah Islamiyah	Meukek Aceh Selatan	
4	Madrasah Islamiyah	Manggeng Aceh Selatan	
5	Madrasah Khairatul Islamiyah	Tamiang Aceh Timur	
6	Jamiatul Khairiyah	Tamiang Aceh Timur	
7	Madrasah Akbaiyah	Ujong Kalak Aceh Barat	
8	Madrasah Al Wasliyah	Panggong Aceh Barat ²¹	

2.3. Pembaharuan Pendidikan

Ide pembaharuan pendidikan Islam awalnya datang Tuanku Raja Keumala, salah seorang keluarga keturunan Sultan Aceh. Dengan suratnya bertanggal 22 Oktober 1915, Tuanku Raja Keumala meminta kepada penguasa pemerintah Hindia Belanda di Aceh agar di Kuta Raja diizinkan untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan agama modern yang disebut dengan madrasah. Meskipun disertai dengan beberapa persyaratan, pemerintah Hindia Belanda mengabulkan permintaan tersebut. Satu tahun setelah permohonan yaitu pada tahun 1916 keinginan Tuanku Raja Keumala berhasil didirikan sebuah Madrasah yang diberi nama Madrasah *Khairiyah* yang berlokasi di Kuta Raja, tepatnya di bagian belakang Mesjid Raya Baiturrahman, dengan pimpinan yang pertama adalah Tgk. Syekh Muhammad Saman Siron seorang Ulama yang cerdas dan

²¹ *Ibid.* Hlm. 105.

lama belajar di Timur Tengah.²² Oleh karenanya dapat disebutkan bahwa Tuanku Raja Keumala adalah sebagai salah seorang tokoh reformasi pendidikan agama Islam di Aceh.

Selain Tuanku Raja Keumala putra-putra Aceh yang pernah sekolah di Timur Tengah di antaranya adalah Tgk. Syekh Abdul Hamid juga telah berpikir untuk melakukan perubahan sistem pendidikan di Aceh. Pembaharuan sistem pendidikan Islam di Aceh ada kaitannya dengan proses perkembangan Serikat Islam di negeri ini, Ismuha menulis:

Sekitar tahun 1920 Serikat Islam (SI) melebarkan sayapnya ke Aceh. Di antaranya pemimpin-pemimpin SI di Aceh adalah Tgk. Syekh Abdul Hamid Samalanga yang lebih dikenal dengan panggilan Ayah Hamid, Tgk. Bujang Krueng Geukuh dan Tgk. Chik Muhammad Said Cunda. Pada tahun 1926 Pemerintah Hindia Belanda melakukan penangkapan terhadap pemimpin SI di seluruh Indonesia. Di antara yang ditangkap di Aceh adalah Tgk. Bujang Krueng Geukuh dan Tgk. Chik Muhammad Said Cunda dan dibuang ke Digul Papua. Adapun Ayah Hamid dapat melarikan diri ke Jedah dan Mekkah. Di sana Ayah Hamid bergaul dengan tokoh-tokoh politik yang datang dari berbagai negeri, seperti dari Mesir, Iraq, Iran, Syria, Turki, Maroko, Aljazair, Tunisia, India dan entah apa lagi. Ayah Hamid ingin menyampaikan sesuatu ke Aceh hal-hal yang dianggap perlu, tetapi disadarinya bahwa hal tersebut akan membahayakan orang yang menerima berita itu, lalu dicarinya jalan keluar. Pertama ia

²² *Ibid.* Hlm. 96.

memilih orang-orang yang akan dikirim berita itu adalah orang yang tidak dicurigai oleh Pemerintah Hindia Belanda. Kedua; yang dikirim itu bukan surat, melainkan surat kabar yang berbahasa Arab seperti *Ummul Qura*. Dalam celah-celah surat kabar itulah Ayah Hamid menulis berita-berita yang ingin disampaikan kepada kawan-kawannya di Aceh, di antaranya kepada Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba. Adapun isi pesan itu ialah mengenai anjuran memperbaharui sistem pendidikan agama di Aceh. Menurut Ayah Hamid cara lama yang berlaku di dayah-dayah seluruh Aceh, di mana *tengku-tengku* didayah hanya pasif saja, hanya menunggu siapa yang mau datang saja yang diajarkan dan cara mengajar hanya dipakai cara *talqin*, maka dikuatirkan pada suatu saat nanti *dayah-dayah* akan kosong dan Aceh akan kehabisan para ulama dan akan kehilangan pendidikan agama. Oleh karena itu dianjurkan supaya para ulama memikirkan untuk mengubah cara belajar duduk *berhalaqah* mengelilingi guru, menjadi cara madrasah yang memakai bangku dan papan tulis sebagai alat pembantu.²³

Amanah Ayah Hamid ini mendapat sambutan yang baik dari rekan-rekannya di Aceh. Abdullah Ujong Rimba sebagai penerima amanah tersebut menyampaikan pula seorang Ulama yang sangat berpengaruh di Sigli yaitu Tgk. Muhammad Daud Beureueh. Hal ini mendapat sambutan yang baik bahkan Tgk. Muhammad Daud Beureueh menghubungi pula sejumlah ulama lainnya seperti Tgk. Abdurrahman Meunasah Meucap di Matang Geulumpang

²³ *Ibid.* Hlm. 117.

Dua yang mempunyai sebuah *Dayah* tradisional di sana, dan juga kepada ulama-ulama di sekitar Sigli yang mempunyai lembaga pendidikan tradisional. Dalam perkembangannya ide atau anjuran dari Tgk. Syekh Abdul Hamid Samalanga sedikit banyaknya telah mempengaruhi perubahan sistem pendidikan agama di Aceh khususnya di Madrasah *Al Muslim* Peusangan dan Madrasah *Saadah Abadiyah* di dekat Sigli.

Hadirnya lembaga-lembaga pendidikan agama yang modernis dalam bentuk madrasah-madrasah telah melahirkan suatu kelompok ulama yang modernis pula. Oleh karenanya telah membuka kesempatan kembali bagi para ulama untuk berperan aktif dalam masyarakat, baik sebagai pemimpin agama maupun sebagai pemimpin masyarakat, sehingga posisi tawar mereka dalam masyarakat menjadi kuat. Untuk mempertahankan kedudukan ini dan juga memperkuat integritas dan solidaritas antar ulama, maka pada tanggal 5 Mei 1939 mereka mendirikan suatu organisasi yang disebut dengan POESA (Persatuan Oelama Seluruh Aceh).

Organisasi Poesa selain bergerak dalam bidang sosial dan politik juga bergerak di bidang pendidikan. Wujud nyata dalam usaha pendidikan adalah dengan didirikannya sebuah sekolah *Normal Islam Institut* atau *Ma'had Al Mu'allimin* di Bireun Aceh Utara pada tanggal 27 Desember 1939 dengan tujuan untuk mempersiapkan tenaga guru bagi madrasah-madrasah yang ada di Aceh dan juga untuk mempersatukan sistem pengajaran agama pada madrasah-madrasah di Aceh. Sistem pengajarannya berpedoman pada silabus sekolah Normal Islam PGAI Padang Sumatra Barat dan lama masa

belajarnya 4 (empat) tahun. Adapun tenaga pengajar utama adalah Tgk. M. Nur El- Ibrahimy, alumni Al Azhar Kairo dan Mister Muhammad, alumni sekolah Tinggi Hukum di Jakarta.²⁴

Pendidikan modernis juga ditandai dengan hadirnya Perguruan Taman Siswa di Aceh yang pada umumnya dipelopori oleh *Uleebalang*. Taman Siswa berdiri di Indonesia pada 3 juli 1922, pendirinya adalah Raden Mas Soewardi Soeryaningrat atau yang biasa dikenal dengan Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta. Awal pendirian taman siswa diawali dengan ketidak puasan dengan pola pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, karena jarang sekali Negara Kolonial yang memberikan fasilitas pendidikan yang baik kepada Negara jajahannya. Sebab itu maka didirikanlah Taman Siswa, berdirinya Taman Siswa merupakan tantangan terhadap politik pengajaran kolonial dengan mendirikan pranata tandingan. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Bagi Taman Siswa, pendidikan bukanlah tujuan tetapi media untuk mencapai tujuan perjuangan, yaitu mewujudkan manusia Indonesia yang merdeka lahir dan batinnya. Merdeka lahiriah artinya tidak dijajah secara fisik, ekonomi, politik, dsb, sedangkan merdeka secara batiniah adalah mampu mengendalikan keadaan.²⁵

²⁴ *Ibid.* Hlm. 108.

²⁵ <http://leser-aceh.blogspot.com/2012/02/sejarah-taman-siswa.html>

Kehadiran Taman Siswa di Aceh pada bulan Juli 1932 lebih kurang 10 tahun setelah berdirinya di Yogyakarta. Sebelum perguruan ini didirikan telah dibentuk sebuah panitia yang komposisinya sebagai berikut:

Ketua Panitia	: T. Hasan Glumpang Payong
Wakil Ketua	: T. Nyak Arief
Sekretaris	: Pohan
Anggota	: 1. Aziz (Asal Minang kabau) 2. Paman Ras Martin (Asal Ambon) ²⁶

Setelah berdirinya perguruan Taman Siswa di Banda Aceh maka secara berturut-turut berdiri pula di Sabang pada tahun 1932 yang diprakarsai oleh dr. Latumeten (berasal dari Ambon yang dibantu oleh *Uleebalang* setempat yang bernama T. Abbas, di Meulaboh pada tahun 1934 yang dipelopori oleh *Uleebalang* setempat bernama T. Abdurrahman dan T. Muhammad Yusuf. Sekolahnya dipimpin oleh Usman Abdullah dan Suwarno yang berasal dari Pulau Jawa. Pada tahun yang sama dibuka pula Perguruan Taman Siswa di Jeunib Aceh Utara juga didukung oleh *Uleebalang* setempat yang bernama T. Ahmad.²⁷

Dalam proses belajar mengajar Perguruan Taman Siswa mendatangkan tenaga guru luar seperti dari Jawa dan Sumatera yang telah duluan maju dalam pendidikan. Kurikulum yang digunakan di Aceh masih menggunakan

²⁶ Zakaria Ahmad. *op.cit.*, hlm. 111

²⁷ *Ibid.*

kurikulum seperti Majelis Luhur di Yogyakarta. Tetapi untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat setempat mengambil kebijaksanaan sendiri yaitu menambah mata pelajaran agama di samping mata pelajaran umum yang telah ditentukan. Mata pelajaran agama diajarkan oleh guru-guru dari Madrasah yang ada Aceh, sebaliknya guru-guru dari Taman Siswa juga mengajar mata pelajaran umum di Madrasah, sehingga tercipta kerjasama yang baik antara Taman siswa dan Madrasah saling mengisi untuk mencerdaskan masyarakat Aceh dalam suasana penjajahan. Sumber dana untuk menghidupkan sekolah Taman Siswa berasal dari sumbangan masyarakat dan kekuatan sendiri tanpa mengharap bantuan dari Pemerintah Hindia Belanda.²⁸

Pendidikan Taman Siswa dilaksanakan berdasar Sistem *Among*, yaitu suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Dalam sistem ini setiap pendidik harus meluangkan waktu sebanyak 24 jam setiap harinya untuk memberikan pelayanan kepada anak didik sebagaimana orangtua yang memberikan pelayanan kepada anaknya.

Sistem *Among* tersebut berdasarkan cara berlakunya disebut Sistem *Tutwuri Handayani*. Dalam sistem ini orientasi pendidikan adalah pada anak didik, yang dalam terminologi baru disebut *student centered*. Di dalam sistem ini pelaksanaan pendidikan lebih didasarkan pada minat dan potensi apa yang perlu dikembangkan pada anak didik, bukan pada minat dan kemampuan apa yang dimiliki oleh pendidik. Apabila minat

²⁸ *Ibid.*, hlm. 113.

anak didik ternyata akan ke luar “rel” atau pengembangan potensi anak didik di jalan yang salah maka pendidik berhak untuk meluruskannya.

Untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Siswa menyelenggarakan kerja sama yang selaras antar tiga pusat pendidikan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat. Pusat pendidikan yang satu dengan yang lain hendaknya saling berkoordinasi dan saling mengisi kekurangan yang ada. Penerapan sistem pendidikan seperti ini yang dinamakan Sistem Trisentra Pendidikan atau Sistem Tripusat Pendidikan. Pendidikan Taman siswa berciri khas Pancadarma, yaitu Kodrat Alam (memperhatikan sunatullah), Kebudayaan (menerapkan teori Trikon), Kemerdekaan (memperhatikan potensi dan minat masing-masing individu dan kelompok), Kebangsaan (berorientasi pada keutuhan bangsa dengan berbagai ragam suku), dan Kemanusiaan (menjunjung harkat dan martabat setiap orang).²⁹

3. Masa Peperangan

Penjelasan pendidikan masa peperangan di Aceh Utara dibagi dalam dua bagian yaitu, pertama; masa peperangan dengan Belanda dan Jepang dan kedua masa konflik Aceh baik masa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) maupun masa Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

²⁹ Leser Aceh, *op.cit.*

3.1. Masa Belanda dan Jepang

Secara resmi Belanda hadir di Aceh adalah pada tahun 1873 dan sekaligus menyatakan perang terhadap kerajaan Aceh. Pada hal jauh-jauh hari sebelumnya orang-orang Belanda sudah pernah ada di bumi Iskandar Muda dalam misi dagang, di antaranya Nicolas de Graaff. Persahabatan yang sudah lama dibangun hilang sirna akibat keserakahan Belanda untuk menguasai Aceh yang kaya dengan hasil alam.

Para sejarawan Aceh menggambarkan hampir semua masyarakat pada waktu itu mengalihkan aktifitasnya untuk berperang melawan penjajah. Ulama-ulama Aceh termasuk yang berada di Aceh Utara sudah kurang memikirkan masalah pendidikan, baik tempat pengajian di rumah, *meunasah*, *rangkas* maupun di *dayah-dayah*. Mereka bahu membahu bersama warga lainnya turun ke medan perang untuk mengusir Belanda yang mereka anggap sebagai kafir, sehingga sejumlah lembaga pendidikan terbengkalai. Ismuha menulis sejak perang Aceh melawan Belanda hampir semua *dayah* mengalihkan aktifitasnya ke arah perjuangan fisik melawan Belanda. Selama dalam perang banyak ulama yang hilang karena syahid di medan perang.³⁰

Perang Belanda di Aceh begitu lama yaitu sejak 1873 sampai dengan 1904 atau selama 31 tahun dan ada pula sejarawan yang menyebutkan sampai dengan 1912 atau selama 39 tahun dan setelah tahun itu masih juga terjadi kontak senjata dengan Belanda baik secara kelompok maupun

³⁰ Ismuha, yang dikutip oleh M. Hasbi Amiruddin, hlm. 30.

secara individu. Maka sebagai akibat dari kejadian ini banyak gedung yang porak poranda termasuk lembaga pendidikan, masyarakat yang korban termasuk guru, muballi, para cendekia dan bahkan para murid banyak yang syahid. Sehingga pendidikan di Aceh Utara pada waktu itu menjadi merosot, pada hal sebelum datang Belanda pendidikan di sana jauh sudah maju.

Pada masa pendudukan Jepang pendidikan di Aceh Utara juga tidak mengalami peningkatan karena masyarakat tidak berkesempatan untuk mengurus lembaganya. Jepang mendarat di Aceh pada tanggal 12 Maret 1942 di tiga tempat, yaitu Ujong Batee Aceh Besar, di Teluk Balohan Pulau Weh Sabang dan di Kuala Bugak Peureulak Aceh Timur. Kehadiran mereka disambut oleh rakyat dengan semangat persaudaraan sesuai dengan propaganda Jepang bahwa mereka datang ke Indonesia untuk membebaskan saudaranya-saudaranya dari cengkraman penjajahan Belanda.³¹

Pada awal kehadiran Jepang di Aceh, rakyat beranggapan bahwa juru selamat telah tiba, namun tidak lama kemudian tindakan-tindakan berupa tekanan terhadap berbagai organisasi masyarakat terus dilakukan bahkan masyarakat juga ditindas dan memaksa kerja Rodi untuk kepentingan Jepang. Oleh karena pimpinan lembaga pendidikan hampir tidak ada waktu untuk berpikir untuk

³¹ http://id.wikipedia.org/wiki/Teuku_Nyak_Arif

memajukan pendidikan baik di Aceh Utara maupun di Aceh pada umumnya.

3.2. Masa DOM dan GAM

Pemberlakuan Daerah Operasi Militer di Aceh dimulai sejak tahun 1989 sampai dengan 1998. Pemberlakuan ini dikarenakan kekuatiran Jakarta terhadap Aceh untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebetulnya pada masa DOM ini tidak banyak berpengaruh di sektor pendidikan karena pada umumnya guru dan sekolah tidak disentuh oleh petugas keamanan di Aceh Utara. Target pihak keamanan pada waktu itu adalah orang-orang yang terlibat dalam politik yang khususnya untuk kemerdekaan Aceh atau yang disebut dengan Aceh Merdeka (AM).

Dapat disampaikan bahwa semua kegiatan belajar mengajar di Aceh Utara berlangsung aman pada saat DOM, dari laporan masyarakat pada saat itu tidak ada yang korban dipihak guru sejak dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas atau sederajat, demikian pula tidak ada sekolah yang dibakar atau dirusak. Sekalipun terkesan kejam pada saat DOM, tapi sektor pendidikan tidak berpengaruh dalam proses belajar mengajar sehari-hari.

Pada masa Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sektor pendidikan mengalami masa yang sangat suram hampir di seluruh Aceh tidak terkecuali di Aceh Utara. Aceh Utara menjadi sasaran kekerasan karena daerah itu memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, di sana juga berdiri industri-

industri megah, seperti Arun LNG, AAF, PIM dan lain-lain, sehingga eskalasi kericuhan lebih banyak di sana.

Konflik Aceh yang berkepanjangan telah menghancurkan seluruh sendi kehidupan masyarakat Aceh termasuk segi pendidikan bagi generasi penerus. Puluhan ribu menjadi korban kekerasan, hancurnya dunia pendidikan, hilangnya kesempatan kerja, aktivitas ekonomi rakyat tidak berjalan dan rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Konflik juga telah menimbulkan trauma, beban psikis dan luka sosial yang cukup dalam bagi masyarakat Aceh khususnya di Aceh Utara. Dampak konflik ini tentu membawa kerugian besar bagi kehidupan anak-anak usia sekolah.

Kemerosotan pendidikan di Aceh Utara seperti yang diakui oleh Kasi Bagian Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara Drs. Ali Basyah sudah sangat parah akibat konflik yang berkepanjangan, sejumlah fasilitas, baik gedung maupun sarana prasarana pendidikan terbakar dan hancur pada saat konflik antara GAM dengan TNI.³² Menurut beberapa informasi selama konflik di Aceh telah menewaskan guru sebanyak 514 orang, 22 orang di antaranya berasal dari Aceh Utara dalam rentang waktu tahun 1999 sampai dengan 2004, 40 orang cacat tetap dan 73 sekolah rusak dan terbakar.³³

Seperti halnya Aceh beberapa tahun yang lalu, saat ini di berbagai negara yang terkena dampak konflik tidak

³² *Serambi Indonesia*, Edisi Rabu 9 September 1999, hlm. 4

³³ Wawancara dengan Drs. Ibrahim Bewa, ketua MPD Kabupaten Aceh Utara, tanggal 6 November 2013.

mendapatkan akses untuk belajar, dengan adanya puluhan ribu sekolah yang diserang atau diduduki oleh angkatan bersenjata, sehingga meningkatkan resiko mereka untuk tidak dapat bersekolah atau akan putus sekolah, PBB dan mitra-mitranya memperingatkan pada dan menyerukan tindakan yang mendesak.

"Kami berada di sini karena pendidikan tidak boleh menjadi korban dari krisis ... atau akibat dari konflik," kata Direktur Eksekutif Dana PBB Anak (UNICEF) Anthony Lake dalam sebuah acara Pendidikan Tidak Bisa Menunggu (Education Cannot Wait) yang diadakan di sela-sela debat umum tahunan Majelis Umum PBB.

"Pendidikan tidak bisa menunggu untuk pertempuran berakhir ... atau bencana harus dihindari ... atau dana yang tersedia. Pendidikan tidak bisa menunggu ... karena anak-anak tidak bisa menunggu."³⁴ Lebih dari setengah usia anak sekolah dasar di dunia yang tidak bersekolah dan tinggal di negara-negara yang terluka oleh perang dan konflik serta hak pendidikannya ditolak.

Keadaan pendidikan semakin diperparah dengan eksodus guru-guru terutama yang berasal dari luar Aceh, menurut harian Kompas terbitan 8 Februari 2000 sekitar 514

34

<http://www.unic-jakarta.org/index.php/id/e-newsletter/96-bahasa-categories/info-terkini/september-2013-bahasa/4157->

guru eksodus keluar daerah dengan alasan keamanan sebahagian besarnya berasal dari Aceh Utara. Karena itu persentase kelulusan pada ujian nasionalpun masa konflik jauh tertinggal dari daerah-daerah lain.

Di bawah ini akan ditampilkan data jumlah sekolah, jumlah murid/siswa jumlah kelas dan jumlah guru serta beberapa data lainnya seperti keadaan guru PNS dan Guru Honorer/guru tidak tetap sejak tahun 1998 sampai dengan 2004. Pengambilan rentang waktu selama 6 tahun tersebut karena tahun-tahun itulah terjadi konflik di Aceh Utara, sedangkan tahun 2005 tidak diambil datanya karena saat itu kondisi Aceh pada umumnya sedang dalam keadaan berduka akibat tsunami dan pada tahun itu pula masyarakat dunia berdatangan ke Aceh termasuk ke Aceh Utara. Pada tahun 2005 juga ditandatangani MoU antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki Finlandia.

Tabel-1
Keadaan Sarana Pendidikan dan Guru Tahun 1998

TINGKATAN SEKOLAH	JLH SEKOLAH	JLH SISWA	JLH KELAS	JLH GURU	K T R
SD/MI	765	172792	5462	6214	-
SMP/MTS	106	48438	895	-	Tidak ada data guru
SMU/MA	46	19972	349	890	-
SMK	12	5524	154	268	-

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 1998³⁵

³⁵ Aceh Utara Dalam Angka, Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 1998.

Bila dilihat dari jumlah sekolah dasar dengan jumlah guru, maka rata-rata guru di sebuah sekolah menjadi 8,1 orang persekolah, itu artinya setiap sekolah dasar mencukupi gurunya. Sekolah SMP sederajat tidak diketahui jumlah gurunya karena tidak termuat secara khusus dalam buku Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara sehingga tidak dapat dibandingkan antara jumlah guru dengan sekolah. Sedang Sekolah Menengah Umum atau sederajat juga mencukupi jumlah guru di setiap sekolah yaitu 19,3 orang guru per sekolah untuk SMU dan 22, 3 orang guru per sekolah untuk sekolah SMK.



Keterangan : Foto Sekolah Dasar tertua di Aceh Utara. Sekarang Jadi Sekolah Dasar Negeri-I. Terletak di Jalan Diponegoro Kampung Jawa Kec. Banda Sakti Kota Lhok Seumawe

Tabel-2
Keadaan Sarana Pendidikan Guru Tahun 1999

TINGKATAN SEKOLAH	JLH SEKOLAH	JLH SISWA	JLH KELAS	JLH GURU	KTR
SD/MI	765	172892	5462	6214	-
SMP/MTS	-	-	-	-	Blm dapat data
SMU/MA	37	19972	437	1232	-
SMK	12	5524	154	268	-

Sumber Data : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 1999³⁶

Kondisi sarana Pendidikan dan guru di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1999 tidak terlalu berubah seperti jumlah guru dan jumlah sekolah di tingkat SD sama dengan tahun 1998 yang agak berbeda adalah guru SMU lebih meningkat jumlahnya, sehingga persentase menjadi 33,2 orang guru per sekolah.



Gambar Sekolah Dasar tertua di Bireun yang dulunya salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara. Sekarang jadi SDN-1 Bireun terletak di Kota Juang.

³⁶ Aceh Utara Dalam Angka, Kerjasama Bappeda dengan BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 1999.

Tabel-3
Jumlah Sarana Pendidikan dan Guru Tahun 2000

TINGKATAN SEKOLAH	JLH SEKOLAH	JLH SISWA	JLH KELAS	JLH GURU	KTR
SD/MI	443	98549	2996	3055	-
SMP/MTS	-	-	-	-	Tdk ada data
SMU/MA	24	10377	255	465	-
SMK	8	366	74	143	-

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000³⁷

Keadaan jumlah sekolah, siswa, kelas dan guru di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2000 semuanya menurun akibat pemekaran Kabupaten Bireun pada tahun 1999, sehingga sekolah yang ada dalam kawasan Kabupaten Bireun tidak dimasukkan lagi dalam statistik Kabupaten Aceh Utara, namun bila dirata-ratakan antara jumlah guru dengan jumlah sekolah masih cukup. SD 6,8 SMU 19,3 dan SMK 17,8 orang guru per sekolah.

Tabel-4
Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2000

SD	SMP	SMU/SMK	AKADEMI/PT
443	71	25	4

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000

³⁷ Aceh Utara Dalam Angka, Kerjasama BPS dengan Bappeda Kabupaten Aceh Utara Tahun 2000

Jumlah sekolah di atas tidak termasuk sekolah MI, MTS, MA baik negeri maupun swasta karena belum didapatkan data yang akurat.

Tabel-5
Jumlah Sarana Pendidikan dan Guru Tahun 2001

TINGKATAN SEKOLAH	JLH SEKOLAH	JLH SISWA	JLH KELAS	JLH GURU	KTR
SD/MI	370	78424	1986	2325	-
SMP/MTS	58	19465	473	1404	
SMU/MA	19	7814	191	356	-
SMK	-	-	-	-	Tidak disebut-kan

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2001³⁸

Jumlah guru pada tahun 2001 semakin berkurang, Jumlah murid dan jumlah gedung sekolah juga berkurang bila dibandingkan dengan tahun 2000. Kekurangan guru seperti yang telah dijelaskan dikarenakan oleh konflik, banyak guru yang eksodus ke luar daerah namun belum diketahui jumlah pastinya berapa dan juga ada guru yang meninggal dunia sebanyak 22 orang dan lebih banyak lainnya yang tidak diketahui penyebabnya. Bila dihitung jumlah kekurangan tersebut mencapai 839 orang yang terdiri dari guru SD dan SMA, sedangkan guru SMP dan SMK belum diketahui jumlah pastinya.

³⁸ Aceh Utara Dalam Angka, Kerjasama BPS dengan Bappeda Kabupaten Aceh Utara Tahun 2001

Tabel-6
Jumlah Guru PNS dan Non PNS Tahun 2001

GURU PNS	GURU NON PNS	JUMLAH
655	749	1404

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2002

Guru non PNS ternyata lebih banyak daripada guru PNS di Aceh Utara dan tentunya berdampak positif bagi terpenuhi jam mengajar di sekolah-sekolah mengingat banyak guru yang eksodus dan meninggal dunia.

Tabel-7
Jumlah Sarana Pendidikan dan Guru Tahun 2002

TINGKAT SEKOLAH	JLH SEKOLAH	JLH SISWA	JLH KELAS	JLH GURU	KTR
SD/MI	362	78547	2142	1978	-
SMP/MTS	59	19135	467	611	Guru Non PNS tdk didata
SMU/MA	19	9836	187	307	-
SMK	-	-	-	-	Tdk disebutkan

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2002³⁹

Tahun 2002 ternyata lebih banyak yang hilang baik gedung sekolah, murid, lokal dan lebih-lebih guru, bila dibandingkan jumlah guru antara tahun 2000 dengan tahun 2002 hampir 40% yang tidak terdata, apakah karena meninggal, eksodus ataupun hilang sehingga tidak tercatat

³⁹ Aceh Utara Dalam Angka, Kerjasama BPS dengan Bappeda Kabupaten Aceh Utara Tahun 2002

dalam buku BPS Kabupaten Aceh Utara. Guru SD tahun 2000 berjumlah 3055 orang sedangkan tahun 2002 berjumlah 1978, sehingga kehilangan 1077 orang. Guru SMP bila dibandingkan dengan Tahun 2001 kehilangan 793 orang mencapai 60%. Sedangkan guru SMU kehilangan 158 orang mencapai 20%. Gedung sekolah SD tahun 2000 sebanyak 443 unit, sedangkan tahun 2002 hanya tinggal 362 unit berarti kehilangan 81 unit. Ruang Belajar atau kelas tahun 2000 sebanyak 2996, sedangkan tahun 2002 hanya tersisa sebanyak 2142 berarti kehilangan sebanyak 854 ruang. Kehilangan guru tidak diketahui secara pasti penyebabnya, tapi kehilangan gedung sekolah dan ruangan mutlak akibat terbakar dan dirusak pada masa konflik.

Tabel-8

Jumlah Guru PNS dan Non PNS Tingkat SLTP Tahun 2002

TINGKATAN SEKOLAH	GURU PNS	GURU NON PNS	JUMLAH
SLTP	611	667	1278
SLTA	307	213	520

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2002

Jumlah guru SLTP dan SLTA yang tercatat dalam tabel- 8 tidak sama jumlahnya dengan yang tercatat dalam tabel-7 karena tidak dimasukkan jumlah guru non PNS, tidak diketahui apa alasan BPS tidak memasukkan guru non PNS tersebut.

Tabel-9
Jumlah Sarana Pendidikan dan Guru Tahun 2003

TINGKATAN SEKOLAH	JLH SEKOLAH	JLH SISWA	JLH KELAS	JLH GURU	K T R
SD/MI	361	79840	1958	3075	-
SMP/MTS	61	24853	599	1587	-
SMU/MA	30	12895	289	344	-
SMK	-	-	-	-	Tdk disebutkan

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2003⁴⁰

Jumlah guru pada tahun 2003 sudah lumayan cukup dan melebihi jumlahnya dengan tahun 2000 yaitu sebanyak 3075 orang, sedangkan tahun 2000 3055 orang, ini karena sudah dimasukkan lagi guru Non PNS baik di tingkat SD, SMP maupun SMU sehingga dapat tertangani kekurangan-kekurangan guru sebelumnya.



Gambar Sekolah SMP tertua di Aceh Utara. Sekarang jadi SMPN-1 Banda Sakti Kota Lhokseumawe. Terletak di Jalan Diponegoro Kampung Jawa.

⁴⁰ Aceh Utara Dalam Angka, Kerjasama BPS dengan Bappeda Kabupaten Aceh Utara Tahun 2003.

Tabel- 10
Jumlah Guru PNS dan Non PNS Tingkat SD, SLTP dan
SLTA Tahun 2003

TINGKATAN SEKOLAH	GURU PNS	GURU NON PNS	JUMLAH
SD	1791	1284	3075
SLTP	705	882	1587
SLTA	344	467	811

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2003

Tabel-11
Jumlah Sarana Pendidikan dan Guru Tahun 2003

TINGKATAN SEKOLAH	JLH SEKOLAH	JLH SISWA	JLH KELAS	JLH GURU	K T R
SD/MI	361	78010	2610	3462	-
SMP/MTS	64	26235	624	1602	-
SMU/MA	27	15168	624	806	-
SMK	-	-	-	-	Tidak disebutkan

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2004⁴¹

Bila dilihat jumlah sekolah, siswa dan guru sejak tahun 1998 sampai dengan 2004 sangat fariasi sekali, tahun 2001 dan tahun 2002 merupakan puncak dari kehancuran sekolah dan juga puncak kekurangan guru, yaitu dari 3055 orang guru SD tahun 2000 menjadi menjadi 1978 orang tahun 2002. Guru SLTP tahun 2001 1404 menjadi 611 orang guru pada tahun 2002. Guru SMU dari 465 orang menjadi 307 orang pada tahun 2002. Jumlah gedung SD tahun 2000 sebanyak 443 menjadi 362 sekolah pada tahun 2002. Pada hal kedua tahun itu

⁴¹ Aceh Utara Dalam Angka, Kerjasama BPS dengan Bappeda Kabupaten Aceh Utara Tahun 2004

Kabupaten Bireun sudah berdiri sendiri sehingga sekolah dalam wilayah itu tidak didata lagi menjadi aset Kabupaten Aceh Utara.

Tabel-12
Jumlah Guru PNS dan Non PNS Tingkat SD, SLTP dan SLTA Tahun 2003

TINGKATAN SEKOLAH	GURU PNS	GURU NON PNS	JUMLAH
SD	1862	1600	3462
SLTP	686	916	1602
SLTA	342	464	806

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2004



Gambar Sekolah Menengah Pertama di Kota Juang Bireun.

4. Masa Damai

Pendidikan pada masa damai sebetulnya tidak ada persoalan dalam dunia pendidikan karena proses belajar mengajar berlangsung secara normal sejak tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, hanya saja persoalan berhasil atau tidaknya suatu sekolah sangat tergantung komitmen dari pengelola baik Kepala Dinas Pendidikan dan jajarannya maupun kepala sekolah sampai kepada guru-gurunya serta peran serta masyarakat sebagai pengawasannya. Kabupaten Aceh Utara sebelum tahun 2000 atau sebelum dimekarkan adalah kabupaten yang terbanyak penduduknya di Aceh, karenanya tentu banyak pula dana alokasi umum yang memungkinkan untuk pembiayaan pendidikan lebih maksimal.

Setelah Indonesia merdeka pada awalnya keadaan pendidikan masih sangat memprihatinkan. Daerah Aceh merupakan salah satu dari sekian daerah yang paling tertinggal dalam bidang pendidikan. Keadaan ini sebenarnya berkaitan dengan perkembangan politik yang terjadi di Daerah Aceh sendiri. Pada waktu banyak sekolah yang terbengkalai dan ditutup karena banyak guru dan murid yang ikut ke dalam kancah peperangan mempertahankan kemerdekaan. Di samping itu kedudukan daerah Aceh masih berada di bawah Propinsi Sumatera Utara, akibatnya data-data tentang pendidikan Aceh tidak sempat terekam pada masa ini.

Data kongkrit tentang jumlah sekolah yang ada di Aceh baru terekam kembali pada tahun 1952/1953. Adapun tingkat

sekolah, jumlah dan muridnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel-13
Tingkat Sekolah, Jumlah Sekolah dan Jumlah Murid Tahun 1952/1953

NO	TINGKAT SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH SISWA
1	SR	437	89372
2	SMP	7	1205
3	STP	3	200
4	ST (M)	1	11
5	SMEP	1	179
6	SKP	4	398
7	SGB	2	82
8	KPKBKB	14	1271
9	SMA	1	67
10	SGA	1	84

Sumber: Perkembangan Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi DI Aceh Tahun: 2001.⁴²

Sampai dengan tahun 1953 di Aceh Utara belum didapatkan data-data tentang berapa jumlah Sekolah Rakyat, demikian pula SMP atau sederajat lainnya, baru tahun 1974 Sekolah Dasar (SD) baru dikenal secara luas oleh masyarakat dengan hadirnya Sekolah Dasar Inpres, Cuma belum diketahui berapa jumlahnya sekolah tersebut di Aceh Utara. Sedangkan untuk seluruh Aceh didapatkan data sebagai berikut:

⁴² Malik Raden, *Perkebangan Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi DI Aceh Tahun: 2001*. Hlm. 38.

Tabel-14
Pembangunan Sekolah Dasar Inpres Tahun 1974 - 1979

TAHUN	SD INPRES	GURU	SISWA
1974	133	1211	11446
1975	325	2384	23718
1976	325	2224	37814
1977	325	3451	37814
1978	700	4729	92319
1979	700	4729	110818

Sumber : Perkebangan Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi DI Aceh Tahun: 2001.⁴³

Perkembangan sekolah SLTP baik Negeri maupun Swasta sangat bagus di Aceh Utara. Jumlah penduduk yang banyak sangat memungkinkan untuk cepat tumbuh sekolah ditengah-tengah masyarakat. Jumlah Sekolah SMP Negeri sejak tahun 1992 sampai dengan 1997 terus meningkat. Jumlah pertumbuhannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel-15
Perkembangan SLTP Negeri Dan Swasta
Kabupaten Aceh Utara Tahun 1992 - 1997

TAHUN	SLTP NEGERI	SLTP SWASTA	K T R
1992	62	33	
1993	70	28	
1994	72	31	
1995	72	29	
1996	78	29	
1997	82	29	

Sumber: Perkebangan Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi DI Aceh Tahun: 2001.⁴⁴

⁴³ *Ibid.* Hlm. 46

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 60 - 61

Perkembangan SMA, Murid dan Guru di Aceh Utara setelah Merdeka dan sebelum terjadi konflik di Aceh dapat diambil contoh pada tahun 1992 dan 1993 sebagai berikut :

Tabel-16
Perkembangan SLTA Negeri Dan Swasta
Kabupaten Aceh Utara Tahun 1992-1993

TAHUN	JLH. SMA	JLH. SISWA	JLH. GURU
1992	39	11312	1233
1993	42	12181	3167

Sumber : Perkembangan Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi DI Aceh Tahun: 2001.

Jumlah tersebut merupakan rekor terbanyak bila dibandingkan dengan SMA yang ada di Kabupaten-kabupaten lainnya di Aceh. Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat jumlah SMA seluruh kabupaten kota seluruh Aceh.

Tabel-17
Perkembangan SLTA Negeri Dan Swasta
Kabupaten Aceh Utara Tahun 1992

KAB/ KODYA	JLH SMA		JLH SISWA		JLH GURU	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
Sabang	2	1	664	133	48	25
Banda Aceh	6	19	5168	3501	413	431
Aceh Besar	11	4	2595	288	377	67
Pidie	17	6	6052	645	602	88
Aceh Utara	25	14	9172	2140	927	306
Aceh Timur	11	17	4810	2750	370	409

Aceh Tengah	7	9	2471	567	238	127
Aceh Barat	15	11	3392	748	389	145
Aceh Selatan	15	4	3842	312	446	51
Aceh Tenggara	6	7	2158	615	172	69

Sumber: Perkebangan Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi DI Aceh Tahun: 2001.

Bila kita melihat tabel di atas Kabupaten Aceh Utara menempati urutan tertinggi dari Kabupaten lainnya, baik jumlah gedung sekolah, murid dan jumlah guru. Kondisi pendidikan di Aceh Utara pasca konflik antara tahun 2005 s/d sekarang dapat dikatakan tidak ada persoalan dalam bidang fasilitas sekolah, guru dan juga siswa. Semua sekolah yang dulunya rusak baik akibat dibakar atau terbakar sekarang semuanya telah diperbaiki demikian pula sarana dan prasarana lainnya . contohnya ada 73 sekolah yang rusak dan terbakar pada masa konflik sekarang semuanya telah diperbaiki⁴⁵. Guru dan murid baik di pedalam maupun di kota tidak ada keraguan lagi ketika ingin berangkat sekolah, mereka percaya diri dengan sepenuh hati dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Demikian pula orang tua murid tidak ada keraguan lagi akan keselamatan anaknya ketika berangkat ke sekolah, alangkah indahnya damai itu.

Menurut Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Aceh Utara yang pada saat penulis wawancara

⁴⁵ Wawancara dengan Drs. M. Ali Abdullah, Kabid Program dan Pelaporan Disdik Pora Aceh Utara, 5 November 2013.

sebagai pemegang Nota Dinas, karena Kepala Dinasnya berangkat Haji tahun 2013 ini mengatakan prestasi siswa SLTA di Aceh Utara pada masa pasca konflik sangat memuaskan dan sangat bertolak belakang dengan pada masa konflik. Sebagai contoh persentase kelulusan UN masa konflik sering di bawah 85 %, sedangkan pasca konflik di atas 95% dan juga nilai rata-rata tinggi. Tahun 2013 ini undangan untuk masuk perguruan tinggi dari SLTA Kabupaten Aceh Utara sebanyak 809 orang yang tersebar di seluruh Indonesia dan ada juga yang lulus ke luar negeri.⁴⁶

Selain sekolah umum di bawah kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di Aceh Utara juga terdapat sekolah di bawah kementerian Agama yaitu, MIN, MTSN dan MAN baik negeri maupun swasta. Pada masa damai ini semua aktivitas berjalan dengan baik, sekolah-sekolah yang sebelumnya dinyatakan rusak dan terbakar juga telah diperbaiki dan dibangun kembali. Selain itu di Kabupaten ini juga dibangun perguruan tinggi baik Universitas umum seperti seperti Universitas Malikussaleh. Universitas Al-Muslim dan Poli Teknik. Sedangkan yang berada di bawah kementerian Agama adalah STAIN Malikussaleh dan sejumlah perguruan Tinggi Swasta lainnya saat ini belajar dengan tenang tidak ada hambatan apa-apa. Alangkah indahnya damai dan karena kedamaianlah rakyat dapat hidup aman sentosa sejahtera lahir dan bathin. Semoga Aceh tidak

⁴⁶ Wawancara dengan Mawardi, Spd, Kabid Dikdas Disdidpora Kab. Aceh Utara, 5 November 2013.

akan pernah ada lagi konflik baik skala vertikal maupun horizontal.. Amin ya rabbal 'alamin.

Dari segi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Aceh Utara hampir memadai, sekarang tinggal memikirkan persoalan mutu dari pendidikan tersebut sejak tingkat sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas atau bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Beberapa kalangan berkomentar tentang rendahnya mutu pendidikan di Aceh Utara seperti dari Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, Ahmad Satari beliau prihatin karena mutu pendidikan di daerah itu rendah. Tahun 2011 lalu peringkat pendidikan di Aceh Utara jauh tertinggal dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Lebih Lanjut Satari mengatakan rendahnya mutu pendidikan di Aceh Utara merupakan cerminan mutu pendidikan Provinsi Aceh yang pada saat itu peringkatnya di bawah Provinsi Papua.

Komisi E yang menangani masalah pendidikan, kata Ahmad Satari, juga menyesalkan karena besarnya anggaran tidak sebanding dengan mutu yang dicapai. Dana untuk bidang pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara mencapai 20%. Tahun 2012 Kabupaten Aceh Utara mengeluarkan dana Rp. 80 Milyar untuk biaya sertifikasi guru, namun jumlah dana yang besar ternyata tidak menjamin mutu guru yang mengikuti sertifikasi menjadi baik. Untuk masa mendatang harus lebih baik. Komisi E berharap pada tahun 2014 mendatang segala masalah yang berkaitan dengan bidang pendidikan di Aceh Utara harus bisa dituntaskan,

termasuk masalah infrastruktur dan kelengkapan alat-alat mebel di setiap sekolah, aktifitas belajar mengajar harus dijamin bisa berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mendongkrak mutu pendidikan di Aceh Utara.⁴⁷

Tekad anggota Dewan tersebut ternyata disambut baik oleh Bupati Aceh Utara dan juga Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Bupati mengatakan : Mutu pendidikan di Aceh Utara masih butuh perbaikan, kami harapkan program Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Tata Layanan dan Manajemen Pendidikan serta Koordinasi antar Institusi Pendidikan ini dapat memberi manfaat yang luas terutama untuk peningkatan kualitas guru. Ia juga menekankan bahwa dari 9 visi misinya selaku pimpinan pemerintahan Aceh Utara, akan terfokus pada 3 bagian termasuk pendidikan. Dari 9 visi misi, kami akan fokus pada pendidikan, pertanian dan irigasi. Walaupun kita tahu, pendidikan akan menuai hasil 10-15 tahun yang akan datang. Semoga nanti banyak anak Aceh Utara di seluruh Indonesia dan dunia yang berhasil. Dalam tiap tahunnya juga kita berharap banyak anak-anak Aceh Utara bisa melanjutkan pendidikan ke luar Aceh.⁴⁸

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara yaitu : mulai tahun 2013 kita akan mulai memfokuskan pada

⁴⁷ <http://www.yiela.com/view/2726021/-anggaran-besar-mutu-pendidikan-di-aceh-utara-rendah->

⁴⁸ <http://www.acehutara.go.id/berita-bupati-aceh-utara-masih-butuh-perbaikan-mutu-pendidikan.html>

program peningkatan mutu pendidikan di Aceh Utara. Strategi awal yang akan ditempuh adalah:

1. Menambah dan melengkapi alat-alat pendukung proses belajar mengajar;
2. Memperbaiki sekolah yang rusak
3. Perataan guru di sekolah sesuai kebutuhan.⁴⁹

Di bawah ini akan dikemukakan data statistik tentang jumlah sekolah, murid dan guru tahun 2008 sampai dengan 2012 di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel-18
Jumlah Sarana Pendidikan dan Guru Tahun 2008

TINGKATAN SEKOLAH	JLH SEKOLAH	JLH SISWA	JLH GURU	K T R
SD/MI	385	80370	4971	-
SMP/MTS	113	31035	2713	-
SMU/MA	55	21299	1593	-
SMK	8	1364	188	-

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008

Tabel-19
Jumlah Sarana Pendidikan dan Guru Tahun 2009

TINGKATAN SEKOLAH	JLH SEKOLAH	JLH SISWA	JLH GURU	K T R
SD/MI	387	80412	5969	-
SMP/MTS	113	31239	3055	-
SMU/MA	55	21069	1566	-
SMK	-	-	-	-

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009

⁴⁹ <http://www.acehtraffic.com/2013/02/2013-dinas-pendidikan-aceh-utara.html>

Jumlah sarana pendidikan, guru dan murid tahun 2008 dan 2009 terus meningkat bila dibandingkan dengan tahun-tahun masa konflik, ini dapat dilihat dalam 2 tabel di atas, jumlah gedung SD/MI sebanyak 385 tahun 2008 dan meningkat 2 gedung pada tahun 2009 yaitu 387. Sedangkan masa konflik hanya 362 gedung. Jumlah guru SD/MI dari 3075 tahun 2003 menjadi 5969 orang pada tahun 2009. Sungguh peningkatan yang sangat luar biasa dalam kurun waktu 6 tahun. Demikian pula SMP/MTS dan SMU/MA. Sedangkan SMK pada tahun 2008 terdapat 8 gedung sekolah, 1364 siswa dan 188 orang guru, tetapi pada tahun 2009 sampai dengan 2011 BPS tidak menampilkan lagi jumlah sekolah, siswa dan jumlah guru. Penulis merasa heran dan perlu dipertanyakan kenapa tidak ditampilkan lagi, apakah masih jumlah yang sama atau tidak ada lagi.

Tabel-20
Jumlah Sarana Pendidikan dan Guru Tahun 2010

TINGKATAN SEKOLAH	JLH SEKOLAH	JLH SISWA	JLH GURU	K T R
SD/MI	378	79470	5785	-
SMP/MTS	113	24613	3319	-
SMU/MA	47	17193	1474	-

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010

Tabel-21
Jumlah Sarana Pendidikan dan Guru Tahun 2011

TINGKATAN SEKOLAH	JLH SEKOLAH	JLH SISWA	JLH GURU	K T R
SD/MI	352	68477	5491	-
SMP/MTS	138	22485	2336	-
SMU/MA	47	17307	1474	-

Sumber Data: BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2011

Jumlah Gedung sekolah, murid dan guru pada 2 tabel di atas sangat jauh berbeda dengan 2 tabel sebelumnya pada hal sumber data semuanya dari BPS Kabupaten Aceh Utara. Jumlah gedung sekolah SD tahun 2008 dan 2009 sebanyak 387, tetapi tahun 2010 dan 2011 turun menjadi 378 dan 352. Guru SD dari 5969 tahun 2008 turun menjadi 5785 tahun 2010 dan 5491 tahun 2011. Demikian pula jumlah gedung SMP dan SMU, Jumlah Guru SMP dan SMU juga turun drastis pada 2 tahun terakhir. Yang menjadi pertanyaan kemana gedung dan guru pada 2 tahun tersebut, pada hal tidak ada lagi gedung yang dibakar atau terbakar dan dirusak, apakah gedung-gedung sekolah tersebut ada yang dimerger akibat kekurangan murid atau sudah ditutup sama sekali, dan sangat mungkin pula BPS belum melengkapi data-data pada tahun 2010 dan 2011 dimaksud. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu akan terjawab oleh peneliti lainnya pada masa yang akan datang.

Pada tahun 2012 dan 2013 jumlah gedung Sekolah Dasar/MI menurut BPS Kabupaten Aceh Utara sebanyak 366 buah, Jumlah guru 6246 dan jumlah siswa 63.977. Jumlah Gedung SMP/MTS 156 buah, Jumlah Siswa 22679 dan jumlah Guru 2655. Sedangkan gedung sekolah SMA/MA sebanyak 45 buah, Siswa 15614 dan Guru 1578 orang. Jumlah gedung sekolah, siswa dan guru tiga tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan.

Perlu disampaikan bahwa sejarah pendidikan di Kabupaten Aceh Utara yang disorot adalah sejak sekolah Dasar sampai dengan menengah atas sederajat. Sedang Pendidikan Anak

Usia Dini, Taman Kanak-Kanak/*Rauzatul Atfal*, Pendidikan luar sekolah, *Dayah* ataupun Pesantren, Pendidikan tinggi (Universitas) dan Akademi tidak dibahas dalam tulisan ini, karena jika dimasukkan jenjang pendidikan itu semua di samping waktu penelitian yang sangat terbatas juga cakupan penelitian yang sangat luas, sehingga tidak akan fokus hasil penelitiannya. Apa yang belum diteliti di sini masih ada kesempatan bagi peneliti lainnya untuk meneliti pada masa yang akan datang.

**Perubahan Penduduk Kabupaten
Aceh Utara (1970-2013)****Hasbullah****1. Pendahuluan**

Kabupaten Aceh Utara terletak di bagian paling utara provinsi Aceh pada koordinat $96^{\circ} 20' - 97^{\circ} 21'$ bujur timur dan $4^{\circ} 54' - 5^{\circ} 18'$ lintang utara. Posisinya saat ini masih sangat strategis, karena berada di antara jalur laut, darat dan udara. Daerah ini terbuka untuk lintas lokal, regional, dan dunia internasional, terutama di bidang perdagangan, peradaban, dan politik. Sejak abad ke-13, daerah ini dikenal sebagai Samudera Pasai. Samudera Pasai diperkirakan berdiri antara tahun 1270-1275 Masehi seperti yang disebutkan oleh J.P. Moquette, bahkan jika dihubungkan dengan berita perkawinan antara putri Pereulak dengan Meurah Silu (Sultan Malik As-Salih), pada masa pemerintahan Raja Muhammad Amin Syah di Pereulak paling tidak bisa mendekati angka tahun 1263 Masehi.¹ Pada masa puncak kejayaan Samudera Pasai penduduknya disebutkan sebanyak 20.000, di antaranya

¹Uka Tjandrasasmita, *Pasai Dalam Dunia Perdagangan, dalam Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra (Kumpulan Makalah Diskusi)*, (Jakarta: Depdikbud, Dirjenbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), hlm.22.

terdapat pelaku ekonomi dari orang-orang Turki, Arab, Persia, Tamil, dan Melayu.²

Gambaran penduduk Aceh Utara pada masa lalu menarik ditelusuri dari sisi historis, di mana hal ini dilacak berdasarkan sumber tentang Samudera Pasai sebagai cikal-bakal kabupaten yang dikenal sebagai lintas jalur sutra tersebut. Penduduk Aceh Utara pada masa lalu (Samudera Pasai), seperti yang disebutkan dalam Hikayat Raja Pasai (HRP) terdiri atas: *raja, orang-orang besar, sultan, perdana menteri, nata, menteri, bentara, pegawai, sida-sida, bendahari, penggawa, patih, tumenggung, demang, ngebehi, lurah, bebekal petinggi, bala tentara, lasyakar, hulubalang, pahlawan, panglima, pendekar, senapati, hamba sahaya, rakyat, orang tuha-tuha, gundik, dayang-dayang, binti perwara, fakir, miskin, inangda, pengasuh, orang berbuat bubu, juara bermain hayam, orang menjala ikan, (orang) benjaga, (orang) berlayar, orang pekan, seorang tuha dalam surau, nakhoda, ahlul nujum, yogi, guru, dan pendeta*.³

Menurut sumber dari *Sejarah Melayu*, penduduk di Samudera Pasai terdiri atas; *raja, tuanya (di negeri), menteri, sultan, orang-orang besar, mangkubumi, pegawai, bentara, hulubalang, gahara, gundik, fakir, miskin, rakyat, dayang-dayang, hamba, (orang) menahan lukah, (orang) berburu, dan nakhoda*.

² Ibid, hlm.75.

³Ayat Rohaedy, *Struktur Masyarakat Pasai dalam Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra (Kumpulan Makalah Diskusi)*, (Jakarta: Depdikbud, Dirjenbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), hlm.1-6.

Sedangkan sumber Cina menyebutkan pekerjaan penduduk Samudera Pasai adalah *king, chief, army, commander of the troops, bodyguard (of the king), high officer, nobles, people of rank, slave, master of slave (people of), great dignitaries of the kingdoms, fisherman, (people that) plants rice, keep many cows, live from fishing, make salt and wine, dan trading*. Dalam pada itu Suma Oriental mencatat adanya *king, ambassadors, important people of good, (people live from) fishing, traded, dan merchants*.⁴

Struktur dan gambaran penduduk Samudera Pasai terlihat berdasarkan birokrasi, status sosial, mata pencarian (ekonomi), profesi atau kecendekiaan. Selain itu, ada unsur birokrasi khusus, seperti tentara. Berdasarkan birokrasi penduduk daerah ini pada zaman dulu terdiri atas; a) raja, sultan, nata, tuanya (di negeri), king, b) perdana menteri, mangkubumi, patih, chief; c) menteri, envoy, ambassadors; d) tumenggung, bendahari, bentara, demang, sida-sida, penggawa; e) orang besar-besar; f) pegawai, ngabehi, lurah, bekal petinggi. Unsur khas birokrasi dengan tugas khusus keamanan adalah; g) bala tentara, lasykar, army, troops, bodyguards, hulubalang, pahlawan, panglima, senapati, pendekar, commander of the troops, high officer.⁵

Dari status atau kedudukan sosial seseorang, pengelompokan akan terdiri atas; h) gahara, gundik; i) orang tuha-tuha, nobles, people of rank, master (of the slave), (people of great dignitaries, (of the kingdom), important people of good, j) dayang, binti perwara, inangda, pengasuh; k) rakyat, fakir,

⁴Ibid.

⁵ Ibid

misikin, hamba (*sahaya*), dan *slave*. Berdasarkan mata pencarian penduduk Samudera Pasai terdiri atas; (orang) pembuat bubu, menjala ikan, menahan *lukah*, *fisherman*, (*people*) *live from fishing*, *plant rice*, *keep many cows*, *make salt*, *make wine*; l) orang *pekan*, *merchant*, (orang) berniaga, *trading* (*man*); m) juara bermain *hayam*. Sementara itu berdasarkan profesi atau kecendekiaan, penduduk Samudera Pasai ada yang menduduki jabatan nakhoda, guru, *yogi*, pendeta, dan *ahlul nujum*. Gambaran penduduk Samudera Pasai juga ada petani, diperoleh dari gambaran adanya keluhan penduduk karena binatang banyak yang merusak "*tanam-tanam*" kami. Secara umum digambarkan keadaan sebagai berikut, penduduk Samudera Pasai terdiri atas kelompok-kelompok yang menduduki posisi birokrasi tertentu, yaitu *raja*, *perdana menteri*, *patih*, *menteri*, *duta*, *penggawa* (*sida-sida*, *bentara*, *bendahari*), *orang besar-besar*. Di antara para birokrat itu, ada yang sebenarnya birokrat "*asing*" (Majapahit), yaitu *palis*, *temenggung*, *demang*, *ngabehi lurah*, dan *bebekel* petinggi. Di antara mereka terdapat birokrat "*militer*", yaitu; bala tentara atau lasykar dengan pangkat tertinggi *senapati* atau panglima yang tampaknya membawahi para pendekar, hulubalang, pahlawan, dan pengawal.⁶

Berdasarkan status atau kedudukan sosial seseorang, diketahui bahwa penduduk Samudera Pasai dikenal orang-orang yang karena pekerjaannya dapat dianggap sebagai "*pembantu*" atau *panakawan*. Kelompok ini umumnya

⁶ *Ibid*

ditemukan di lingkungan istana, terdiri atas *inang*, pengasuh, dayang-dayang, dan *binti perwara*. Kelompok ini umumnya terdiri atas perempuan, kelompok yang juga dapat menghasilkan seseorang dengan kedudukan sebagai *permaisuri* dan *gundik*. Permaisuri terbatas jumlahnya, sedangkan *gundik* dapat terdiri atas beberapa orang. Kelompok yang tidak berada di lingkungan istana adalah rakyat umum, dan orang tua-tua (para pemuka masyarakat) yang dapat berada di mana saja.⁷ Dari sisi mata pencarian (ekonomi), kecenderungan penduduk Samudera Pasai untuk menjadi pedagang dan nelayan lebih banyak dibandingkan dengan petani atau pemburu. Di antara mereka, ada juga yang mempunyai keahlian membuat garam dan minuman keras (tuak). Dalam hal itu, kecenderungan penduduk Samudera Pasai untuk memuliakan kehidupan religi, diperlihatkan oleh adanya jabatan; guru, pendeta, dan ahli nujum. Sementara itu nakhoda nampaknya cukup berperan, terutama dalam kaitannya dengan kehidupan maritim penduduk Samudera Pasai.⁸

Sebelum Indonesia merdeka, Aceh Utara melalui Surat Keputusan *Van der Gouvernement General van Nederland Indie* tanggal 7 September 1934, Pemerintah Hindia Belanda membagi Aceh atas 6 (enam) *afdeeling* (kabupaten) yang dipimpin seorang *asistent resident*, dan kabupaten ini menjadi *Afdeeling Noord Kust van Aceh* (Kabupaten Aceh Utara), yang

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

meliputi Aceh Utara sekarang, ditambah Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie (sekarang kabupaten Pidie Jaya).⁹ Pada tahun 1970-an sampai tahun 1980-an, ketika pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya mengadakan pembangunan di segala bidang, yang dicanangkan pemerintahan Orde Baru dengan tujuan peningkatan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan. Pembangunan ini tentu saja menghasilkan permasalahan, salah satunya adalah masalah perubahan penduduk di daerah tertentu di Indonesia akibat dampak dari program pemerintah akibat adanya industrialisasi yang menyebabkan terjadinya urbanisasi, relokasi, dan transmigrasi pada saat itu. Penduduk Aceh Utara mayoritas orang Pase dan orang Peusangan atau Pidie dan lain-lain. Penduduk asli ini sebagian bertani dan sebagian lagi bekerja sebagai nelayan.

Sejak dilakukan pembangunan pabrik gula Cot Girek di Aceh Utara dan diresmikan oleh Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saat itu kabupaten ini mulai memasuki era industrialisasi saat ditemukan sumber gas di Aron kecamatan Syamtalira Aron pada tahun 1971. Selanjutnya, dibangun kilang pengeboran oleh PT.*Bechtel Inc*, sebagai penanggungjawab pengembangan ladang gas dan menyediakan bahan baku untuk kilang gas cair (LNG).¹⁰ Pada tahun 1976, pemerintah juga mulai menerapkan kebijakan

⁹ Monografi Aceh Utara Tahun 1986, (Lhokseumawe: BPS dan BAPPEDA Aceh Utara).

¹⁰Dinas Informasi dan Komunikasi, *Aceh Utara: Dari Kerajaan Samudera Pasai Sampai Era Industrialisasi*, (Pembab Aceh Utara:2002), hlm.165.

transmigrasi di beberapa tempat di Aceh Utara, seperti di Cot Girek beberapa tempat lainnya. Setelah pengeksplorasian sumber gas alam cair (LNG) tahun 1978, yang kemudian disusul dengan pembangunan pabrik pupuk *PT Asean Aceh Fertilizer* (AAF) berproduksi tahun 1983, pabrik *Pupuk Iskandar Muda* (PIM) berproduksi tahun 1984, dan pabrik *Kertas Kraft Aceh* (KKA) tahun 1985.¹¹

Setelah memasuki era industrialisasi Aceh Utara tentu saja berimplikasi pada perubahan dan permasalahan kependudukan di sana. Perubahan penduduk ini, tentu saja banyak menciptakan lapangan kerja, meningkatnya pendapatan, lancarnya sarana-prasarana perhubungan, peningkatan konsumsi hasil teknologi, peningkatan institusi dan pendidikan, *skill*, dan banyaknya bantuan industri terhadap pemberdayaan lingkungan sekitar. Di sisi lain, era industrialisasi yang hampir bersamaan dengan kebijakan transmigrasi di Aceh Utara di tengah penduduk aslinya yang bermatapencarian di bidang maritim, seperti nelayan, petambak, petani garam, agraris (petani sawah), dengan teknologi padat karya tentu saja bisa menimbulkan ketimpangan dan permasalahan kependudukan lainnya di Aceh Utara.

Pada dasarnya penelitian perubahan penduduk di Aceh Utara dilakukan sebagai pendalaman terhadap penduduk di kawasan ini kurun waktu tahun 1970-2013 melalui data statistik dan wawancara terbatas. Perkembangan

¹¹TP2WI (Kabupaten Aceh Utara, 1995), hlm.1.

penduduk dari periode ke periode antara tahun dengan data yang tersedia kemudian dicatat untuk penginterpretasian dan historiografi, sehingga gambaran perubahan penduduk Kabupaten Aceh Utara periode tersebut bisa menggambarkan dengan jelas.

Pertanyaan sebagai pokok pembahasan kajian ini, adalah:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk di Aceh Utara pada kurun waktu 1970-2013.
2. Gambaran perubahan penduduk Kabupaten Aceh Utara dari kurun waktu tahun 1970-2013.

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran perubahan penduduk Aceh Utara antara kurun waktu tahun 1970-2013.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor perubahan penduduk Aceh Utara kurun waktu tahun 1970-2013.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penambahan wawasan kajian sejarah demografi, khususnya gambaran perubahan penduduk di Kabupaten Aceh Utara kurun waktu tahun 1970-2013, di samping itu diharapkan berguna bagi pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan kependudukan sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru di masa mendatang.

Ruang lingkup kajian perubahan penduduk di Kabupaten Aceh Utara dibagi dalam dua masa, yaitu; kurun waktu 1970-1998, dan 1998-2013. Sedangkan kajian temporal penelitian adalah tahun 1970-2013. Tahun 1970 sebagai

gambaran awal perubahan penduduk di Aceh Utara, yaitu; adanya faktor-faktor penyebab perubahan, seperti industrialisasi, urbanisasi maupun transmigrasi dan lain sebagainya. Sedangkan tahun 2013 sebagai batasan pengumpulan sumber (data statistik), dan wawancara terbatas.

Metode penelitian perubahan penduduk Kabupaten Aceh Utara sebagai aspek kajian sejarah demografi, khususnya mengenai perubahan penduduk dari waktu ke waktu pada saat tertentu. Proses penelusuran dan pengumpulan sumber dilakukan untuk meninterpretasi sumber yang dilakukan setelah pengumpulan sumber di lapangan, seperti; Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara di Lhoksukon, Dinas Mobilisasi Penduduk dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara, Dinas Pencatatan Penduduk Sipil Kabupaten Aceh Utara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Utara di Lhokseumawe dan Perpustakaan PPISB Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Kantor Badan Arsip dan Kepustakaan Provinsi Aceh di Banda Aceh.

2. Kajian Teori

Perubahan penduduk pada era industrialisasi di Aceh Utara banyak menjadi garapan peneliti Indonesia, terutama Pusat Studi Ilmu-ilmu Sosial Budaya (PSISB-Unsyiah) di Universitas Syiah Kuala sejak tahun 1970-an sampai tahun 2006, menyangkut industrialisasi di Aceh Utara dan lingkup

permasalahannya. Dalam kajian tersebut diulas perubahan sosial akibat proyek pembangunan di Lhokseumawe, pengaruh proyek industri besar terhadap masyarakat tradisional, seperti migrasi ke Aceh Utara, permasalahan pemukiman baru dari pemindahan penduduk dari daerah yang terkena proyek industri seperti kasus *resettlement* di *gampong* Mbang di Aceh Utara, pola migrasi di daerah industri seperti migrasi orang Gayo ke Aceh Utara, dan peningkatan angka kriminalitas di Aceh Utara, namun sebagian besar merupakan studi kasus dan belum mendalami secara komprehensif sehingga perlu kajian-kajian lain untuk melengkapinya.

Istilah demografi berasal dari bahasa Yunani, *demos* (penduduk), dan *grafein* (menggambar) atau (menulis) yang bisa diartikan sebagai tulisan atau gambaran tentang penduduk. Istilah ini pertama kali digunakan Achille Guillard dalam tulisannya "*Elements de statistique humaine, ou demographie comparee*" atau "*Elements of human statistics or comprative demoghraphy*".¹² Demografi bermanfaat, untuk mempelajari kuantitas, komposisi, dan distribusi penduduk dalam suatu daerah tertentu serta perubahan-perubahannya, yaitu; 1) Menjelaskan pertumbuhan masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang, 2) Mengembangkan hubungan sebab-akibat antara perkembangan penduduk dan bermacam-macam aspek

¹²Iskandar

dalam

<http://affandymuradsite.blogspot.com/2011/11/pertumbuhan-penduduk-dan-faktor.html> diakses 12 November 2013.

pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan dan keamanan, 3) Mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang.

Johann Susmilch (1762), dalam Iskandar (1994) mengatakan; demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan berbagai perubahan umat manusia yang terlihat dari jumlah kelahiran, kematian dan pertumbuhannya. Selanjutnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNO tahun 1958) dan *Multilingual Geographic Dictionary IUSSP* (1982) mendefinisikannya sebagai ilmu tentang penduduk suatu wilayah dari segi jumlah, struktur (komposisi) dan perkembangannya (perubahan). Demografi menekankan kepada tiga 3) fenomena sebagai bagian penting dari perubahan penduduk yaitu; 1) Dinamika kependudukan (*population dynamics*), 2) Komposisi penduduk (*population composition*), dan 3) Jumlah dan distribusi penduduk (*population size and distribution*).¹³

Sejarah demografi membutuhkan perhitungan, namun bukan dalam artian bagaimana menyusun angka-angka, seperti yang digunakan matematika atau fisika, tetapi seiring intensitas pertemuan teori sosial dan ekonomi dalam menjelaskan masa lalu (sejarah), maka perlu mempertimbangkan ukuran-ukuran kuantitas untuk mendukung metodologi penelitian sejarah kuantitatif (*quantitative history*). Peter Burke (2003), menyebutkan metode

¹³ *Ibid.*

penelitian kuantitatif telah dimulai sejak zaman Romawi kuno, ketika sensus-sensus berkala kerajaan dilakukan. Namun di kalangan sejarawan sendiri penggunaan data survei masih *debatable* atau meragui. Ketidaksetujuan itu terkait dengan penggunaan analisis statistik ketika mengkaji perilaku manusia, bahkan sikap dari seorang anggota masyarakat. Namun dalam kajian sejarah kontemporer, wawancara bisa menjadi bagian dari metode statistik. Metode kuantitatif digunakan untuk kajian sejarah dengan memakai praktik analisis isi. Sedangkan ahli kependudukan biasanya meneliti variasi tingkat kelahiran, perkawinan, dan kematian. Wrigley dan R.S.Schofield mengakumulasi rata-rata nasional kelahiran, perkawinan, dan kematian di Inggris dari 1801 sampai pertengahan abad ke-19, dari penelitian ini dapat dilihat naik-turun atau variasi terbatas dari pertumbuhan rata-rata sebelum dan sesudah batasan temporal penelitian yang dilakukan.¹⁴

Menurut Riwanto Trisudarmo, kelemahan dari pendekatan demografi adalah direduksinya penduduk menjadi angka statistik dan dilepaskannya manusia dari konteks sosial-budayanya. Kebijakan yang hanya berdasarkan analisa demografi numerik memiliki konsekuensi yang sangat bernuansa teknokratik. Dalam dimensi teknokratik ini, atribut maupun relasi sosial yang melekat pada individu menjadi variabel yang bisa dipinggirkan. Akibatnya, kepekaan

¹⁴Pandangan Kuantitatif Tosh, dalam
<http://reviewerworks.blogspot.com/2012/06/kuantitasi-dan-makna-dalam-sejarah.html>) diakses 13 November 2013

terhadap komposisi sosial yang menyusun masyarakat tereduksi secara massif dan sistematis. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dihasilkan dari pendekatan ini pun kemudian menyisakan masalah.¹⁵ Ia mengajak untuk mendobrak pakem berpikir dalam keilmuan demografi atau kependudukan yang terpenjara dalam cara berpikir positivistik. Manusia dimaknai sebagai sebuah angka dalam hitung-hitungan demografis dan menafikan atribut sosial-budaya yang inheren dalam eksistensinya. Sesat pikir yang demikian turut menyebabkan pembuatan kebijakan kependudukan yang tidak tepat. Imbas dari kebijakan tersebut tercermin dalam konflik-konflik etnis yang terjadi masa pasca Soeharto di beberapa daerah Indonesia. Konflik-konflik sosial di Indonesia ditengarai tak bisa lepas dari kebijakan kependudukan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang terkait dengan demografi seperti transmigrasi dan mobilisasi digunakan oleh rezim Orde Baru sebagai alat untuk mengkondisikan rekayasa sosial demi pembangunan.

Mobilitas penduduk atau migrasi dalam sistem kebijakan demografi pada waktu itu hanya menitikberatkan pada aspek kuantitatif semata tanpa menghiraukan konteks sosial. Migrasi seharusnya dipahami sebagai suatu perpindahan manusia dengan sistem nilai, ekspresi

¹⁵Riwanto Tirtosudarmo, *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Suharto*, (Jakarta: LIPI kerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm.xi-xxv.

kebudayaan, dan atribut sosial yang khas. Dengan demikian, migrasi dapat disebut juga proses perpindahan kultural.¹⁶

Sayangnya, kebijakan demografi dalam lansekap politik Indonesia bukan hanya berwajah teknokratis semata namun juga dideterminasi oleh kekuasaan. Sejarah mencatat bahwa pemerintah kolonial menggunakan demografi untuk mendongkrak kegiatan ekonomi seperti melakukan migrasi masif penduduk Jawa ke perkebunan Deli. Pada masa itu, migrasi digunakan sebagai sebuah cara untuk menambah jumlah sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan keuntungan. Pada masa Rezim Orde Baru, migrasi penduduk dilakukan untuk menekan ancaman pemberontakan separatistis di wilayah-wilayah luar Jawa, di mana daerah-daerah seperti Papua, Maluku, Aceh, dan Kalimantan merupakan wilayah tujuan transmigrasi pada masa itu. Pemerintah Orde Baru mengharapkan agar kebijakan migrasi di wilayah-wilayah tersebut dapat mempererat integrasi nasional dan merawat legitimasi rezim.¹⁷

Seiring dengan hal tersebut, identitas etnisitas dan variabel *fluid* lainnya seperti kesukuan merupakan sesuatu yang sangat rumit untuk dikuantifikasi. Identitas merupakan konsekuensi dari interaksi, di mana identitas ini bukanlah kategori tunggal yang baku dan solid namun cair dan

¹⁶Bruce Curtis, 2006, *The Politics of Demography*, dalam R.E.Goodwin dan Chasles Tilly, eds, *The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis*, (*The Oxford Handbooks of Political Science*), hlm.54-55.

¹⁷Riwanto Tirtosudarmo, *op.cit*, hlm.31.

“menjadi”. Sayangnya, rezim kepemimpinan politik yang pernah ada cenderung mengabaikan realitas tersebut, di mana rezim tersebut lebih mengutamakan rekayasa sosial dengan berpayung kepada kredo pembangunan.

Oleh karena itu, pembangunan menjadi satu istilah dengan penyeragaman tanpa memperhatikan keragaman (*diversity*). Demografi, dengan demikian bukanlah metode penelitian yang apolitis apalagi netral. Pilihan pendekatan demografi yang digunakan sangat berpengaruh dalam dinamika masyarakat. Lebih lanjut, analisa demografi membutuhkan adanya orientasi keberpihakan pada dimensi kemanusiaan sehingga mampu lebih peka terhadap persoalan sosial. Pembacaan secara kualitatif yang lebih dalam, bisa disertakan dalam analisa demografi agar memunculkan pemahaman terhadap realitas sosial secara komprehensif.¹⁸

3. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Utara

Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang berada di sebelah utara. Berdasarkan peta Bakosurtanal skala 1: 50.000, maka secara geografis Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi 96° 47' – 97° 31' Bujur Timur dan 04° 43' – 05° 16' Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya adalah:

- Sebelah utara : Kota Lhokseumawe/Selat Malaka

¹⁸Yogi Setya Permana, dalam <http://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-nasional/798-sekilas-tentang-politik-demografi.html>, diakses 3 November 2013.

- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur
- Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meuriah
- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen



Gambar Peta Wilayah Kabupaten Aceh Utara setelah pemekaran wilayah (arsiran warna merah)

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara yang tercatat adalah 3.296,86 km², atau 329.686 Ha. Dengan panjang garis pantai 51 km, dan kewenangan kabupaten adalah sampai 4 mil laut, maka luas wilayah laut kewenangan ini adalah 37.744 Ha atau 3.774,4 km.²

Tabel 1
Luas Wilayah Kabupaten Aceh Utara Menurut Kecamatan¹⁹

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase
1	Sawang	384,65	11,67
2	Nisam	42,74	3,48
3	Nisam Antara	84,38	2,56
4	Bandar Baro	42,35	1,28
5	Kuta Makmur	151,32	4,59
6	Simpang Keramat	79,78	2,42
7	Syamtalira Bayu	77,53	2,35
8	Geurudong Pase	269,28	8,17
9	Meurah Mulia	202,57	6,14
10	Matang Kuli	56,94	1,73
11	Paya Bakong	418,32	12,69
12	Pirak Timu	67,70	2,05
13	Cot Girek	189,00	5,73
14	Tanah Jambo Aye	162,98	4,94
15	Langkahan	150,52	4,98
16	Seunuddon	100,63	3,05
17	Baktiya	158,67	4,81
18	Baktiya Barat	83,08	2,52
19	Lhoksukon	243,00	7,37
20	Tanah Luas	30,64	0,93
21	Nibong	44,91	1,36
22	Samudera	43,28	1,31
23	Syamtalira Aron	28,13	0,85

¹⁹ <http://www.acehutara.go.id/hal-geografi.html> diakses 30 Oktober 2013

24	Tanah Pasir	20,38	0,62
25	Lapang	19,27	0,58
26	Muara Batu	33,34	1,01
27	Dewantara	39,47	1,20
Kabupaten		3.296,86	100,00
Sumber Data : Aceh Utara Dalam Angka 2012			

Sejarah perkembangan penduduk di Aceh Utara tidak terlepas dari sejarah perkembangan kerajaan Islam di pesisir timur Sumatera atau bagian paling utara provinsi Aceh, yaitu; berkembangnya pusat kerajaan Samudera Pasai yang terletak di Kecamatan Samudera Geudong. Kerajaan ini diperkirakan ada sejak abad ke-13, yang merupakan tempat pertama kehadiran agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Namun, kerajaan-kerajaan Islam ini mengalami pasang surut, ketika zaman kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kedatangan Portugis ke Malaka pada tahun 1511 sehingga 10 tahun kemudian Samudera Pasai turut diduduki. Setelah itu terjadi penaklukan dari kerajaan Aceh hingga masa penjajahan Belanda.

Setelah secara *de facto* menguasai Aceh pada tahun 1904, Belanda dapat menguasai benteng pertahanan terakhir pejuang Aceh Kuta Glee Batee Iliak, Samalanga di Bireuen. Berdasarkan Surat Keputusan *Van der Gouvernement Generaal van Nederland Indie* tanggal 7 September 1934, Pemerintah Hindia Belanda membagi daerah Aceh atas 6 (enam) *afdeeling* (kabupaten) yang dipimpin seorang *asistent resident*, salah satunya adalah *Afdeeling Noord Kust van Atjeh* (Kabupaten Aceh Utara) yang meliputi Aceh Utara sekarang ditambah

Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie (sekarang Kabupaten Pidie Jaya).²⁰

Afdeeling Noord Kust van Atjeh dibagi dalam 3 (tiga) *Onderafdeelingen* (Kewedanaan) yang dikepalai seorang *Countroleur* (Wedana), yaitu :

1. *Onderafdeeling Bireuen*
2. *Onderafdeeling Lhokseumawe*
3. *Onderafdeeling Lhoksukon*

Selain *Onderafdeeling* tersebut terdapat juga beberapa daerah *Uleebalang* (*Zelfbestuur*) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya, yaitu; *Uleebalang* Keureutoe, Geurugok, Jeumpa, dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik. Namun, pada masa pendudukan Jepang istilah *afdeeling* diganti dengan *bun*, *onderafdeeling* disebut *gun*, *zelfbestuur* disebut *sun*, *mukim* disebut *kun*, dan *gampong* disebut *kumi*.

Sesudah Indonesia diproklamirkan sebagai negara merdeka, Aceh Utara disebut *luhak* yang dikepalai oleh seorang Kepala *Luhak* sampai dengan tahun 1949. Melalui Konferensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Salah satunya Negara Bagian Sumatera Timur dan tokoh-tokoh Aceh saat itu tidak mengakui, dan tidak tunduk

²⁰Monografi Aceh Utara Tahun 1986, (Aceh Utara: BPS dan BAPPEDA Aceh Utara).

pada RIS, tetapi tetap tunduk kepada Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlaku Undang Undang Sementara 1950 seluruh negara bagian bergabung dan statusnya berubah menjadi provinsi. Aceh yang pada saat itu bukan negara bagian, digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom setingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, terbentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara yang juga termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Keberadaan Aceh di bawah Provinsi Sumatera Utara menimbulkan rasa tidak puas pada para tokoh Aceh yang menuntut agar Aceh tetap berdiri sendiri sebagai provinsi dan tidak berada di bawah Sumatera Utara. Ide ini kurang didukung oleh sebagian masyarakat Aceh terutama yang berada di luar Aceh. Keadaan ini menimbulkan kemarahan tokoh Aceh dan memicu terjadinya pemberontakan DI/TII pada tahun 1953.

Pemberontakan ini baru padam setelah kedatangan Wakil Perdana Menteri Mr.Hardi ke Aceh yang dikenal dengan Missi Hardi, dan kemudian menghasilkan Daerah Istimewa Aceh. Dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/ Missi / 1957, lahirlah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan sendirinya Kabupaten Aceh Utara masuk dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Undang Undang Nomor I tahun 1957 dan

Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1959. Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terbagi dalam 3 (tiga) Kewedanaan, yaitu :

1. Kewedanaan Bireuen terdiri atas 7 kecamatan
2. Kewedanaan Lhokseumawe terdiri atas 8 Kecamatan
3. Kewedanaan Lhoksukon terdiri atas 8 kecamatan

Dua tahun kemudian keluar Undang Undang Nomor 18 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU tersebut wilayah kewedanaan dihapuskan dan wilayah kecamatan langsung di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 07 / SK / 11 / Des/ 1969 tanggal 6 Juni 1969, wilayah bekas kewedanaan Bireuen ditetapkan menjadi daerah perwakilan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang dikepalai seorang kepala perwakilan yang kini sudah menjadi Kabupaten Bireun. Hampir dua dasawarsa kemudian dikeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebutan Kepala Perwakilan diganti dengan Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sehingga daerah perwakilan Bireuen berubah menjadi Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara di Bireuen.

Dengan perkembangan yang semakin pesat, Kabupaten Aceh Utara sehingga pada tahun 1986 dibentuklah Kotif (Kota Administratif) Lhokseumawe dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1986 yang membawahi 5 kecamatan. Berdasarkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 136.21-526 tanggal 24 Juni 1988 tentang pembentukan wilayah kerja pembantu Bupati Pidie dan Pembantu Bupati Aceh Utara dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka terbentuklah Pembantu Bupati Aceh Utara di Lhoksukon, sehingga Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 2 Pembantu Bupati, 1 kota administratif, 26 wilayah kecamatan, yaitu 23 kecamatan yang sudah ada ditambah dengan 3 kecamatan pemekaran baru. Sebagai penjabaran dari UU nomor 5 tahun 1974 pasal 11 yang menegaskan bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada daerah tingkat II maka pemerintah melaksanakan proyek percontohan otonomi daerah. Aceh Utara ditunjuk sebagai daerah tingkat II percontohan otonomi daerah. Pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri atas 26 Kecamatan dimekarkan lagi menjadi 30 kecamatan, dengan menambah empat kecamatan baru berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999.

Seiring dengan pemekaran kecamatan baru tersebut, Aceh Utara harus melepaskan hampir sepertiga wilayahnya untuk menjadi kabupaten baru, yaitu; Kabupaten Bireuen yang dibentuk berdasarkan Undang Undang nomor 48 tahun 1999 dengan wilayah mencakup bekas wilayah Pembantu Bupati di Bireuen. Pada Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat dijadikan Kota Lhokseumawe.

Sistem pemerintahan di Kabupaten Aceh Utara hampir sama dengan Aceh lainnya disesuaikan dengan dinamika

kultur yang dianut dan perkembangan sejarah. Pemerintahan terendah adalah *Keuchik* (kepala *gampong*/desa) dengan perangkat kerja *Tuha Peuet* dan *Tuha Lapan*. Sebelumnya perubahan politik di tingkat nasional pada tahun 1946, sebelumnya kepala kampung disebut *peutua*. Setingkat di atasnya disebut *Mukim* yang dikepalai oleh *Imuem Mukim* yang mengepalai beberapa *gampong*. Sejak berlaku Undang-Undang No.5 Tahun 1979, keberadaan *mukim* tidak diakui lagi. Namun, berdasarkan UU No. 8 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) lembaga Mukim dimasukkan kembali dalam sistem Pemerintahan Aceh. Pengakuan lembaga mukim tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diatur dalam Bab tersendiri yang semakin memperjelas keberadaan Mukim sampai saat ini

4. Perubahan Penduduk Aceh Utara Tahun 1970--2013

4.1. Faktor Penyebab Perubahan Penduduk Kabupaten Aceh Utara

Perkembangan penduduk di Aceh Utara tidak dapat dipisahkan dari potensi geografis dan perkembangan sosial budayanya. Secara geografis daerah ini terletak di utara provinsi Aceh. Letaknya di jalur yang strategis, baik darat, laut dan udara. Kabupaten ini sangat potensial di bidang perdagangan dan peradaban. Daerahnya beriklim tropis dengan segala kekayaan alamnya. Penduduk asli terdiri dari orang Pase yang merupakan bagian dari etnis Aceh, selain itu

juga banyak pendatang dari sekitar Aceh lainnya. Ciri hanya bisa dilihat dari penekan bahasa dan dialeknya. Perbedaan dalam nilai-nilai kesopanan antara orang Pase, Peusangan, dan Pidie serta pendatang lainnya.

Faktor perubahan penduduk di Aceh Utara tidak dapat dipisahkan adanya transmigrasi nasional sejak tahun 1970-an. Hal ini juga hampir bersamaan dengan peresmian pabrik gula Cot Girek pada tahun 1970. Di samping itu, pada saat yang hampir bersamaan ditemukan sumur gas Pertamina di Arun pada tahun 1971.

Transmigrasi nasional telah dimulai di Aceh Utara sejak tahun 1973 dengan adanya pembukaan Unit Penempatan Transmigrasi pada tahun 1976 sekitar 300 KK transmigran dari Jawa ditempatkan di Cot Girek. Jumlah transmigran di Aceh sebelum terjadi konflik mencapai sekitar 40.705 KK atau 200 ribu jiwa. Namun pada saat terjadi konflik telah mengakibatkan jumlah transmigran berkurang menjadi 25.682 KK atau sekitar 130 ribu jiwa.²¹ Setelah *MoU* Helsinki ternyata jumlah transmigran yang ada di Aceh tetap tidak bertambah.

Selain itu, eksploitasi sumber gas alam juga menyebabkan banyak terjadinya perubahan pada struktur penduduk di beberapa lokasi pembangunan gas, baik karena pembebasan lahan untuk eksploitasi maupun pembangunan sarana dan prasarana kilang gas. Kilang gas yang dibangun

²¹ <http://www.aceh.tribunnews.com>, diakses tanggal 30 Oktober 2012.

meliputi luas 271 Ha. Pembangunan industri proyek Arun I (*train* 1, 2, dan 3) sejak tahun 1974-1978, dan awal tahun 1981. Selanjutnya dibangun kilang Arun proyek II (*train* 4 dan 5) pada tahun 1982 dan diresmikan oleh presiden Suharto pada tanggal 18 Januari 1984. Selanjutnya adalah pembangunan Arun proyek III (*train* 6) yang dibangun pada pertengahan 1986. Pada tahun 1990 sampai 1993 kapasitas PT.Arun LNG terus ditingkatkan dan selanjutnya beberapa sumber gas baru juga dikembangkan di Lhoksukon dan Pase sehingga bisa memenuhi kontrak sampai awal tahun 2005.²²

Pembangunan industri lainnya, seperti *Pupuk Iskandar Muda* (PIM) di Krueng Geukuh yang didirikan sejak 22 Februari tahun 1982. Pembangunan ini dirintis oleh PT. *Pupuk Sriwijaya* pada tahun 1981, yang didukung oleh bahan baku utama gas dan air. PT. *Pupuk Iskandar Muda* beroperasi secara komersial sejak tahun 1 April 1985 dengan karyawan sebanyak 1.128 orang. Selain itu, juga dibangun PT.*Asean Aceh Fertilizer* atau lebih dikenal dengan pabrik pupuk ASEAN sejak tahun 12 April 1979, dengan luas lahan 307 Ha yang merupakan join modal antara pemerintah Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. PT.*Asean Aceh Fertilizer* mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Januari 1984, dengan jumlah karyawan 758 orang.

Akibat faktor-faktor perkembangan industri di kabupaten Aceh Utara mengakibatkan terjadinya

²²Dinas Informasi dan Komunikasi, *Aceh Utara: Dari Samudera Pasai ke Era Industrialisasi*, (Lhokseumawe: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, hlm.164-168.

permasalahan sosial, di mana terjadi permasalahan kependudukan menyangkut kesenjangan pendapatan, kepincangan bidang kesempatan/usaha, konflik pemanfaatan sumber, polusi dan pencemaran lingkungan, meningkatnya arus urbanisasi, *enclove* pemukiman, perubahan perilaku, nilai-nilai dalam masyarakat. Urbanisasi mengakibatkan adanya perbedaan siap dan perilaku pendatang dengan penduduk setempat.

Kehadiran pendatang yang terdiri atas tenaga-tenaga ahli dari berbagai daerah yang bekerja di industri dengan gaji yang besar, kehidupannya berlebih-lebihan menimbulkan kesenjangan dan kecemburuan sosial dan antipati terhadap penduduk pendatang serta terjadi perbedaan kelas yang tajam dalam masyarakat.²³ Akibat perkembangan Kabupaten Aceh Utara yang luar biasa kota Lhokseumawe ditetapkan sebagai kota administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986, yang diresmikan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Agustus 1987, dengan wilayah mencakup 5 kecamatan dan kedudukan kota administratif Lhokseumawe mempunyai arti penting sebagai pusat pemerintahan kabupaten Aceh Utara dan pusat pemerintahan kotamadya administratif Lhokseumawe.

Saat itu pembangunan Lhokseumawe semakin bertambah pesat seiring dengan pembangunan industri antara lain pembangunan dan perluasan jalan yang menghubungkan pusat industri di Krueng Geukuh dengan Kota Lhokseumawe

²³Wawancara dengan Kepala BPS Kabupaten Aceh Utara, di Lhoksukon tanggal 23 November 2013

sejauh 14 km, serta perluasan jalan arteri yang menghubungkan Banda Aceh-medan dan jalan-jalan di kota Lhokseumawe. Pembangunan jalan ini banyak menyentuh kepentingan penduduk Aceh Utara di mana transportasi antara *gampong-gampong* dengan Lhokseumawe bertambah lancar.

Di samping itu, di kota Lhokseumawe juga mulai dibangun Rumah Sakit tipe D, kantor-kantor pemerintah berbagai instansi vertikal, kantor departemen, dinas, bank-bank milik negara dan swasta (BI, BNI 46, BRI, BBD, BDN, BPD, *Exim Bank*), hotel-hotel, dan supermarket. Pertumbuhan pembangunan ini juga berimplikasi kepada pertumbuhan dan kepadatan penduduk.

Pertumbuhan penduduk di ibukota Aceh Utara saat itu mencapai 4-5% pertahun, dan lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk kabupaten Aceh Utara sebesar 3% pertahun. Pertumbuhan penduduk ini disebabkan meningkatnya arus urbanisasi dari daerah sekitarnya dan daerah di luar kabupaten ke Aceh Utara. Perpindahan penduduk dari *gampong* ke kota saat itu merupakan faktor utama yang mendorong pesatnya pertumbuhan kota. Berdiamnya kelompok-kelompok urban di kota akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan secara alami.²⁴

²⁴Chris Manning dalam *Peningkatan Angka Kriminalitas di Lhokseumawe*, (Unsyiah: PSISB,1990), hlm.4.

4.2. Perubahan Penduduk Kabupaten Aceh Utara Masa Orde Baru dan Era Industrialisasi (1970-1998)

Berdasarkan sensus penduduk tahun 1961, penduduk provinsi Aceh seluruhnya berjumlah 1.628.983 jiwa.²⁵ Pada saat itu, kabupaten Aceh Timur merupakan kabupaten paling banyak penduduknya di provinsi Aceh.

Tabel 2
Penduduk Provinsi Aceh Tahun 1961 (Sensus Penduduk Indonesia Tahun 1961).

Penduduk Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (jiwa)
Banda Aceh	22.494	17.573
Pidie	79.357	76.610
Aceh Utara	124.734	134.839
Aceh Timur	125.296	192.178
Aceh Tengah	84.793	86.432
Aceh Barat	96.720	88.607
Aceh Selatan	97.231	98.623
Jumlah Penduduk	922.102	808.881
Jumlah penduduk L+P	1.628.983	

Pada tahun 1960-an, kepadatan penduduk Aceh hanya sekitar 25 orang/km², di mana keadaan ini tentu berbeda

²⁵ Teuku Syamsuddin, *Kebudayaan Aceh, dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hlm.233.

apabila pertambahan penduduk setiap km² sebanyak 310 orang.²⁶ Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 1971 jumlah penduduk provinsi Aceh naik menjadi 2.009.000, jiwa. Kenaikan penduduk diperkirakan berkisar 2,4% setiap tahun. Pada saat itu, tidak semua daerah di provinsi Aceh sama padat penduduknya. Hanya beberapa daerah yang mempunyai kepadatan penduduk sesuai dengan luas daerahnya, yaitu pantai timur Sumatera, khususnya kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. Sedangkan di daerah pedalaman, dan pantai barat masih sedikit didiami penduduk. Hal ini menjadi faktor yang penting bagi pertumbuhan pembangunan di daerah-daerah tersebut.

Ketidakmerataan penduduk di provinsi Aceh pada saat itu ditenggarai sebagai faktor utama terhambatnya pembangunan di segala bidang secara komprehensif. Di samping itu, faktor komunikasi dan apatisme dari masyarakat itu sendiri. Perbedaan kepadatan antara pantai timur Aceh dengan pedalaman dan pantai barat Aceh terlihat dari sistem transportasi yang lebih baik. Di pesisir timur Aceh, jalur kereta api, sebagai sarana transportasi umum telah dibangun sejak masa Belanda pada pertengahan abad ke-19, meski keadaannya tidak semakin membaik. Selain itu, sistem komunikasi yang buruk saat itu juga menyebabkan hilangnya kegairahan penduduk untuk terus-menerus menetap di suatu tempat, sehingga mengakibatkan kepadatan penduduk tidak merata di seluruh kabupaten di Aceh.

²⁶ Saat itu di Jawa dan Madura kepadatan penduduknya 477/km², *ibid*, hlm.234.

Perubahan penduduk di Aceh Utara secara alamiah terus terjadi secara normal, namun permasalahan penduduk dan sumber daya manusia terlihat ketika memasuki era industrialisasi di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1970-an. Kekurangan tenaga kerja merupakan salah satu penyebab pemerintah dan swasta tidak dapat maksimal menjalankan pembangunannya. Hal itu terlihat ketika pendirian salah satu pabrik gula di Cot Girek kabupaten Aceh Utara yang diresmikan oleh Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX, kemudian mengalami kemacetan sejak tahun 1985-an karena kekurangan tenaga kerja. Pada masa ini masih banyak lahan pertanian yang dibiarkan terbengkalai termasuk persawahan.

Sebelum pelaksanaan program transmigrasi sejak tahun 1976, Kabupaten Aceh Utara yang memiliki luas daerah mencapai 5.100.01 km². Jumlah penduduk kabupaten ini pada tahun 1973 telah mencapai angka 482.426 jiwa, yang tersebar di 23 kecamatan.²⁷ Adanya proyek pembangunan industri pencairan gas alam (LNG) di Lhokseumawe setelah ditemukan sumber gas alam di Aron dan kemudian pembukaan Blang Lancang (Mukim Paloh) pada tahun 1975, mengakibatkan adanya perpindahan penduduk dari lokasi yang terkena proyek Arun Aceh Utara dengan *resettlement* ke

²⁷Kedadaan penduduk Kabupaten Aceh Utara akhir tahun 1973, Kantor Sensus Statistik Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe. Jumlah penduduk menurut Daftar Statistik PPD TK II Aceh Utara (Agustus 1976), 538.935 jiwa. Lihat juga lampiran berita acara No.01/A.1/VIII/1976, tentang penghitungan jumlah penduduk WNRI, Daerah Istimewa Aceh.

Mbang, dan pembangunan lapangan terbang di Muara Batu dan Aron. Sejak tahun 1973/1973 ada sekitar 3.197 yang direlokasi dari 7 (tujuh) *gampong*/desa. *Resettlement* Mbang direncanakan pada saat itu menjadi 1.119 KK dengan asumsi 960 KK yang berasal dari Arun dan Tanah Luas serta penduduk asli 159 KK. Hingga tahun anggaran 1979/1980 hanya sekitar 240 rumah yang berhasil dibangun pemerintah. Hal ini adalah akibat sarana prasarana transportasi kurang lancar sehingga akses antar daerah belum terkoneksi dengan baik.

Menurut data statistik yang diperoleh, pada tahun 1979 penduduk Aceh Utara berjumlah 578.452 jiwa.²⁸ Pertumbuhan penduduk di kabupaten ini akibat dimulainya berjalan program transmigrasi nasional dan proyek pembangunan sarana dan prasarana di lokasi proyek dan lokasi penempatan transmigrasi di beberapa lokasi yang baru. Selain itu, juga pembangunan lokasi perkampungan baru untuk penduduk yang terkena pembebasan lahan proyek Arun. Sedangkan pada tahun 1980 penduduk kabupaten Aceh Utara menjadi 625.296 jiwa.²⁹ Saat itu, kabupaten Aceh Utara adalah kabupaten yang paling padat dan banyak penduduknya di provinsi Aceh.

Pada tahun 1983, menurut data yang ada disebutkan jumlah penduduk Aceh Utara menjadi 663.630 jiwa. Menurut

²⁸ Gubernur Aceh, *Aceh Dalam Angka*, (Banda Aceh: Humas Pemda 1979).

²⁹ Kantor Statistik Provinsi D.I.Aceh, 1980.

Abdullah Ali, pertumbuhan penduduk yang sangat tertinggi terjadi di kecamatan Muara Dua, Kota Makmur, dan Dewantara. Di mana perubahan peningkatan jumlah penduduk setelah tahun 1971 naik menjadi 300%.³⁰ Angka laju pertumbuhan penduduk pertahun mencapai angka 21,4%. Hal ini merupakan perubahan dan pertumbuhan yang cukup besar sebagai dari indikasi adanya pertambahan penduduk akibat banyaknya migrasi ke daerah tersebut dalam kurun waktu itu. Sedangkan pada tahun 1984, jumlah penduduk kabupaten Aceh Utara sejumlah 493.251 jiwa, dengan laju pertumbuhan yang cenderung menurun, yaitu menjadi 1,25%.

Di ibukota Aceh Utara pertumbuhan penduduk pada tahun 1988 melebihi rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Utara 102 jiwa/km². Sedangkan di daerah pusat industrialisasi, seperti kecamatan Banda Sakti, Dewantara, Muara Batu, Syamtalira Bayu dan Muara Dua dengan jumlah penduduknya mencapai 156.787 jiwa dengan rata-rata kepadatan mencapai 149 jiwa/km². Tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun tersebut cukup tinggi, yaitu sekitar 4,9% per tahun, lebih tinggi daripada pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Utara, yaitu sekitar 3% per tahun. Peningkatan ini adalah akibat dari meningkatnya urbanisasi, baik dari daerah sekitar Aceh Utara maupun pendatang dari luar daerah.

Perbandingan komposisi penduduk saat itu sekitar 45% penduduk asli Lhokseumawe, 35% berasal dari luar

³⁰ Abdullah Ali, 1984, dalam *Ibid*, hlm:41

Lhokseumawe, dan 20% berasal dari luar Aceh Utara dan provinsi Aceh. Namun, jika dibandingkan tingkat pertumbuhan penduduk antarkecamatan yang merupakan basis industri, yaitu kecamatan Dewantara dengan kecamatan Muara Dua yang tidak mempunyai industri, justru lebih tinggi pertumbuhan penduduk di Kecamatan Muara Dua, yaitu 4,7%.³¹

Pada tahun 1990 hingga 1994, dari lima (5) proyek vital, yaitu Mobil Oil, PT Arun, PT PIM, PT AAF, dan PT KKA di Kabupaten Aceh Utara menunjukkan kegemilangannya. Di tahun-tahun tersebut produksi 5 (lima) perusahaan berskala nasional, menunjukkan angka produktivitas yang sangat meningkat. Ketika itu, di sepanjang jalan terlihat bus-bus angkutan karyawan lalu-lalang di jalan raya antara Bireuen hingga Lhoksukon. Aktivitas kendaraan tersebut, selain menjemput karyawan yang pulang-pergi, juga mengantar para perempuan yang berbelanja di kota Lhokseumawe.³²

Pusat-pusat perbelanjaan atau supermarket di Lhokseumawe penuh keramaian dengan aktivitas jual-beli. Pemandangan seperti itu, seakan mampu menurunkan temperatur kota yang bertemperatur panas. Peredaran uang di Aceh Utara khususnya di kawasan pesisir utara pantai timur Aceh saat itu cukup besar. Kota Lhokseumawe dan sekitarnya

³¹ Kantor Statistik Aceh Utara, 1988.

³²Lihat pernyataan ini dalam http://razuardi.blogspot.com/2013_01_01_archive.html, diakses 10 November 2013.

yang dekat dengan pusat industrialisasi menyandang gelar "*Kota Petrodollar*". Julukan ini ternyata mampu menarik perhatian para pencari kerja di seluruh Aceh, bahkan Indonesia pada saat itu. Ketika itu, masyarakat Aceh pun lebih sering mendengar dan membaca mengenai kota industri Lhokseumawe, dibandingkan ibukota provinsi Banda Aceh yang ketika itu hanya berperan sebagai ibukota pemerintahan. Perubahan penduduk di Kabupaten Aceh Utara sangat besar dan memiliki jumlah penduduk sepertiga dari keseluruhan penduduk Aceh pada masa-masa itu.³³

Setiap malam perayaan Tahun Baru ketika di era industri antara tahun 1990-1993-an itu, penuh dengan hiburan rakyat yang dibiayai lima proyek vital tersebut di se-antero Kota Lhokseumawe. Artis-artis ibukota pun bergiliran menghibur kawasan Zona Industri Lhokseumawe (ZILS). Pimpinan *PT Asean Aceh Fertilizer*, Rahman Subandi, *PT Arun Wicaksono*, dan *PT PIM*, Djarot, mengakomodasi hak-hak karyawan dan masyarakat di lingkungan perusahaan masing-masing ketika itu. Nama-nama mereka pun menjadi seperti selebritis di kawasan Lhokseumawe pada masa itu.³⁴

Pada tahun 1993 penduduk Kabupaten Aceh Utara berjumlah 433.445 jiwa. Kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Lhoksukon dengan jumlah penduduk

³³ *Ibid*, diakses 10 November 2013.

³⁴ *Ibid* dalam http://razuardi.blogspot.com/2013_01_01_archive.html, diakses 10 November 2013.

35.817 jiwa. Saat itu situasi Aceh Utara mulai menunjukkan adanya peningkatan angka kriminalitas yang tinggi. Selain itu, gangguan keamanan juga mulai merambah Aceh Utara.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Aceh Utara Tahun 1993.³⁵

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Sawang	25.751
2	Nisam	31.115
3	Kuta Makmur	19.085
4	Simpang Keramat	8.133
5	Syamtalira Bayu	18.678
6	Meurah Mulia	15.972
7	Matangkuli	21.306
8	Payabakong	10.368
9	Tanahluas	17.984
10	Nibong	8.043
11	Samudera	18.092
12	Syamtalira Aron	13.532
13	Tanah Pasir	12.671
14	Lhoksukon	35.817
15	Baktiya	30.246
16	Baktiya Barat	14.006
17	Tanah Jambo Aye	30.621
18	Langkahan	16.587
19	Seunuddon	16.619

³⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, 2004.

20	Cot Girek	20.744
21	Muarabatu	16.240
22	Dewantara	31.844
Jumlah Total Penduduk		433.445

Setelah terjadi peristiwa perampokan terhadap bank BCA di Lhokseumawe pada tahun 1997, sejak saat itu situasi dan kondisi keamanan di Aceh Utara mulai terganggu. Hal ini diperparah dengan merebaknya pelanggaran HAM saat penerapan Daerah Operasi Militer, seperti yang terungkap pada tahun 1998. Setelah itu, isu referendum pun juga menguat di Aceh Utara. Pada saat yang bersamaan, aparat keamanan terus memburu kelompok Ahmad Kandang (pentolan GAM) yang berbuntut gangguan keamanan di tengah penduduk sampai dengan diberlakukannya Operasi Wibawa tahun 1999. Dampak dari tuntutan referendum, penguatan GAM, dan eskalasi konflik sehingga lahirnya operasi militer dan gangguan keamanan ini juga berpengaruh terhadap dinamika dan laju pertumbuhan penduduk pada periode selanjutnya di kabupaten ini.

4.3. Perubahan Penduduk Kabupaten Aceh Utara Pada Masa Reformasi dan Era Otonomi Khusus (1998-2013)

Setelah penarikan DOM (Daerah Operasi Militer) pada paruh akhir tahun 1998, dan penegakan Operasi Wibawa tahun 1999. Dua tahun kemudian, penduduk kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km², dan terdiri

atas 27 kecamatan, penduduknya masih sebanyak 549.370 jiwa.³⁶ Ketika eskalasi konflik meningkat di Aceh Utara sejak tahun 2000, banyak penduduk yang terkena efek tersebut. Hampir semua aktivitas terganggu meskipun tidak mengalami stagnasi. Di sisi lain penduduk yang padat juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan di Aceh Utara. Kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Utara justru memiliki keunikan dan kelebihan apabila disejajarkan dengan daerah lain di provinsi Aceh.

Di tengah jumlah penduduk kabupaten Aceh Utara yang rata-ratanya sekitar 184/km², juga mempengaruhi tingkat kemajuan dan potensi pendidikan Kabupaten Aceh Utara. Gambaran tingkatan pendidikan di Aceh Utara ketika eskalasi konflik meningkat pada tahun 2000. Di mana terdapat penduduk Aceh Utara, yaitu sekitar 13.495 jiwa tidak/belum pernah sekolah. Di antaranya 108.181 orang tamat SD, tamat SD sebanyak 210.044 orang, tamat SLTP sebanyak 163.028, tamat SLTA sebanyak 114.692 orang, tamat diploma I dan II sebanyak 10.476 orang, tamat diploma III sebanyak 4.665, dan sarjana (S-1) sebanyak 2.794 jiwa. Menurut profil pendidikan pada tahun 2000/2001, penduduk usia kerja di Aceh Utara yang bekerja sebanyak 33.923 orang. Sedangkan penduduk yang sedang mencari pekerjaan sebanyak 13.410 orang. Penduduk yang bukan pencari pekerjaan sebesar 185.664 orang. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Aceh Utara pada saat itu sebanyak 232.997 orang.

³⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, 2001.

Penduduk bukan angkatan kerja, terdiri atas: 1) jumlah penduduk bersekolah 206.033, 2) jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga 118.853 orang, 3) lain-lain sebanyak 90.360 orang, sehingga jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah 415.246 orang. Sedangkan jumlah penduduk miskin sangat besar dan diperkirakan sekitar 60% dari jumlah penduduknya.³⁷

Ketika konflik mulai meningkat ekskalasinya sejak tahun 1999, hal ini menampakkan gejalanya pada tahun 2004. Perubahan penduduk di beberapa kecamatan ada yang mengalami minus, yaitu di kecamatan Kuta Makmur menjadi -0,22%, Simpang Keramat -1,92%, dan Cot Girek -1,62%.³⁸ Penurunan laju ini terjadi akibat adanya eksodus dari keluarga transmigran ke daerah lain di provinsi Aceh maupun luar Aceh karena eskalasi konflik Aceh.

Setelah adanya perdamaian antara GAM dan NKRI pada tanggal 15 Agustus 2005, situasi dan kondisi keamanan di Aceh Utara semakin bertambah pulih. Eksodus dari kabupaten Aceh Utara yang sebelumnya mengungsi ke luar daerah, provinsi, bahkan luar negeri, telah mulai kembali ke sana. Hingga tahun 2010, jumlah penduduk/*population* di Aceh Utara menjadi sejumlah 529.751 jiwa, yang terdiri atas 122.825 Kepala Keluarga (KK), dengan kepadatan penduduk (*density*) sebanyak 161 (jiwa/km), dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan penduduk setiap tahunnya.

³⁷*Ibid*, hlm.64.

³⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, 2004.

Data pada tahun 2010, menggambarkan bahwa kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Lhoksukon, dengan jumlah penduduk 43.998 jiwa, dan rumah tangga 10.407 KK. Hingga pada awal tahun 2011, kecamatan ini juga masih termasuk penduduk yang terpadat di Aceh Utara dengan jumlah 45.472 jiwa, dan jumlah rumah tangga sebesar 10.671 KK, yang menempati wilayah seluas 3.296,86 km. Saat itu, tingkat kepadatan penduduk Aceh Utara, yang terdiri atas 27 kecamatan mencapai 541.878 jiwa, dengan wilayah seluas 3.296,86 km, sementara untuk kepadatan penduduk *density* (jiwa/km) telah mencapai 164 jiwa/km² dan jumlah rumah tangga 125.637 KK.³⁹

Pada tahun 2012 penduduk kabupaten Aceh Utara telah mencapai angka 541.878 jiwa.⁴⁰ Sedangkan jumlah penduduk kabupaten ini pada awal Februari 2013, sebagaimana data yang terhimpun dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah berjumlah 592.204 jiwa, yaitu sebanyak 296.186 penduduk laki-laki, dan 296.018 penduduk perempuan. Sedangkan luas wilayahnya 3.296,86 km². Kepadatan penduduk kabupaten ini saat ini telah mencapai 179 jiwa/km². Di mana kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Dewantara dengan jumlah 49.996 jiwa/km². Sedangkan jumlah dan kepadatan penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Geureudong Pase sejumlah 5.315 jiwa dengan 19,7 jiwa/km². Bila dilihat dari posisi

³⁹ Badan Pusat Statistik Aceh Utara, 2011

⁴⁰ BPS Kabupaten Aceh Utara, 2011.

kepadatan, terlihat gambaran bahwa kecamatan-kecamatan di sekitar pusat keramaian terutama di sentral wilayah atau di sekitar jalan nasional Banda Aceh-Medan cenderung memiliki perubahan jumlah dan kepadatan penduduknya yang lebih besar dibandingkan di kecamatan-kecamatan lainnya di pelosok Kabupaten Aceh Utara.

Penduduk kabupaten Aceh Utara menurut kelompok umur tergambar dengan komposisi, sebagai berikut, yaitu 33 % berada pada usia 0 - 14 tahun, 63 % pada usia 15-64 tahun, hanya dan 4 % yang berusia 65 tahun ke atas. Berdasarkan komposisi kependudukan tersebut, penduduk Kabupaten Aceh Utara tergolong ke dalam kelompok ekspansif karena sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia muda. Adapun rincian berdasarkan kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel 4.
Penduduk Kabupaten Aceh Utara Menurut Kelompok Umur
Tahun 2012.⁴¹

No	Struktur Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	18,634	17,350	35,984
2	5-9	30,900	28,774	59,674
3	10-14	32,012	30,575	62,587
4	15-19	29,278	28,025	57,303
5	20-24	31,830	31,477	63,307

⁴¹ <http://www.acehutama.go.id/hal-demografi.html> diakses 20 Oktober 2013.

6	25-29	30,492	32,217	62,709
7	30-34	26,225	27,155	53,380
8	35-39	21,981	22,225	44,206
9	40-44	19,198	18,987	38,185
10	45-49	14,439	14,957	29,396
11	50-54	12,761	12,788	25,549
12	55-59	9,496	9,086	18,582
13	60-64	6,738	7,148	13,886
14	65-69	4,145	5,431	9,576
15	70-74	3,944	4,838	8,782
16	>75	4,113	4,985	9,098
TOTAL		296,186	296,018	592,204

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara

Sedangkan berdasarkan data terakhir yang diperoleh tahun 2013 penduduk Kabupaten Aceh Utara telah mencapai 607.613 jiwa. Hal ini berarti dalam setahun penduduk sudah bertambah sebanyak 65.735 jiwa, dan ini merupakan tantangan dan modal bagi pembangunan Aceh Utara di masa mendatang.⁴² Di sisi lain, pada tahun 2013, kabupaten Aceh Utara menyumbang jumlah pengangguran terbanyak di provinsi Aceh, yaitu mencapai angka 17,97%.⁴³

⁴²BPS Kabupaten Aceh Utara 2013 dan Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.

⁴³http://portal.radioantero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1939:bps--pengangguran-tertinggi-terdapat-di-kabupaten-aceh-utara&catid=46:ap&Itemid=82, diakses tanggal 6 November 2013.

5. Penutup

5.1. Simpulan

Gambaran perubahan penduduk di Kabupaten Aceh Utara yang terlihat dari waktu ke waktu, yaitu antara kurun 1970-2013 menunjukkan adanya faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penduduk, terutama di beberapa kecamatan menjadi sangat *signifikan* karena beberapa hal, di antaranya: industrialisasi, urbanisasi, transmigrasi, *resettlement* penduduk yang terkena proyek industri, dan konflik.

Perubahan penduduk di Aceh Utara menunjukkan gambaran bahwa ketika terjadinya era industrialisasi, terlihat laju pertumbuhan penduduk yang luar biasa tinggi di daerah-daerah di sekitar basis industri. Namun ketika konflik terjadi, penurunan jumlah penduduk di kecamatan-kecamatan yang merupakan basis transmigrasi dan pedalaman Aceh Utara.

5.2. Saran

Setiap kebijakan menyangkut pembangunan yang berdampak kepada perubahan lingkungan masyarakat, pemerintah harus benar-benar mengkaji terlebih dulu efek sosial budaya, ekonomi, politik yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut sehingga bisa meminimalisasi permasalahan serupa di masa mendatang.

Dinamika Politik di Aceh Utara (1970an - 2009)**Agung Suryo Setyantoro****1. Pendahuluan**

Sebagai Negara yang sejak pertama kali diprakarsai sebagai Negara demokratis, Indonesia telah memiliki pengalaman beberapa kali pemilu. Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta tanggal 17 Agustus 1945, pemilu diselenggarakan baru 10 kali termasuk pemilu yang dipercepat pada tahun 1999 yang tenggang waktu dengan pemilu sebelumnya hanya dua tahun. Dari beberapa kali pemilu itu, penyelenggaraannya belum teragenda secara berkala dan teratur. Ada periode di mana Indonesia sama sekali tidak menyelenggarakan pemilu lima tahun sekali. Pemilu pertama misalnya baru terselenggara tahun 1955, sepuluh tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Padahal maklumat Wakil Presiden RI Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945 tentang anjuran pembentukan partai-partai menyebutkan, pemilu akan diselenggarakan bulan Januari 1946 untuk memilih anggota DPR dan MPR. Ketidak teraturan kalender pemilu lima tahunan itu tentu bukan tanpa sebab. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri.

Pemilu di Indonesia yang telah berlangsung selama 10 kali dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia merupakan gambaran dinamika perpolitikan masyarakat

Indonesia. Partai politik setidaknya mampu merepresentasikan gambaran masyarakat Indonesia, baik secara nasional maupun konteks yang lebih kecil lagi yakni kelokalanya.

Dalam penelitian kali ini, untuk melihat gambaran perpolitikan Indonesia dilihat dari konteks kelokalanya dilakukan dengan memotret salah satu daerah setingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Utara di Provinsi Aceh. Masyarakat Aceh Utara setidaknya mampu memberikan gambaran bagaimana masyarakat Aceh secara keseluruhan dengan mayoritas penduduk bersuku bangsa Aceh dengan ditambah masyarakat pendatang yang kompleks. Kompleksitas masyarakat Kabupaten Aceh Utara terjadi dengan adanya industrialisasi yang terdapat di Aceh Utara yang begitu masif. Sehingga tidak salah ketika melihat Aceh dengan mengambil studi kasus di Kabupaten Aceh Utara.

Aceh Utara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Dilihat dari sisi politiknya Kabupaten Aceh Utara memberikan dinamika yang menarik baik dilihat dalam konteks kelokalan maupun secara nasional. Gambaran politik yang menarik tersebut dapat dilihat dari hasil pemilu yang dilaksanakan di kabupaten tersebut. Kita ketahui bagaimana "superiornya" Golkar secara nasional pada masa orde baru, namun ketika kita melihat Aceh Utara, akan terdapat bagian yang tidak umum terjadi di Aceh Utara. Hal yang menjadikannya unik adalah ketika partai politik "Partai Persatuan Pembangunan" mampu mengungguli dominasi

Golkar di tingkat lokal, Kabupaten Aceh Utara, dalam beberapa kali pemilu yakni pada tahun 1977 dan tahun 1982.

Gambaran politik masyarakat Aceh Utara begitu dinamis ketika kita melihatnya dari angka-angka hasil perolehan suara pada pemilu yang pernah berlangsung. Dengan menyandingkan angka statistik kependudukan di Aceh Utara dengan hasil wawancara secara mendalam kepada informan menjadikan penelitian ini mampu melihat potret politik di Aceh Utara secara keseluruhan.

Rentang waktu penelitian ini juga terbatas pada tahun 1970-an sampai dengan tahun 2009. Di mana pada tahun 1971 pemilu pertama di masa orde baru dilaksanakan. Tahun 2009 sebagai akhir periode penelitian karena pada tahun 2009 ini pemilu terakhir dilaksanakan pada masa reformasi. Dari rentang waktu yang telah ditentukan tersebut, penelitian ini juga tetap memberi gambaran masa-masa sebelumnya yang pada tahun 1955 melaksanakan pemilu pertama dan satu-satunya pemilu di masa orde lama.

2. Kajian Literatur

Politik didefinisikan bermacam-macam, sesuai dengan sudut pandang pemberi definisi. Tetapi pada umumnya definisi tentang politik menyangkut semua kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan. Perhatian ilmu politik ialah pada gejala-gejala masyarakat, seperti pengaruh dan kekuasaan, kepentingan dan partai politik, keputusan dan kebijakan, konflik dan konsensus, rekrutmen

dan perilaku kepemimpinan, massa dan pemilih, budaya politik, sosialisasi politik dan sebagainya.¹

Tulisan Clifford Geertz, *The Religion of Java*, sekalipun banyak dikritik tetapi telah membuka wacana baru dalam kajian politik Indonesia dengan menjelaskan bahwa politik di Indonesia semua didasarkan pada nilai budaya.² Geertz juga menyebutkan bahwa "sosial-budaya" maupun "politik" adalah ibarat dua sisi mata uang yang sama: "untuk mengerti politik anda harus mengerti kebudayaan masyarakatnya, begitu pula sebaliknya, untuk mengerti kebudayaan suatu masyarakat anda harus mengerti politiknya." Aspek sosial-budaya dan politik dari suatu masyarakat merupakan sebuah anyaman sosial yang saling melilit.³ Buku Donald K, *Indonesia's Elite: Political Culture and Cultural Politics* telah membuat terang perilaku politik Indonesia, 1945-1965, terutama adanya nilai budaya *santri*, *abangan*, dengan politik alirannya.⁴

Kajian tentang Aceh yang cukup kritis ditulis oleh Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad dalam *Acehnologi*. Ia menyebutkan tampilan keagamaan orang Aceh memang selalu ditulis dengan keadaan sangat baik. Bahkan disebutkan

¹ Kuntowojoyo, 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hlm. 173.

² *Ibid.*

³ Riwanto Tirtosudarmo, 2007. *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hlm. 2-3.

⁴ Kuntowojoyo, *op.cit.*, hlm. 179.

orang Aceh beragama Islam seratus persen. Namun praktek keagamaan dan kebudayaan orang Aceh sama sekali malah tidak “Islam seratus persen”.⁵ Kemudian disebut juga, untuk memahami orang Aceh, kita harus memahami persoalan kosmologi orang Aceh sebagai pijakan awal, sebagai pemahaman tentang falsafah kehidupan tradisional masyarakat Aceh, di mana peran ulama sebagai penyampai ajaran-ajaran keagamaan mempunyai peran yang sangat signifikan.⁶

Berkaitan dengan budaya Aceh sebagai landasan pokok masyarakatnya, ke-Islaman menjadi pegangan setiap orang Aceh. Begitu eratnya kaitan antara adat Aceh dengan agama Islam, menimbulkan ungkapan yang melekat kuat pada masyarakat Aceh yakni *adat ngon hukom lagee zat ngon sipheut*.

3. Aceh Utara: Selayang Pandang

Sejarah Aceh Utara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan Kerajaan Islam di pesisir Sumatera yaitu Samudera Pasai yang terletak di Kecamatan Samudera Geudong yang merupakan tempat pertama kehadiran Agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh mengalami pasang surut, mulai dari zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kedatangan Portugis ke Malaka pada

⁵ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 2012. *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing. Hlm. 9.

⁶ *Ibid*, hlm. 24.

tahun 1511 sehingga 10 tahun kemudian Samudera Pasai turut diduduki, hingga masa penjajahan Belanda.⁷

Masyarakat Aceh Utara sebagaimana umumnya masyarakat Aceh memiliki karakter yang khas, yaitu masyarakat yang mewarisi dan memiliki nilai-nilai Islam yang kental. Warisan nilai budaya Aceh itu menyatu dalam diri dan masyarakatnya sehingga menjadi karakter, watak, dalam perwujudan kehidupannya sehari-hari sebagai anggota masyarakat yang beriman dan bertaqwa, beramal saleh, kasih sayang dan tolong menolong, mengutamakan amanah dan kebenaran, memenuhi janji, bertanggung jawab, disiplin, pantang tersinggung harga dirinya, sikap harmoni dan humoris.⁸

Secara *de facto* Belanda menguasai Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika Belanda dapat menguasai benteng pertahanan terakhir pejuang Aceh Kuta Glee di Batee Iliak di Samalanga. Dengan surat Keputusan Van der Gouvenement General Van Nederland Indie tanggal 7 September 1934, Pemerintah Hindia Belanda membagi Daerah Aceh atas 6 (enam) *Afdeeling* (Kabupaten) yang dipimpin seorang *Asistent Resident*, salah satunya adalah *Afdeeling Noord Kust Van Atjeh* (Kabupaten Aceh Utara) yang meliputi Aceh Utara sekarang ditambah Kecamatan Bandar Dua yang kini telah termasuk Kabupaten Pidie.

⁷ Aceh Utara Dalam Angka 2013

⁸ A.Hadi Arifin, dkk., tt. *Aceh Utara: Dari Kerajaan Samudera Pasai ke Era Industrialisasi*. Lhokseumawe: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Hlm. 57.

Afdeeling Noord Kust van Atjeh dibagi dalam 3 (tiga) *Onderafdeeling* (Kewedanaan) yang dikepalai seorang *Countroleur* (Wedana) yaitu :

1. *Onderafdeeling* Bireuen
2. *Onderafdeeling* Lhokseumawe
3. *Onderafdeeling* Lhoksukon

Selain *Onderafdeeling* tersebut terdapat juga beberapa daerah *Uleebalang* (*Zelfbestuur*) yang dapat memerintah sendiri terhadap daerah dan rakyatnya yaitu *Uleebalang* Keuretoe, Geurogok, Jeumpa, dan Peusangan yang diketuai oleh Ampon Chik.

Pada masa pendudukan Jepang istilah *Afdeeling* diganti dengan *Bun*, *Onderafdeeling* disebut *Gun*, *Zelfbestuur* disebut *Sun*, *Mukim* disebut *Kun* dan *Gampong* disebut *Kumi*. Sesudah Indonesia diproklamirkan sebagai Negara Merdeka, Aceh Utara disebut Luhak yang dikepalai oleh seorang Kepala Luhak sampai dengan tahun 1949. Melalui Konfrensi Meja Bundar, pada 27 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian. Salah satunya adalah Negara Bagian Sumatera Timur. Tokoh-tokoh Aceh saat itu tidak mengakui dan tidak tunduk pada RIS tetapi tetap tunduk pada Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Republik Indonesia Serikat kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlaku Undang Undang Sementara 1950 seluruh negara

bagian bergabung dan statusnya berubah menjadi provinsi. Aceh yang pada saat itu bukan negara bagian, digabungkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom setingkat Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, terbentuklah Daerah Tingkat II Aceh Utara yang juga termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Keberadaan Aceh di bawah Provinsi Sumatera Utara menimbulkan rasa tidak puas pada para tokoh Aceh yang menuntut agar Aceh tetap berdiri sendiri sebagai provinsi dan tidak berada di bawah Sumatera Utara. Tetapi ide ini kurang didukung oleh sebagian masyarakat Aceh terutama yang berada di luar Aceh.

Kedadaan ini menimbulkan kemarahan tokoh Aceh dan memicu terjadinya pemberontakan DI/TII pada tahun 1953. Pemberontakan ini baru padam setelah datang Wakil Perdana Menteri Mr Hardi ke Aceh yang dikenal dengan Missi Hardi dan kemudian menghasilkan Daerah Istimewa Aceh. Dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor I/ Missi / 1957, lahirlah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dengan sendirinya Kabupaten Aceh Utara masuk dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Berdasarkan Undang Undang Nomor I tahun 1957 dan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1959.

Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara terbagi dalam 3 (tiga) Kewedanaan yaitu :

1. Kewedanaan Bireuen terdiri atas 7 kecamatan
2. Kewedanaan Lhokseumawe terdiri atas 8 Kecamatan

3. Kewedanaan Lhoksukon terdiri atas 8 kecamatan

Dua tahun kemudian keluar Undang Undang Nomor 18 tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU tersebut wilayah kewedanaan dihapuskan dan wilayah kecamatan langsung di bawah Kabupaten Daerah Tingkat II. Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 07 / SK / 11 / Des/ 1969 tanggal 6 Juni 1969, wilayah bekas kewedanaan Bireuen ditetapkan menjadi daerah perwakilan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara yang dikepalai seorang kepala perwakilan yang kini sudah menjadi Kabupaten Bireun.

Hampir dua dasawarsa kemudian dikeluarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, sebutan Kepala Perwakilan diganti dengan Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sehingga daerah perwakilan Bireuen berubah menjadi Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Utara di Bireuen.

Dengan berkembangnya Kabupaten Aceh Utara yang makin pesat, pada tahun 1986 dibentuklah Kotif (Kota Administratif) Lhokseumawe dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1986 yang membawahi 5 kecamatan. Dan berdasarkan Kep Mendagri Nomor 136.21-526 tanggal 24 Juni 1988 tentang pembentukan wilayah kerja pembantu Bupati Pidie dan Pembantu Bupati Aceh Utara dalam wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka terbentuklah Pembantu Bupati Aceh Utara di Lhoksukon, sehingga pada saat ini Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 2 Pembantu Bupati, 1 kota administratif, 26 wilayah kecamatan

yaitu 23 kecamatan yang sudah ada ditambah dengan 3 kecamatan pemekaran baru.

Sebagai penjabaran dari UU nomor 5 tahun 1974 pasal 11 yang menegaskan bahwa titik berat otonomi daerah diletakkan pada daerah tingkat II maka pemerintah melaksanakan proyek percontohan otonomi daerah. Aceh Utara ditunjuk sebagai daerah tingkat II percontohan otonomi daerah.

Pada tahun 1999 Kabupaten Aceh Utara yang terdiri dari 26 Kecamatan dimekarkan lagi menjadi 30 kecamatan dengan menambah empat kecamatan baru berdasarkan PP Republik Indonesia Nomor 44 tahun 1999. Seiring dengan pemekaran kecamatan baru tersebut, Aceh Utara harus merelakan hampir sepertiga wilayahnya untuk menjadi kabupaten baru, yaitu Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang Undang nomor 48 tahun 1999. Wilayahnya mencakup bekas wilayah Pembantu Bupati di Bireuen.

Kemudian pada Oktober 2001, tiga kecamatan dalam wilayah Aceh Utara, yaitu Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan Kecamatan Blang Mangat dijadikan Kota Lhokseumawe. Saat ini Kabupaten Aceh Utara dengan luas wilayah sebesar 3.296,86 Km² dan terdiri atas 27 kecamatan, berpenduduk sebanyak 549.370 jiwa.

4. Masyarakat Aceh dan Struktur Politiknya

Aceh merupakan provinsi dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak dibandingkan dengan provinsi lain yang ada

di Indonesia, bisa dikatakan hampir 100% penduduk Aceh memeluk agama Islam, hanya ada sebagian kecil atau minoritas yang beragama non-muslim, itupun bukan penduduk asli atau pribumi melainkan pendatang yang kemudian menetap di Aceh.⁹

Orang Aceh sangat fanatik terhadap yang namanya agama, jika berbicara masalah agama, maka orang Aceh tidak mau kalah, bahkan jika ada yang mengolok-olokkan agama, maka orang Aceh siap mati untuk membela agamanya walaupun dia sendiri tidak shalat. Itulah gambaran bagaimana kentalnya Islam ataupun agama Islam dalam diri orang Aceh.¹⁰

Secara antropologis, semua orang Aceh sebenarnya merupakan masyarakat territorial keagamaan. Sebagai masyarakat territorial keagamaan di Aceh, kehidupan keluarga di Aceh bersifat parental dan dalam hal-hal tertentu bersifat bilateral, mediami suatu wilayah yang disebut *gampong* dan kehidupannya berkisar pada *meunasah* dan masjid. *Gampong* merupakan suatu territorial terkecil. Dulu setiap *gampong* mencakup satu *kawom* atau sub-*kaom* yang hanya akan bertambah warganya dengan perkawinan dalam

⁹ "Faktor penyebab menurunnya elektabilitas partai Islam, khususnya di Aceh", dalam <http://qasehyalnis.blogspot.com/2013/02/faktor-penyebab-menurunnya.html> (akses: 25 Oktober 2013).

¹⁰ *Ibid.*

lingkungan sendiri, atau paling tidak, dengan meminta dari warga sesuku yang bermukim berdekatan.¹¹

Kehidupan masyarakat Aceh dalam lingkup terkecil secara politis dimulai dari tataran *gampong*. *Gampong* dipimpin seorang *keuchiek*. Pada masa dahulu, *keuchiek* merupakan pembela kepentingan dan keinginan warga, baik berhadapan dengan *uleebalang* maupun dengan *gampong* lain.

Keuchiek dalam perspektif *gampong*, tidak hanya berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat dan wilayahnya. *Keuchiek* juga bertindak sebagai pemangku adat di tingkat *gampong*. Dalam melaksanakan tugasnya dalam kehidupan masyarakat, *keuchiek* dibantu *tuha peut* (sekumpulan atau empat orang yang dituakan karena memiliki kelebihan). *Tuha peut* umumnya memikul tugas rangkap, disamping sebagai penasihat *keuchiek* juga sebagai pemikir, penimbang dan penemu dasar-dasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu, dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus berposisi sebagai dewan juri.¹²

Pola kelembagaan adat Aceh sebenarnya merupakan sistem yang relatif telah cukup demokratis, karena segala keputusan yang diambil oleh *keuchiek* harus terlebih dahulu

¹¹ Lihat Heru Cahyono, 2008 . "Potret Kelembagaan Gampong yang Lumpuh di Meuria, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara", dalam Irine Hiraswati Gayatri (ed.), *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa Yang Bergejolak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI. Hlm. 279.

¹² *Ibid.*, hlm. 280-281.

dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan *tuha peut*. Bahwa sebuah kebijakan baru memiliki legitimasi kuat dan dianggap sebagai kebijakan bersama seluruh warga *gampong* apabila mekanisme tersebut dijalankan.¹³

Di Aceh setiap *gampong* dapat dipastikan terdapat sebuah *meunasah*. *Meunasah* merupakan sebuah lembaga yang strategis yang memiliki peranan cukup besar dalam membantu pelaksanaan pemerintahan di *gampong*. Pada masa lalu, kehidupan masyarakat Aceh yang berbasis kepada adat dan agama Islam menjadikan *meunasah* sebagai pusat aktivitas pemerintahan, tanpa ada *meunasah* dianggap tidak ada *gampong*.

Tata laksana pemerintahan disesuaikan dengan kultur yang dianut dan perkembangan sejarah. Pemerintah terkecil adalah *gampong* yang dipimpin oleh *keuchiek*. Sebelum tahun 1946, lebih tepatnya sejak masa penjajahan Belanda diikuti masa bala tentara penjajahan Jepang hingga selesainya revolusi sosial di Aceh, Kepala *Gampong* disebut *peutua*. *Keuchiek*/kepala dibantu oleh sebuah badan penasehat yang disebut *Tuha Peut*. *Tuha Peut* tidak berarti harus empat orang, tetapi paling sedikit dua orang dan mungkin juga lebih dari empat orang. Hal-hal yang berhubungan dengan urusan agama Islam dipimpin oleh seorang *Imum* (imam) dengan gelar *Teungku Imum Meunasah*. Segala urusan tingkat *gampong* dijalankan atas dasar musyawarah dan saling pengertian antara *Keuchiek*, *Imum* dan *Tuha Peut* serta orang-orang tua

¹³ *Ibid.*, hlm. 281.

kampung setempat. *Keuchiek* dan *Imum* dianggap oleh warga *gampong* sebagai bapak dan ibu yang diharapkan menjadi tempat mengadu nasib dikala duka dan tempat menyatakan bahagia di kala suka.¹⁴

Pada tingkat berikutnya, setingkat di atas *Keuchiek*, pemerintah dipimpin oleh Kepala *Mukim* dengan gelar *Imum Mukim*. Berdasarkan UU nomor 5 tahun 1975 *imum mukim* tidak tercantum dalam struktur pemerintahan Indonesia. Bagi Daerah Istimewa Aceh yang keistimewaannya mencakup tiga bidang, di antaranya adat, status kemukiman menjadi tersendat-sendat operasionalnya. Pada hakikatnya *Imum Mukim* merupakan perpanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini adalah camat. *Imum mukim* ini membantu mengkoordinir pelaksanaan operasional pemerintah pada tingkat *gampong* dalam wilayah kemukimannya.¹⁵

Pada masa Sultan Iskandar Muda, demikian pula pada masa pemerintahan penjajahan Belanda hingga henggangnya Penjajah Jepang wilayah kekuasaan *imum mukim* meliputi satu daerah pemukiman penduduk yang terdiri dari beberapa *gampong* dengan sebuah masjid yang dipimpin oleh *imum chiek* atau *imum masjid*, yang juga disebut *raja imum*. Kumpulan beberapa *gampong* dipimpin oleh oleh *imum mukim* dan *imum chiek*. *Imum mukim* sebagai pemangku adat memimpin dan mengkoordinir kerjasama para *keuchiek* dalam wilayah kekuasaannya yang disebut kemukiman. *Imum chiek*

¹⁴ A. Hadi Arifin, dkk. *Op.cit.*, hlm. 58.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

sebagai pemuka agama (ulama) memimpin dan mengkoordinir kerjasama para imam dalam wilayah kekuasaannya yang disebut wilayah kemasjidan. Dengan demikian, pada sebuah *gampong* atau sekumpulan *gampong* dibawah kekuasaan *imum mukim* dan didalamnya ada sebuah masjid, maka status *gampong* atau *gampong-gampong* tersebut dinamakan wilayah kemasjidan dibawah pimpinan seorang *imum chiek* sebagai pemangku penata agama. Dan *gampong-gampong* itu berstatus wilayah kemukiman dibawah pimpinan *imum mukim* sebagai pemangku penata adat. Dalam pelaksanaan tugasnya *imum mukim* dan *imum schiek* bekerjasama dan saling musyawarah demi kelancaran memimpin masyarakat sehingga baik adat maupun agama berjalan beriringan saling mengisi. Di sinilah pangkal tolaknya mengapa adat istiadat Aceh Utara khususnya dan di daerah Aceh pada umumnya tidak bertentangan karena bersumber pada syariat Islam.¹⁶

Keuchiek dan *imum mukim* berperan ganda, artinya disamping ia mengendalikan tugas pemerintahan, ia bertindak sebagai pemangku adat. Ia dipilih dari orang-orang terkemuka dari segala hal dalam masyarakat. Tingkat pemerintah di atasnya adalah *Uleebalang*. Sekarang disebut camat. *Uleebalang* atau camat juga pemangku adat. Ia diangkat oleh Sultan atau (sekarang) gubernur.¹⁷

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 59.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 60-61.

Struktur bersama *gampong* dan *mukim* adalah dua kawasan penting sebagai wilayah komunitas masyarakat Aceh, yang memiliki kewenangan, otoritas demokrasi, independensi yang memiliki tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk membangun kehidupan masyarakat dalam wilayahnya sejahtera, bahagia, adil, makmur, rukun damai, berdasarkan tatanan adat dan bersendikan syara'. Hasil riset Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje memperlihatkan bahwa pada masa lalu, *gampong* sejatinya merupakan suatu system kemasyarakatan di Aceh yang dapat mengatur diri sendiri (otonom). *Gampong* merupakan entitas yang secara langsung berhubungan dengan rakyat dan menyelenggarakan pengurusan kepentingan masyarakat yang berhimpun dalam komunitas *gampong*.¹⁸

Secara historis, *gampong* dan *mukim* sudah ada sejak Kerajaan Aceh Darussalam. *Gampong* adalah sebagai alat/struktur pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam yang paling bawah/kecil. Semua aturan dan peranan hukum dalam kerajaan yang paling efektif adalah di *gampong*, karena *gampong* juga sebagai lembaga pemerintahan yang sah dan legal, karena tercantum dalam peraturan kerajaan yaitu Adat Meukuta Alam.¹⁹

¹⁸ Sutoro Eko, 2007. *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta. Hlm. 13. Lihat juga dalam Leana Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin (ed.), 2010. *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh*. Banda Aceh: ICAIOS. Hlm. 4.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

Secara konseptual demokrasi lokal ala *gampong-mukim* dapat disebut dengan demokrasi komunitarian. Corak ini berbasis pada kehidupan komunal masyarakat Aceh. Semangat yang dikedepankan bukanlah kebebasan individual, melainkan kebersamaan secara kolektif, baik dalam pengambilan keputusan maupun pembagian pengelolaan sumberdaya lokal. Dalam *gampong* dikenal dengan mufakat (muwafakat, bahasa Arab), yakni segala persoalan diselesaikan secara pertukaran pendapat secara beramai-ramai.²⁰

Masyarakat Aceh Utara sebagaimana masyarakat Aceh pada umumnya tidak terlepas dari strata sosial dalam bentuk struktur vertikal dan struktur horizontal, baik secara perseorangan maupun kelompok sosial menurut tingkat dalam bidang ekonomi, keturunan, pangkat, jabatan dan sumber pencaharian. Pada umumnya masyarakat Aceh Utara dalam jumlah terbesar adalah petani, sebagian kecil pegawai, buruh dan pedagang.²¹

5. Politik Aceh Utara Pada Masa Orba

Kabupaten Aceh Utara pada era orde baru telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak enam kali, yakni pada pemilu 1971, pemilu 1977, pemilu 1982, pemilu 1987, pemilu 1992, dan pemilu 1997. Pada pemilu 1971, seperti

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19-21.

²¹ A.Hadi Arifin, dkk., *Op.cit.*, hlm. 61

juga di kancah nasional, pemilu di Aceh Utara diikuti oleh 10 partai politik, antara lain:

1. Partai Katolik
2. Partai Syarikat Islam Indonesia
3. Partai Nahdlatul Ulama
4. Partai Muslimin Indonesia
5. Golongan Karya
6. Partai Kristen Indonesia
7. Partai Musyawarah Rakyat Banyak
8. Partai Nasional Indonesia
9. Partai Islam PERTI
10. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

Politik pemilu selanjutnya adalah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik melalui fusi. Penyederhanaan partai pada dasarnya adalah kontinuitas dari yang pernah dirintis oleh Sukarno. pada tahun 1960 Presiden Sukarno telah mengurangi jumlah partai politik dari kira-kira 25 menjadi 10 yaitu PNI, Partindo, IPKI, NU, PSII, Perti, Parkindo dan Partai Katolik, PKI serta Murba yang sesungguhnya representasi dari ideologi Nasionalis, Islam, Kristen dan marxisme. Sebelumnya, Masyumi dibubarkan oleh Sukarno karena dituduh terlibat dalam pemberontakan PRRI Sumatera Barat yang kemudian tidak terbukti. Setelah peralihan kekuasaan tahun 1966, PKI dibubarkan dan Partindo ditindas. dan sebuah partai Islam (Parmusi) pada

tahun 1968 dibentuk. Kesembilan partai tersebut yang kemudian menjadi kontestan dalam Pemilu 1971.²²

Dasar-dasar bagi politik penyederhanaan partai dilakukan satu tahun sebelum pemilu pertama era Orde Baru digelar, Februari 1970. Kala itu, Suharto bertemu dengan pimpinan partai untuk membahas rencana pemerintah mengurangi jumlah partai. Pertemuan ini menghasilkan pembentukan dua kelompok koalisi di dalam DPR, Maret 1970 yaitu Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik; dan Kelompok Persatuan Pembangunan, yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti.²³

Pemilihan Umum Tahun 1971, pemilu pertama era Orde Baru yang dilaksanakan di bawah payung hukum Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilu. Yang menjadi Pemilih adalah warganegara yang telah berusia 17 tahun dan atau sudah menikah. Prosedur pendaftarannya adalah sistem stelsel pasif, yaitu pemerintah mempunyai kewajiban mendaftarkan semua warga negara yang memiliki hak pilih.²⁴

²² "Pemilihan Umum Tahun 1971", dalam http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=20&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status= (akses 18 November 2013).

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Pada pemilu yang diselenggarakan 5 Juli 1971 ini memiliki karakter yang berbeda dengan pemilu yang dikenal negara-negara demokrasi pada umumnya. Jika di negara demokrasi karakter pemilu dibangun diatas prinsip free and fair baik dalam struktur dan proses pemilu, sebaliknya, Orde Baru justru menghindari penerapan prinsip tersebut. Yang terjadi kemudian adalah ketidak seimbangan kontestasi antar peserta pemilu dan hasil pemilu tidak mencerminkan aspirasi dan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan Pemilu diatur melalui cara-cara tertentu untuk kelanggengan kekuasaan Orde Baru itu sendiri.²⁵

Ada beberapa hal mendasar yang menjadikan pemilu-pemilu selama Orde Baru berkuasa tidak dikategorikan sebagai pemilu yang demokratis. pertama, terlalu dominannya peranan pemerintah, dan sebaliknya, amat minimnya keterlibatan masyarakat hampir di semua tingkatan kelembagaan maupun proses pemilu. Dominasi pemerintah yang terlalu besar terlihat dalam postur kelembagaan penyelenggara pemilu dari tingkat pusat hingga struktur kepanitiaan terendah yang didominasi pemerintah. Kalupun melibatkan unsur di luar pemerintah tidak lebih pada aksesoris belaka. Proses pemilu tidak berlangsung fair karena adanya pemihakan pemerintah kepada salah satu organisasi peserta pemilu, yaitu Golkar. Birokrasi dengan monoloyalitasnya dan militer mendukung Golkar untuk mencapai kemenangan. Monopoli pemerintah dalam salah satu proses pemilu yang terpenting, yakni penghitungan

²⁵ *Ibid.*

suara. Pada tahap ini, hampir tidak ada peluang bagi OPP di luar Golkar mengikuti dan terlibat secara penuh dalam penghitungan suara, kecuali ditingkat tempat pemungutan suara.²⁶

Setelah 1971, pelaksanaan Pemilu yang periodik dan teratur mulai terlaksana. Pemilu ketiga diselenggarakan 6 tahun lebih setelah Pemilu 1971, yakni tahun 1977, setelah itu selalu terjadwal sekali dalam 5 tahun. Dari segi jadwal sejak itulah pemilu teratur dilaksanakan.²⁷

Satu hal yang nyata perbedaannya dengan Pemilu-pemilu sebelumnya adalah bahwa sejak Pemilu 1977 pesertanya jauh lebih sedikit, dua parpol dan satu Golkar. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI) dan satu Golongan Karya atau Golkar. Jadi dalam 5 kali Pemilu, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 pesertanya hanya tiga tadi.²⁸

Penggabungan partai-partai Islam menjadi Partai Persatuan Pembangunan di Aceh Utara pada mulanya banyak ditentang oleh para pendukung masing-masing partai,

²⁶ *Ibid.*

²⁷ http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 (akses: 25 Oktober 2013).

²⁸ *Ibid.*

walaupun tidak sampai menimbulkan konflik. Namun menyadari bahwa undang-undang telah mengaturnya, mau tidak mau semua komponen akhirnya mendukung langkah penggabungan partai-partai Islam ke dalam PPP.²⁹

Pemungutan suara Pemilu 1977 dilakukan 2 Mei 1977. Cara pembagian kursi masih dilakukan seperti dalam Pemilu 1971, yakni mengikuti sistem proporsional di daerah pemilihan. Pada Pemilu 1977 suara PPP naik di berbagai daerah, bahkan di Daerah Istimewa Aceh mengalahkan Golkar. Secara nasional PPP berhasil meraih 18.743.491 suara, 99 kursi atau naik 2,17 persen, atau bertambah 5 kursi dibanding gabungan kursi 4 partai Islam dalam Pemilu 1971. Kenaikan suara PPP terjadi di banyak basis-basis eks Masjumi. Ini seiring dengan tampilnya tokoh utama Masjumi mendukung PPP. Tetapi kenaikan suara PPP di basis-basis Masjumi diikuti pula oleh penurunan suara dan kursi di basis-basis NU, sehingga kenaikan suara secara nasional tidak begitu besar.³⁰

Pemungutan suara Pemilu 1982 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 4 Mei 1982. Pada Pemilu ini perolehan suara dan kursi secara nasional Golkar meningkat, tetapi gagal

²⁹ Wawancara Abu Saifuddin di Lhokseumawe (16 November 2013).

³⁰ http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 (akses: 25 Oktober 2013).

merebut kemenangan di Aceh. Hanya Jakarta dan Kalimantan Selatan yang berhasil diambil Golkar dari PPP.³¹

Pemilihan Umum yang keempat kalinya semasa orde baru diselenggarakan hari Kamis tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air sesuai dengan Keppres No.13 tahun 1986. Bahwa pemilihan umum dengan segala tahapannya (12 tahap) telah dilaksanakan di seluruh Indonesia sesuai dengan azasnya yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia. Demikian pula halnya dengan Daerah Tingkat II Aceh Utara, pelaksanaan Pemilihan Umum telah dilaksanakan sesuai dengan azasnya serta telah berlangsung dalam suasana aman, tertib dan lancar serta tidak menimbulkan efek negative yang membahayakan.³²

Kabupaten Aceh Utara pada masa Pemilu 1987 mempunyai jumlah penduduk sebesar 725.309 jiwa yang tersebar di 23 kecamatan. Penduduk yang berhak memberikan suara dalam Pemilu 1987 sebanyak 400.308 orang dengan perincian pemilih berjenis kelamin laki-laki sejumlah 197.282 orang dan perempuan berjumlah 203.026. Dari total jumlah penduduk yang berhak memilih, hanya 372.151 suara sah yang diperoleh seluruh kontestan pemilu atau sebesar 92, 96 %.

³¹ http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 (akses: 25 Oktober 2013).

³² Dokumentasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum-1987 di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.

Hasil pemilu tahun 1987 menempatkan Partai Persatuan Pembangunan sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara sebanyak 185.912, kemudian di tempat kedua ditempati Golkar dengan perolehan suara sebanyak 166.638 suara dan terakhir Partai Demokrasi Indonesia dengan memperoleh suara sebanyak 19.601 suara.³³

Pada pemilu 1987 Partai Persatuan Pembangunan menempatkan 18 orang wakilnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara. Golkar sebagai pemenang kedua menempatkan 16 orang wakilnya sebagai anggota DPRD Aceh Utara. PDI menempatkan dua orang wakilnya di DPRD kemudian ditambah lagi anggota DPRD yang diangkat dari Golongan Karya ABRI dan Polisi sebanyak sembilan orang.³⁴

Berbeda dengan hasil pemilu di tingkat kabupaten, hasil Pemilu secara nasional pada Pemilu 1987 ditandai dengan kemerosotan terbesar PPP, yakni hilangnya 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Penyebab merosotnya PPP antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah kepada Bintang dan terjadinya

³³ Lampiran V: Berita Acara Nomor 275/A/C.1/V/PPD-II 1987 Tentang Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA).

³⁴ Lampiran I Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tanggal 3 Juli 1987 nomor 171.2/602/1987 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Yang Diresmikan.

penggembosan oleh tokoh- tokoh unsur NU, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah.³⁵

Pemilu pada tahun 1992 di Kabupaten Aceh Utara berjalan dengan baik berkat kerjasama yang baik antar instansi dan unsur yang terkait. Berdasarkan hasil peninjauan panitia (Panwaslak) tingkat II Aceh Utara, pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 1992 tanggal 9 Juni 1992 berjalan dengan tertib dan aman, di mana hasil pemungutan suara di semua TPS diterima oleh semua saksi yang ada di TPS serta semua saksi menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara pada setiap TPS.³⁶

Pada saat Pemilu 1992 dilaksanakan di Kabupaten Aceh Utara tercatat memiliki jumlah penduduk sebesar 826.038 orang yang tersebar di dua puluh enam kecamatan.³⁷ Sedangkan penduduk Aceh Utara yang memiliki hak pilih berjumlah 471.429 jiwa yang terbagi menjadi pemilih laki-laki berjumlah 231.283 jiwa dan pemilih perempuan berjumlah 240.146 jiwa.³⁸

Pemilu yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 ini pada tingkat nasional agak

³⁵ http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 (akses: 25 Oktober 2013).

³⁶ Perselah Rapat Panwaslak Tingkat II Aceh Utara Tanggal 15 Juni 1992.

³⁷ Berita Acara Nomor 01/A/C.1/VI/1991 Tentang Penghitungan Jumlah Penduduk WNRI Yang Terdaftar.

³⁸ Berita Acara Nomor 02/A/C.1/VIII/91 Tentang Penghitungan Jumlah Pemilih Yang Terdaftar.

mengagetkan banyak orang. Sebab, perolehan suara Golkar kali ini merosot dibandingkan Pemilu 1987. Kalau pada Pemilu 1987 perolehan suaranya mencapai 73,16 persen, pada Pemilu 1992 turun menjadi 68,10 persen, atau merosot 5,06 persen. PPP juga mengalami hal yang sama, meski masih bisa menaikkan 1 kursi dari 61 pada Pemilu 1987 menjadi 62 kursi pada Pemilu 1992 ini. Tetapi di luar Jawa suara dan kursi partai berlambang ka'bah itu merosot. Pada Pemilu 1992 partai ini kehilangan banyak kursi di luar Jawa.³⁹

Seperti dialami di Kabupaten Aceh Utara, Partai Persatuan Pembangunan yang sebelumnya memenangkan perolehan suara, pada Pemilu 1992 ini mengalami penurunan. Pemenang pertama adalah Golkar dengan 243.102 suara (54,6%), disusul Partai Persatuan Pembangunan dengan 165.976 suara (37,3%) dan selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia dengan 35.926 suara (8,1%). Sedangkan suara tidak sah berjumlah 14.451 suara.⁴⁰ Hampir semua kecamatan di Aceh Utara Golkar memenangkan pemungutan suara, kecuali di Kecamatan Peudada di mana Partai Persatuan Pembangunan mampu mencuri kemenangan atas Golkar.

Komposisi jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Utara juga mengalami perubahan pasca Pemilu 1992. Partai Persatuan Pembangunan

³⁹ http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 (akses: 25 Oktober 2013).

⁴⁰ Berita Acara Nomor 04/VI/PPD II1992 Tentang Penghitungan Suara Daerah Tingkat II Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.

menempatkan 13 orang wakilnya, Golkar mempunyai 20 orang wakil, Partai Demokrasi Indonesia dengan tiga orang wakilnya dan Golkar-ABRI yang diangkat berjumlah sembilan orang.⁴¹

Selama proses Pemilu 1992 berlangsung, berbagai permasalahan juga tidak bisa dihindari. Pada masa kampanye Pemilu, masing-masing organisasi peserta pemilu (OPP) telah melakukan penyimpangan materi kampanye yaitu dengan mendiskreditkan OPP lain dan mendiskreditkan kebijakan Pemerintah.⁴²

Kegiatan ibu-ibu PKK selama masa kampanye yang melakukan kegiatan di *meunasah-meunasah* dan pada akhir kegiatannya ibu-ibu PKK menghimbau pada masyarakat yang hadir supaya mendukung nomor 2 pada pemilu (Golkar). Namun ada pihak yang menganggap bahwa kegiatan pemerintah melalui kegiatan ibu-ibu PKK tidak boleh terhenti karena adanya kegiatan Pemilu dan adanya himbuan pada akhir acara dilihatnya masih dalam batas wajar.⁴³

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh OPP juga ada yang menjurus kepada kegiatan subversif yaitu dengan mendiskreditkan kebijakan pemerintah. Hal ini dianggap

⁴¹ Lampiran I Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Tanggal 14 Juli Nomor 171.2/343/1992.

⁴² Perselah Rapat Panwaslak II Aceh Utara tanggal 26 Mei 1992.

⁴³ Perselah Rapat Panwaslak II Aceh Utara tanggal 26 Mei 1992.

melanggar Keppres No. tahun 1992 dan kesepakatan bersama OPP tanggal 10 April 1992. Kampanye yang mendiskreditkan kebijakan pemerintah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴⁴

Beberapa hal di atas setidaknya mampu memberi gambaran bagaimana kemenangan Golkar dapat terjadi di Aceh Utara. Di mana mesin-mesin pemerintah mampu bekerja mempromosikan Golkar sebagai pilihan yang harus dipilih. Kewajiban pegawai negeri sipil untuk memilih Golkar juga setidaknya mampu memberikan tambahan suara yang sangat signifikan.

Di level yang lebih tinggi, yakni di tingkat provinsi seorang Gubernur juga mendapat beban tanggung jawab harus mampu memenangkan Golkar. Hal ini diakui oleh Ibrahim Hasan saat menjadi Gubernur Aceh pada tahun 1986 - 1993. Golkar mulai merangkul *teungku-teungku* (ulama) di Aceh. Upaya ini dilakukan secara sistematis oleh Orde Baru dengan melibatkan aparatur birokrasi politik lokal dan juga langsung melibatkan pemimpin nasionalnya. Praktek menjinakkan *teungku dayah* ini cukup berhasil, yang terlihat pada banyaknya *teungku dayah* kharismatik Aceh di era Orde Baru itu beralih afiliasi politiknya dari Partai Persatuan Pembangunan ke Golkar. Terbukti lompatan politik *teungku*

⁴⁴ Perselah Rapat Panwaslak II Aceh Utara tanggal 26 Mei 1992.

dayah ini berhasil mendongkrak dan memenangkan Golkar di Aceh.⁴⁵

Pemilu 1997 Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasil secara nasional menunjukkan bahwa setelah pada Pemilu 1992 mengalami kemerosotan, kali ini Golkar kembali merebut suara pendukungnya. Perolehan suaranya mencapai 74,51 persen, atau naik 6,41. PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 persen. Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri setahun menjelang pemilu, perolehan suaranya merosot 11,84 persen.⁴⁶

Pemilu 1997 di Aceh perolehan suara Golkar mencapai 65%, sedangkan Partai Persatuan Pembangunan harus puas di tempat kedua dengan memperoleh 32% suara dan diikuti Partai Demokrasi Perjuangan yang hanya mampu meraup 3% suara.⁴⁷

⁴⁵ Nirzalin Armia, 2009. "Runtuhnya Pesona Kekuasaan Kharismatik Teungku Dayah di Aceh", dalam *Merajut Aceh Dari Jogja: Kompilasi Pemikiran Intelektual Muda Aceh* Yogyakarta. Yogyakarta: Himpasay-Nuha Litera. Hlm. 61-63.

⁴⁶ http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 (akses: 25 Oktober 2013).

⁴⁷ www.pemilu.asia (akses: 25 Oktober 2013).

6. Politik di Aceh Utara Pada Masa Reformasi

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, di Aceh konflik panjang di antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Republik Indonesia terus berlanjut. Konflik bersenjata yang terjadi di Aceh pada awal reformasi ini menyebabkan banyak efek dari kebijakan pemerintah Indonesia di bawah rezim reformasi tidak berkembang, termasuk kebijakan mengenai otonomi daerah. Meskipun pemilihan umum tahun 1999 dan tahun 2004 di Aceh dilaksanakan sebagaimana di daerah lain di Indonesia, namun dari sisi partisipasi masyarakat dan proses pelaksanaannya dipengaruhi oleh tekanan konflik dan perang bersenjata antara pasukan TNI/Polri dengan GAM.⁴⁸

Reformasi menyodorkan kebebasan-kebebasan baru untuk berbicara dan menciptakan organisasi politik. Karena sebagian besar kelas menengah tinggal di kota, sementara bagian terbesar populasinya di pedesaan, mereka tergantung pada para organisator partai di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk menggapai konstituensi-konstituensi mereka. Golkar menjadi kekuatan politik terbesar di Aceh sejak Pemilu 1987. Sebelum itu, Golkar diganjal oleh Partai Islam PPP.⁴⁹

⁴⁸ Leana Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin (ed.), *Op.cit.* Hlm. 12.

⁴⁹ M.Isa Sulaiman dan Gerry van Klinken, 2007. "Naik Daun dan Kejatuhan gubernur Puteh", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta. Hlm. 309.

Pemilu nasional pada 7 Juni 1999 menghadapi gangguan serius dari GAM. Setelah pemerintah mengakhiri operasi militer khusus (DOM) pada bulan Agustus 1998, banyak pemimpin GAM kembali dari pengasingan di Malaysia untuk membangun kembali organisasi separatis itu di tengah-tengah kebebasan-kebebasan baru tersebut. Intimidasi GAM mengakibatkan nyaris tidak satu orang pun memilih di Kabupaten Pidie dan Aceh Utara. Pemerintah terpaksa memperkirakan hasil pemilu berdasarkan perolehan suara partai dari luar daerah-daerah itu. DPRD yang terbentuk pada 5 Oktober 1999 mempunyai 14 kursi PPP, Sembilan PAN, delapan Golkar, enam PDIP, 11 untuk partai kecil.

Hasil perolehan suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Aceh Utara yang diselenggarakan tanggal 5 April 2004 kembali menempatkan Partai Persatuan Pembangunan sebagai pemenangnya dengan menempatkan anggotanya sebanyak 8 orang sebagai anggota DPRD, disusul Partai Golkar dengan 7 kursi di DPRD, Partai Amanat Nasional sebanyak 6 kursi, Partai Bintang Reformasi sebanyak 5 kursi, Partai Demokrat sebanyak 3 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 3 kursi, Partai Bulan Bintang sebanyak 2 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebanyak 2 kursi dan satu kursi masing-masing untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia

Perjuangan, Partai Serikat Indonesia dan Partai Persatuan Daerah.⁵⁰

Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Aceh Utara tanggal 5 Juli 2004, Amien Rais yang berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo memimpin perolehan suara dengan jumlah 144.056 suara. Pemenang kedua direbut oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan M. Yusuf Kalla dengan memperoleh suara sebanyak 44.580 suara. Tempat ketiga diduduki oleh pasangan Wiranto- Salahuddin Wahid dengan 11.410 suara. Tempat keempat diduduki oleh pasangan Hamzah Haz-Agum Gumelar dengan 10.329 suara dan terakhir pasangan Megawati – Hasyim Muzadi dengan 6.329 suara.⁵¹

Pemilu di Indonesia diselenggarakan lima tahun sekali, namun fakta menarik tentang pemilu di Aceh yang terletak di ujung Pulau Sumatra, sangatlah berbeda. Untuk pertama kalinya, pada pemilu yang diselenggarakan 9 April 2009 masyarakat Aceh memberikan suara dalam pemilihan yang bebas setelah didera konflik selama hampir tiga dekade. Gerakan Aceh Merdeka yang sebelumnya merupakan gerakan pemberontak sekarang berubah menjadi partai politik dan mempunyai kandidatnya sendiri dalam pemilihan daerah. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang warganya diperbolehkan mendirikan partainya sendiri. Enam

⁵⁰ *Aceh Utara: Data, Informasi dan Promosi tahun 2004* (Lhokseumawe: Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten aceh Utara, 2004), hlm. 45.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 48.

partai lokal sudah diakui secara resmi: Partai Aceh (PA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (PSIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Bersatu Aceh (PBA), dan Partai Aceh Aman dan Sejahtera (PAAS). Pendirian partai lokal ini merupakan hasil dari implementasi kesepakatan damai yang tertuang dalam Nota Kesepahaman yang ditanda-tangani oleh GAM dan pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki.⁵²

Pemilu April 2009 di Aceh betul-betul bersejarah. Tampak gamblang bahwa selama konflik yang berkepanjangan itu terdapat pola yang jelas di Aceh, berbeda dengan provinsi-provinsi lain. Di bawah Suharto, sistem politik yang dianut pada dasarnya adalah sistem satu partai yang memperbolehkan dua partai kecil lain untuk turut ambil bagian dalam pemilu untuk memberikan kesan bahwa sistem Orde Baru Suharto adalah sistem multipartai. Golkar (Golongan Karya) adalah partai yang berkuasa sementara PDI (Partai Demokrasi Indonesia) merupakan gabungan antara partai nasionalis dan partai Kristen, sedangkan PPP (Partai Pembangunan Persatuan) adalah federasi Muslim. Meskipun 'golkarisasi' berjalan mulus di provinsi lain dengan berbagai cara termasuk kekerasan brutal dan suap, para pemilih di Aceh secara persisten menentang sistem itu dan memberikan sejumlah besar suaranya bagi PPP.⁵³

⁵² "Pemilu Aceh: Sebuah Keniscayaan", dalam *Kabar Pemilu Nomor 8*, Juni 2009 [http://tapol.org/sites/default/files/Pemilu 2009 Issue 8.pdf](http://tapol.org/sites/default/files/Pemilu%202009%20Issue%208.pdf) (akses: 18 November 2013)

⁵³ *Ibid.*

Dalam ritual lima-tahunan Pemilu, Golkar selalu memenangkan mayoritas di semua provinsi, kecuali Aceh. Barulah pada tahun 1994, dalam pemilu terakhir di bawah Suharto, pemilih di Aceh akhirnya menyerah pada janji-janji Golkar. Lalu di tahun 1999, setelah ambruknya Suharto, Golkar kembali menang, tetapi kali ini dukungannya telah luntur.⁵⁴

Pemilu bulan April 2009 adalah bukti utama keberhasilan kesepakatan damai yang dicapai tahun 2005. Banyak pejuang/gerilyawan dalam sekejap mata saja menjalankan tugas menjaga proses perdamaian sementara pada waktu yang sama berpartisipasi dalam proses rekonstruksi setelah terjadinya Tsunami. Banyak aktivis GAM terpilih dalam pos-pos administratif dalam pemilihan daerah dan bahkan ada yang melejit ke posisi puncak menjadi gubernur provinsi, walikota atau bupati.⁵⁵

Hasil pemilu yang dicapai oleh partai lokal adalah sebuah keniscayaan; hasil jajak pendapat awal meramalkan kemenangan besar bagi Partai Aceh (PA) dan Partai SIRA (PSIRA). Partai nasional sangat buruk perolehannya dan berbeda jauh dengan provinsi-provinsi lain, keragaman spanduk dan selebaran agak terbatas. Di kubu-kubu GAM seperti Aceh Timur dan Aceh Utara, jalanan dipenuhi dengan spanduk dan bendera PA. Tetapi keadaan berubah dalam beberapa minggu sebelum pemilu. Kepemimpinan PA

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

menjadi lebih menonjol daripada partai-partai lokal lainnya dan kini menjadi jelas bahwa ada rasa kurang suka di antara masyarakat terhadap partai-partai lokal yang lain. Sejak awal, masyarakat Aceh menunjukkan dukungannya bagi tokoh-tokoh terkemuka di PA dan hampir tak menyisakan barang secuilpun bagi partai-partai lokal lainnya. Masyarakat Aceh yang memberikan suaranya memilih politik identitas dan tokoh yang paling menarik bagi mereka berasal dari PA. Adapun SIRA dan PRA, meski memiliki catatan advokasi demokrasi yang mengesankan, mereka harus menelan pil pahit dalam pemilu 2009. Satu-satunya partai lokal lain yang memenangkan satu kursi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah PDA, partai Muslim lokal.⁵⁶

Tetapi perlu dicatat bahwa meskipun memiliki dasar yang luas dan kampanye yang efektif, PA gagal memperoleh mayoritas dalam Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. PA memenangkan 33 dari 69 kursi dan tidak terlalu sukses di beberapa kabupaten/kota, termasuk di ibukota Banda Aceh. Terdapat mobilitas dan perubahan besar dalam komposisi penduduk di ibu kota. Pemilu 2009 menghasilkan kursi di DPRD Banda Aceh antara lain : Partai Demokrat dengan 8 kursi, PA 6 kursi, PKS (Partai Keadilan Sejahtera) 5 kursi, Golkar 3 kursi, PDA (Partai Demokrat Aceh, partai lokal) 3 kursi, PAN (Partai Amanat Nasional) 2 kursi dan PPP, PSIRA (partai lokal) serta PBB masing- masing 1 kursi. Jadi tak salah

⁵⁶ *Ibid.*

lagi bahwa terlepas dari mayoritas PA, pluralitas dalam peta politik Aceh telah terjaga.⁵⁷

Dalam pemilihan DPRK, hasilnya lebih mencengangkan. Di kubu GAM, Partai Aceh sukses dan memenangkan mayoritas kursi. Di kabupaten Pidie, PA memenangkan 34 dari 45 kursi. PA juga merebut kemenangan besar di Aceh Utara, mendapatkan 32 dari 45 kursi. Di Aceh Timur, PA memenangkan 25 dari 35 kursi. Tetapi di tempat-tempat di mana kelompok etnis tinggal, PA kurang dominan. Di Aceh Tengah, Partai Demokrat berhasil merebut 4 kursi sementara PA hanya mendapatkan 3 kursi. Berbagai partai lain mendapatkan 1 atau lebih kursi dari 31 kursi. Di Aceh Singkil, kabupaten yang agak terpencil di bagian barat daya, Golkar muncul sebagai pemenang, sementara di Bener Meriah dan Subulussalam, PAN adalah partai terbesar.⁵⁸

Pada pemilu legislatif 2009, Partai Aceh yang merupakan partai lokal Provinsi Aceh mencatatkan kemenangan fantastik, meraup suara suara mayoritas di provinsi Aceh dengan menguasai 47% dari kursi yang tersedia. Keberhasilan ini tentu layak mendapat apresiasi sebab Partai Aceh merupakan parlok yang baru terbentuk setelah terjadi proses perdamaian antara RI - GAM 15 Agustus 2005 di Finlandia. Dan keikutsertaan pada pemilu legislatif

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

merupakan debutnya dalam kompetisi politik nasional Indonesia.⁵⁹

Dari hasil penelitian M. Chandra Rizqi, dapat diketahui bahwa lahirnya Parlok Partai Aceh tidak lain karena sebelumnya rakyat Aceh sudah jenuh dengan partai politik berbasis nasional yang selalu saja memenangkan kekuatan status quo. Selain itu rakyat Aceh juga sudah lelah dengan janji caleg parnas yang ujung-ujungnya hanya janji bukan bukti nyata bagi masyarakat. kehadiran parpol lokal diharapkan bisa memberi perubahan general struktur perlemen yang selama ini kaku, berselemak korupsi, memperkaya diri serta tidak peduli nasib rakyat kecil. Parlok diharapkan mampu mengatur sistim ketatanegaraan negara yang selama ini amburadul. Kemenangan besar Partai Aceh pada pemilu legislatif 2009 tidak terlepas dari peran elit partainya yang mampu memanfaatkan isu politik MoU Helsinki sebagai masa depan politik Aceh. Kemampuan mengusung isu tersebut menjadi efektif sebab caleg dari Partai Aceh cukup pandai melakukan *political empowering* (pemberdayaan politik) dari *grassroot* sampai elit Aceh di level provinsi. Basis massa Partai Aceh sangat *real* dan *heterogen* secara status sosial, dari masyarakat di *gampong* sampai masyarakat kota. Suatu strategi politik yang sederhana, murah

⁵⁹ M. Chandra Rizqi, "*Strategi Pemenangan Mutlak Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009*", dalam *abstrak* Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

dan efektif namun dianggap populistis bagi masyarakat di Aceh.⁶⁰

Pemilu 2009 memberi perubahan yang sangat signifikan dalam komposisi parlemen Aceh Utara. Partai Aceh yang merupakan pendatang baru, karena pada pemilu 2004 belum mengikuti pemilu, menjadi penguasa parlemen dengan menempatkan 32 legislatornya. Kekuatan Partai Aceh ini sangat tidak berimbang dengan sisa kursi yang dimiliki oleh seluruh partai lain yang turut memperoleh kursi. Hanya Partai Demokrat yang memiliki kursi lebih dari satu, namun tidak cukup untuk menghadang fraksi Partai Aceh. Animo masyarakat memilih PA pada tahun 2009 tidak bisa dilepaskan dari euforia perdamaian Aceh dan kewenangan besar yang diberikan pemerintah pusat kepada mantan GAM.⁶¹

Sejak tahun 2006, Aceh Utara dipimpin oleh bupati-wakil bupati dari mantan kombatan GAM. Pada pilkada 2006, Ilyas Hamid-Syarifuddin menggunakan jalur independen sebagai calon bupati karena saat itu mantan GAM belum mendirikan partai politik. Dinamika politik dan perbedaan pandangan menyebabkan Ilyas Hamid tidak memperoleh lagi dukungan dari Partai Aceh sebagai wadah politik mantan GAM. Dukungan dari Partai Aceh diberikan kepada Muhammad Thaib-M. Jamil. Selaras dengan kemenangan

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ <http://migas.bisbak.com/1111.html> (akses: 18 November 2013)

calon dari Partai Aceh di tingkat provinsi, calon yang diusung Partai Aceh Aceh utara juga memperoleh kemenangan mutlak, ini disebabkan sejak zaman konflik kawasan Aceh Utara merupakan wilayah basis bagi Gerakan Aceh Merdeka. Pemilu 2009 merupakan kemenangan partai politik lokal. Hasil pemilu 2009 menempatkan Partai Aceh sebagai pemenang di tingkat provinsi. Partai Aceh (PA) memenangkan 44,6% untuk parlemen Aceh (DPRA) dan 60-70% untuk rata-rata parlemen kabupaten/kota di Aceh. Sebagai partai eks-kombatan, kemenangan Partai Aceh memang sudah diprediksi banyak kalangan.⁶²

Secara angka, partai nasional (parnas) memang mengalami penurunan perolehan suara di Aceh. Namun 36% (total dukungan kepada partai nasional -PARNAS) adalah angka yang tidak begitu buruk untuk pemilu pertama pasca damai. Di sisi lain, keberadaan parnas terlihat semakin menguat akhir-akhir ini, melalui penggalangan konsolidasi parnas beserta ormas-ormasnya, semakin serius di Aceh. Belum lagi, dengan bergabungnya para aktivis sosial (LSM) dan beberapa akademisi ke parnas menjadi satu fenomena tersendiri dalam bandul politik Aceh yang terus bergerak. Transformasi konflik bersenjata di Aceh ke arah kegiatan politik dan pembangunan, bergantung pada kemampuan menjadikan sistem demokrasi di Aceh untuk dapat dijadikan sebagai kerangka dan acuan dalam transformasi konflik. Selain sebagai acuan, sistem ini juga dapat menjadi metode bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

⁶² *Ibid.*

Namun berhasil tidaknya hal ini sangat terkait dengan keberhasilan melebarkan dan memperdalam demokrasi yang bermakna Aceh. Sementara untuk figur kepala daerah, tokoh-tokoh yang didukung oleh mesin politik mantan kombatan GAM masih menjadi pilihan mayoritas masyarakat.⁶³

DPD adalah badan legislatif yang relatif masih baru, dapat dibandingkan dengan senat di negara-negara lain. Setiap provinsi berhak memilih empat anggota DPD, yang akan bersidang di Jakarta. Calon anggota DPD seringkali merupakan gabungan antara beberapa karakteristik. Sering kali mereka merupakan tokoh masyarakat, tapi mereka juga lebih sering didukung oleh satu atau beberapa partai. Misalnya Tengku Abdurrahman BTM, seorang mubaligh yang dikenal di banyak daerah di Aceh mendapatkan dukungan PA dan dengan demikian ia berhasil memenangkan kursi.⁶⁴

Terlepas dari keberhasilan Pemilu 2009 yang telah berjalan di Aceh Utara, ada beberapa permasalahan atau kejadian-kejadian yang muncul dalam pemungutan suara. Seperti kasus di sebuah TPS yang terdapat di dapil I, di mana tidak terdapat anggota pengaman yang betul-betul mengawasi pemilihan sehingga banyak anggota masyarakat yang bukan tugasnya berada di lingkungan TPS-TPS di mana anggota masyarakat tersebut mempengaruhi pemilih untuk mencontreng pada lambang dan nama caleg parpol tertentu.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ "Pemilu Aceh: Sebuah Keniscayaan", dalam *Kabar Pemilu* Nomor 8, Juni 2009 [http://tapol.org/sites/default/files/Pemilu 2009 Issue 8.pdf](http://tapol.org/sites/default/files/Pemilu%202009%20Issue%208.pdf) (akses: 18 November 2013)

Keberatan-keberatan dari saksi juga muncul dengan adanya perbedaan perhitungan suara di tingkat TPS.⁶⁵

7. Keislaman dan Keacehan: Orientasi Berpolitik Orang Aceh

Pada ajang pemilihan umum nasional, kejayaan partai-partai politik berbasis massa Islam di Aceh perlahan mulai tergerus oleh penetrasi partai-partai politik bercorak nasionalis. Terbentuknya identitas politik Islam di Aceh sendiri mulai terukir di hasil pemilu pertama tahun 1955. Aceh, yang saat itu masih menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Utara, dikuasai oleh partai-partai Islam. Gabungan suara yang diraih partai-partai "hijau" ini tercatat mencapai 90,5 persen. Partai Masyumi menjadi partai peraih suara terbesar dan memenangi pemilu dengan menguasai tiga perempat bagian pemilih.⁶⁶

Memasuki era Orde Baru, Golkar muncul sebagai pesaing kuat partai Islam di Aceh. Di pemilu 1971, kekuatan politik Islam di Aceh teredam oleh kekuatan Golkar. Di pemilu tersebut, Golkar meraih separuh bagian suara, selisih tipis dari gabungan partai Islam yang kemudian menjadi

⁶⁵ Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, tertanggal 20 April 2009.

⁶⁶Berebut Nasionalisme di Kancan Lokal, dalam <http://otomotif.kompas.com/read/2009/04/03/09120621/direktori.html> (akses: 25 Oktober 2013).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan raihan suara mencapai 48,9 persen, sedangkan sisa suara diraih Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan 1,4 persen suara.⁶⁷

Kemenangan Golkar di Pemilu 1971 ternyata belum diimbangi dengan penetrasi politik yang mengakar di Aceh. Hal ini terbukti dengan kembalinya PPP menjadi pemenang Pemilu 1977 dan 1982 dengan pencapaian suara yang hampir mencapai 60 persen. Setelah itu, kekuasaan rezim Orde Baru kembali menguat di Aceh. Pada Pemilu 1987, PPP yang menjadi representasi kekuatan politik Islam di Aceh kembali harus takluk di tangan Golkar. Kekuasaan Golkar di Aceh bertahan sampai Pemilu 1997 yang notabene pemilu terakhir di era otoritarian tersebut.⁶⁸

Dominasi politik Islam di Aceh kembali mencuat di era reformasi. Pemilu 1999, partai-partai bernuansa Islam kembali merebut sebagian wilayah yang sebelumnya dikuasai Golkar. PPP kembali memenangi pemilu dengan mendulang 28,8 persen suara. Namun, dominasi partai Islam ini juga tidak bertahan. Partai Golkar kembali meraih kemenangan di Aceh pada Pemilu 2004 dengan torehan suara mencapai 16,2 persen, berada tipis di atas PPP yang meraih 13,8 persen suara. Dominasi Partai Golkar di pemilu tersebut menjadi sinyal, sentimen Islam tidak menjadi orientasi dominan bagi pemilih

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

Aceh untuk menggunakan hak pilihnya di pemilu tingkat nasional.⁶⁹

Secara historis, wacana keberagamaan rakyat Aceh memang dikontrol oleh institusi kerajaan di mana diterapkannya beberapa hukum yang dapat mengatur tatanan kehidupan umat Islam saat itu. Tata tertib yang hanya dipandang sebagai *fiqh* diatur dalam undang-undang, di mana rakyat Aceh diberikan suatu panduan untuk melakukan agamanya. Setelah penjajah datang, agama kemudian menjadi semacam spirit untuk berjuang melawan penjajah. Agama kemudian dijadikan sebagai landasan untuk menggelorakan semangat *jihad* melawan penjajah. Dalam perkembangan selanjutnya isu agama pun kemudian merembet pada isu-isu pemberontakan sebagai kekecewaan yang dialami rakyat Aceh terhadap pemerintahan pusat. Lintasan sejarah berikutnya adalah agama menjadi sebuah alat kekuasaan pemerintah Indonesia untuk "mengatur" Aceh. Dalam konteks ini, agama kemudian menjadi symbol masyarakat Aceh yang menandakan keberbedaan mereka dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.⁷⁰

Martabat ulama dalam masyarakat Aceh amat tinggi nilainya. Hal ini dibuktikan dalam sejarah dengan begitu banyaknya kontribusi ulama selama pemerintahan di Aceh,

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. *Op.cit.* hlm. 154.

terutama sebagai sumber meminta fatwa dan memecahkan masalah.⁷¹

Saat ini politik identitas yang beragam itu sangat mempengaruhi politik teritorialisasi secara kental di Aceh, yang membuat kabupaten/kota dibentuk atas garis politik identitas subetnik. Demikian juga dengan representasi politik dalam jabatan-jabatan publik sedikit-banyak menggunakan preferensi politik identitas.⁷²

Konflik panjang dan telah melahirkan begitu banyak derita, telah membuat Aceh porak-poranda dalam berbagai sektor. Baik itu secara ekonomi maupun politik. Secara politik telah mengakibatkan hilangnya kondisi kondusif di Aceh dan hancurnya rasa saling percaya dengan pemerintah pusat. Kemudian klimaksnya pada awal tahun 2000 dengan mulai memudarnya semangat kebangsaan Indonesia dan mulai masifnya semangat ke-Acehan dalam bentuk Negara bangsa.⁷³

Jika dihubungkan dengan partai politik, seharusnya partai politik Islam dapat berkembang dengan pesat dan memperoleh simpati yang tinggi di daerah Aceh, dikarenakan orang Aceh yang fanatik. Partai Islam seharusnya dapat memaksimalkan perolehan suara dalam pemilihan umum di

⁷¹ Morina Oktavia, 2009. "Potensi Ulama dalam Mempertahankan Perdamaian Aceh", dalam *Merangkai Kata Damai*. Banda Aceh: Katahati Institute. Hlm. 93.

⁷² Sutoro Eko. *Op.cit.* Hlm. 19.

⁷³ Thamren Ananda, 2009. "Perdamaian Aceh Bertopeng Sebelah", dalam *Merangkai Kata Damai*. Banda Aceh: Katahati Institute. Hlm. 66.

daerah seperti Aceh. Namun, elektabilitas partai politik berlandaskan Islam agaknya tidak seperti yang diharapkan di bumi seramoe mekkah, kemenangan suara terhadap partai Islam sangat sedikit bahkan bisa dikatakan suara malah didominasi oleh partai lokal yang tidak berembelkan Islam.⁷⁴

Rata-rata kabupaten memenangkan bupati dari Partai Aceh, sangat sedikit yang memenangkan selain Partai Aceh. Bahkan pemerintahan tertinggi Provinsi pun dimenangi oleh Partai Aceh selama dua kali berturut-turut sejak ditanda tangannya MoU kesepakatan di Helsinki. Sekilas mungkin kita beranggapan bahwa menurunnya elektabilitas partai Islam di Aceh dikarenakan *euphoria* partai lokal yang merupakan hak istimewa daerah Aceh, di mana daerah lain tidak memiliki *euphoria* ini, sehingga masyarakat Aceh lebih memilih partai lokal dibanding partai nasional meskipun berembelkan Islam didalamnya. Namun, jika analisa ini benar, kenapa partai lokal yang berembelkan Islam juga menurun elektabilitasnya. Seperti partai Partai Daulat Aceh, Partai Ulama Aceh dan juga partai lainnya, padahal partai-partai ini juga partai lokal. Semestinya partai-partai ini memiliki suara yang tinggi karena memiliki dua kelebihan, yaitu pertama status mereka sebagai partai lokal dan yang kedua status

⁷⁴ "Faktor penyebab menurunnya elektabilitas partai Islam, khususnya di Aceh", dalam <http://qasehyalnis.blogspot.com/2013/02/faktor-penyebab-menurunnya.html> (akses: 25 Oktober 2013).

mereka yang sebagai partai Islam, namun tetap kedua hal tersebut tidak mendongkrak elektabilitas partai tersebut.⁷⁵

Pada pemilu pada tahun 2006, Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sukses merebut hati rakyat Aceh dengan hasil perolehan suara sebanyak 36 %, menyisihkan tujuh pasang calon gubernur lainnya. Irwandi-Nazar bagi pemilihnya merupakan representasi dari tokoh GAM yang dianggap mampu merubah kondisi masyarakat yang selama pemerintahan sebelumnya dianggap kurang mensejahterakan dan pro dengan pemerintah RI. Rasa ke-Acehan yang begitu kuat melekat pada sosok Irwandi-Nazar menjadikannya terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur pertama dari jalur independen. Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar merupakan perwakilan GAM mengalahkan pasangan Humam Hamid-Hasbi Abdullah yang didukung oleh para *teungku dayah*.

Kondisi yang sama juga terjadi di Aceh Utara, dengan terpilihnya pasangan Ilyas Pase yang berpasangan dengan Syarifuddin sebagai Bupati dan wakil Bupati Aceh Utara mengalahkan Tarmizi Karim dan Amirullah yang dijagokan para *teungku dayah*. Tarmizi A. Karim merupakan salah satu kontestan politik yang awalnya diprediksi akan memenangkan Pilkada Aceh Utara dengan mudah, bahkan ia mengajak para *teungku dayah* berpose secara parade menyatakan dukungan kepadanya di atas panggung kampanye, namun dukungan *teungku dayah* yang vulgar

⁷⁵ *Ibid.*

terhadapnya berakhir dengan kekalahan telak sang kontestan.⁷⁶

Perlawanan dan pembangkangan yang dilakukan oleh orang Aceh terhadap *teungku dayah* dalam pelbagai bentuknya itu merupakan salah satu indikasi yang merefleksikan betapa charisma legitimasi kekuasaan kharismatik mereka telah mengalami krisis. Krisis legitimasi kekuasaan *teungku dayah* tersebut mendorong terjadinya pergeseran eksistensi kepemimpinan mereka dalam masyarakat Aceh, dari pemimpin yang berpengaruh dalam beberapa bidang sekaligus (*polymorphic*) menjadi hanya berpengaruh pada satu bidang (*monomorphic*) saja yaitu agama (spiritual).⁷⁷

Semangat baru masyarakat Aceh muncul pasca perdamaian di Aceh. Kerinduan tentang kebersamaan, keutuhan dan lebih dari semua itu adalah ketenangan, *ate beue saboh, pike beue saban* (*hati yang satu, piker yang sama*) merupakan semangat umum yang muncul tidak hanya dalam lagu, tetapi kolektif orang Aceh.⁷⁸

Kelompok-kelompok dalam masyarakat memiliki identitas kolektif (*collective identities*), yang dalam banyak hal disebut identitas etnis. Identitas etnik ternyata melekat pada

⁷⁶ Nirzalin Armia, op.cit., hlm. 45.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 45.

⁷⁸ Irwan Abdullah, 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 134

setiap penduduk di Inonesia tanpa terkecuali.⁷⁹ Identitas etnik, yang di dalamnya terkandung ciri yag berbeda dari etnis lain, seperti wilayah, bahasa, agama, sejarah asal-usul, dan sebagainya, menjadi peneguh dan pemberi legitimasi untuk mengekspresikan kepentingan ekonomi dan politik yang menjadi aspirasinya.⁸⁰

Sesudah bergulirnya reformasi sejak tahun 2008, dinamika politik di daerah memasuki era baru. Aktor, institusi, dan budaya lokal bermunculan kembali dan mulai memainkan peran di dalam politik lokal. Aktor-aktor lokal yang terorganisir dan memiliki simbol kultural lokal kembali berada di panggung politik.⁸¹

Setelah krisis moneter dan politik 1997 dan 1998, yang diikuti dengan periode yang diberi label "reformasi", banyak pengamat mengatakan Indonesia memasuki suatu fase transisi dari pemerintahan otoriter menuju system pemerintahan yang lebih demokratis ketika masyarakat sipil memainkan peranan yang lebih menonjol. Terlebih lagi, transisi itu diiringi dengan proses desentralisasi, yang membuahkan otonomi kedaerahan dan demokrasi.⁸²

⁷⁹ Riwanto Tirtosudarmo, 2007. *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hlm. xiii & xv

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 15.

⁸¹ Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.), 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta. Hlm. x.

⁸² *Ibid.* hlm. 1.

Etnisitas bisa memberi arti pembebasan bagi suatu suku yang menggunakan ideologi itu untuk membalik status politis mereka yang terpinggirkan.⁸³ Seperti diketahui, salah satu faktor yang turut menjadi akar permasalahan konflik di Aceh adalah peminggiran identitas kultural masyarakat Aceh yang berlangsung selama puluhan tahun. Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang memiliki identitas kultural yang sangat kuat, serta menjunjung adat mereka berdasarkan nilai-nilai Islam.⁸⁴

Geertz menyatakan bahwa 'justru proses pembentukan Negara berkedaulatan rakyat itulah yang mendorong sentiment parokhialisme, komunalisme, rasialisme, karena semua itu memperkenalkan pada masyarakat sebuah "hadiah" baru yang berharga yang dapat diperebutkan dan sebuah kekuatan baru yang menakutkan yang harus dihadapi'.⁸⁵

Naiknya pamor Partai Demokrat di Aceh sedikit banyak tidak bisa lepas dari citra pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus Ketua Dewan Pembina dari partai berlambang bintang segi tiga tersebut. Terciptanya perjanjian perdamaian di Aceh yang ditorehkan di era pemerintahan SBY menjadi faktor penting yang cukup positif

⁸³ *Ibid.* hlm. 28.

⁸⁴ Samsul Hadi, dkk., 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: CIRes FISIP UI - Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 48.

⁸⁵ Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.), *op.cit.*, hlm. 31.

dalam memori pemilih Aceh.⁸⁶ Dalam pemilihan presiden yang berlangsung tanggal 8 Juli 2009, SBY yang berpasangan dengan Boediono menang mutlak di Provinsi Aceh dengan perolehan suara sebanyak 93,25%.⁸⁷

Kedekatan hubungan politik muncul antara bagian-bagian dari GAM dan presiden yang saat ini berkuasa di Jakarta, SBY. Mayoritas masyarakat Aceh menyadari bahwa perdamaian yang berkelanjutan di Aceh akan lebih aman di tangan pemerintahan SBY. Ketika SBY mengunjungi Aceh dua minggu sebelum pemilu, ribuan masyarakat berkumpul di stadion utama di Banda Aceh untuk menyambutnya. Masa itu dikerahkan oleh Sofyan Daud, mantan komandan GAM dan juga tokoh terkemuka. Ini juga terjadi dalam skala yang lebih kecil pada wakil presiden Jusuf Kalla dari partai Golkar. Proses perdamaian itu sebetulnya sebagian besar merupakan hasil dari Kalla dan timnya. PD memenangkan sepuluh dari 69 kursi dalam dewan sementara Golkar mendapatkan 8 kursi.⁸⁸

⁸⁶Berebut Nasionalisme di Kancan Lokal, dalam <http://otomotif.kompas.com/read/2009/04/03/09120621/direktori.html> (akses: 25 Oktober 2013).

⁸⁷ Persentase Hasil Perhitungan Suara Sah Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2009 Menurut Provinsi, dalam http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=34¬ab=5 (akses : 1 November 2013).

⁸⁸ "Pemilu Aceh: Sebuah Keniscayaan", dalam *Kabar Pemilu Nomor 8, Juni 2009* [http://tapol.org/sites/default/files/Pemilu 2009 Issue 8.pdf](http://tapol.org/sites/default/files/Pemilu%202009%20Issue%208.pdf) (akses: 18 November 2013).

Kecenderungan naiknya pamor partai-partai nasionalis tidak lepas dari berubahnya orientasi politik pemilih di wilayah "Serambi Mekkah" ini. Hasil survei menyebutkan sebagian besar responden pemilih Aceh (47,2 %) menyatakan identitas keagamaan dari partai politik tidak menjadi hal yang memengaruhi afiliasi politik mereka di pemilu tingkat nasional.⁸⁹

8. Kesimpulan

Dinamika Politik Masyarakat Aceh Utara menarik untuk dikaji untuk melihat sejauh mana partisi politik & orientasi masyarakat dalam menitipkan aspirasi pada anggota dewan. "Tekanan" luar biasa secara politik dari Golkar tidak mampu meredam partai berbasis Islam. Hal ini dapat dilihat dari kultur masyarakat Aceh. Di mana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Aceh menggunakan ajaran-ajaran Islam sebagai pedoman yang harus ditaati.

Ketokohan Ulama pada kehidupan berpolitik di Aceh Utara begitu terasa pada masa 1970an sampai dengan 1980an. Namun, hal ini mulai berubah ketika orientasi ulama dianggap masyarakat Aceh lebih mendukung kebijakan-kebijakan yang pro pemerintah. Kharisma ulama yang memudar nampak pada pemilihan Gubernur Aceh dan juga

⁸⁹ Berebut Nasionalisme di Kancan Lokal, dalam <http://otomotif.kompas.com/read/2009/04/03/09120621/direktori.html> (akses: 25 Oktober 2013).

Bupati Aceh Utara, di mana pasangan yang mendapat dukungan ulama mengalami kekalahan dari pasangan independen yang lebih mengusung semangat keAcehan.

Dari peta perpolitikan di Aceh Utara terlihat terjadinya perubahan orientasi berpolitik masyarakat Aceh Utara dari yang semula berpedoman pada ulama dengan partai berbasis Agama bergeser ke semangat etnisitas yang diwakili oleh kemenangan Partai Aceh pada pemilu yang terakhir di tahun 2009 dan juga pemilihan kepala daerah atau pemilihan bupati di Kabupaten Aceh Utara yang paling terakhir.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdullah, Adnan. 1976. *Transmigrasi dan Penduduk Setempat di Aceh Suatu Studi Mengenai Hubungan Sosial di antara Mereka*. Jakarta: Proyek Research Departement P & K, Darussalam.
- Abdullah, Taufik. 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Press.
- Aceh Utara: Data, Informasi dan Promosi tahun 2004* (Lhokseumawe: Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten aceh Utara, 2004).
- Aceh Utara Dalam Angka, Kerjasama BPS dengan Bappeda Kabupaten Aceh Utara Tahun 1988, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, dan 2013.
- A. Hadi Arifin, dkk. *Aceh Utara: Dari Kerajaan Samudera Pasai ke Era Industrialisasi* (Lhokseumawe: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, tt).
- Ahmad, Zakaria (Konsultan). 1981. *Sejarah Pendidikan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh*, Departemen P&K, Pusat Penelitian Sejarah Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dukumentasi Kebudayaan Daerah.
- Alfian (Ed.). 1977. *Segi-Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh : Hasil-Hasil Penelitian Dengan Metode "Grounded Research"*. Jakarta: LP2ES.
- Alfian, Teuku Ibrahim. "Wajah Rakyat Aceh Dalam Lintasan Sejarah, Kertas Prasaran pada Seminar Kebudayaan dalam Rangka PKA kedua dan Dies Natalis XI

Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 21 -25 Agustus 1972.

Alfian, Teuku Ibrahim. "Sebuah Studi Pendahuluan tentang Kontak Kebudayaan di ATJEH pada awal abad XX", photo copy, PLPIIS, Aceh, Banda Aceh, nd.

Amiruddin, M. Hasbi, Jami'atu Al-Diniyah : Pemrakarsa Lahir Madrasah di Aceh, " Dalam *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 6, 2011, P3KI IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.

Arsip Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara.

Atjeh Dalam Angka. Kantor Sensus dan Statistik Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 1973.

Atmaja, Nengah Bawa. 1984. *Pekerjaan di Luar Pertanian pada Petani Transmigran Jawa di Desa Bukit Hagu, Lhoksukon, Aceh Utara*. Banda Aceh: PLPIIS Unsyiah.

Ayat Rohaedy, *Struktur Masyarakat Pasai dalam Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra (Kumpulan Makalah Diskusi)*, (Jakarta: Depdikbud, Dirjenbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993).

Berita Acara Nomor 01/A/C.1/VI/1991 Tentang Penghitungan Jumlah Penduduk WNRI Yang Terdaftar.

Berita Acara Nomor 02/A/C.1/VIII/91 Tentang Penghitungan Jumlah Pemilih Yang Terdaftar.

Berita Acara Nomor 04/VI/PPD II/1992 Tentang Penghitungan Suara Daerah Tingkat II Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD I, dan DPRD II.

- Boeke, J.H.. 1983. *Prakapitalisme di Asia*. Penerjemah D. Projosiswoyo. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bungin, H.M. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Castles, Lance, and Alizabeth C. Morris, "Pola Pembangunan Kota di Aceh", Kertas Kerja Prasaran Pada Seminar Pembangunan Wilayah III, Banda Aceh, 21 - 23 Januari 1976.
- Chris Manning, 1990. *Peningkatan Angka Kriminalitas di Lhokseumawe*, Banda Aceh: PSISB Unsyiah.
- Daldjoeni, N. "Pemindahan Penduduk ke Luar Jawa selama 70 tahun", *Kompas*, No. 103, tahun XII, abu, 27 Oktober 1976.
- Data Statistik pada Kantor Desa Bukit Hagu tahun 1983.
- Dinas Informasi dan Komunikasi, *Aceh Utara: Dari Kerajaan Samudera Pasai Sampai Era Industrialisasi*, (Pemkab Aceh Utara:2002).
- Djam'an, Satori dan Aan Komariah, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Dokumentasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum-1987 di Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara.
- Geertz, Clifford. 1983. *Abangan, Santri, Priayi dalam Masyarakat Jawa*. Diterjemahkan oleh Aswab Mahasin. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Gottschalk, Louis. 1969. *Mengerti Sejarah*, terjemahan Nugroho NS. Jakarta: UI Press.
- Goode, William J.1983. *Sosiologi Keluarga*. Diterjemahkan oleh Sahat Simamora. Jakarta: PT Aksara.

- Gubernur Aceh, *Aceh Dalam Angka*, (Banda Aceh: Humas Pemda 1979).
- Heeren, H.J.. 1979. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.) , 2007. *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta.
- Heru Cahyono, 2008. "Potret Kelembagaan Gampong yang Lumpuh di Meuria, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara", dalam Irine Hiraswati Gayatri (ed.), *Runtuhnya Gampong di Aceh: Studi Masyarakat Desa Yang Bergejolak*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dengan Pusat Penelitian Politik-LIPI.
- Hussein, Ismael. 1972. "Hari Depan Kebudayaan Aceh". *Makalah Bandingan pada Seminar*.
- Irwan Abdullah, 2007. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jalaluddin. 1976. Masalah Penyebaran Penduduk Khususnya Transmigrasi. Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Binacipta.
- Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, 2012. *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Kantor Statistik Provinsi D.I.Aceh, 1980.
- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Kasihani, Toto dan Abdullah Mustafa. 1976. Aspek-Aspek Sosial Budaya Proyek Transmigrasi Delta Upang. Dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta.

- Kartodirdjo, Sartono. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Keadaan penduduk Kabupaten Aceh Utara akhir tahun 1973, Kantor Sensus Statistik Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Utara, Lhokseumawe. Jumlah penduduk menurut Daftar Statistik PPD TK II Aceh Utara (Agustus 1976), 538.935 jiwa. Lihat juga lampiran berita acara No.01/A.1/VIII/1976, tentang penghitungan jumlah penduduk WNRI, Daerah Istimewa Aceh.
- Kodiran. 1975. "Kebudayaan Jawa". Dalam Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Koentjaraningrat. 1964. "Celapar: Sebuah Desa di Jawa Tengah Bagian Selatan". Dalam Koentjaraningrat. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- . 1982. Lima Masalah Integrasi Nasional. Dalam Koentjaraningrat. *Masalah-Masalah Pembangunan Bunga Rampai Anthropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES.
- Kuntowoyo, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003).
- Kuroda, Toshio, "Internal Migration; an Over New of Problems and Studies", *World Population Conference*, Vol. IV Migration, Urbanization and Economic Development, New York, 1967.
- Lampiran I Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh tanggal 3 Juli 1987 nomor 171.2/602/1987 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Utara Yang Diresmikan.

- Lampiran I Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh Tanggal 14 Juli Nomor 171.2/343/1992.
- Lampiran V: Berita Acara Nomor 275/A/C.1/V/PPD-II 1987 Tentang Penghitungan Suara Daerah Tingkat II (Model DA).
- Leana Avonius dan Sehat Ihsan Shadiqin (ed.), 2010. *Adat Dalam Dinamika Politik Aceh*. Banda Aceh: ICAIOS.
- Lee, Everett S. 1970. "A Theory of Migration", in George J. Demko, Harrold M. Rose, and George A. Schnell (eds), *Population Geography: A Reader*. 228-298.
- Mantra, Ida Bagoes. 2003. *Demografi Umum*. Edisi kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Chandra Rizqi, "Strategi Pemenangan Mutlak Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- M. Isa Sulaiman dan Gerry van Klinken, 2007. "Naik Daun dan Kejatuhan gubernur Puteh", dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed.), *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, KITLV-Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Monografi Aceh Utara Tahun 1986, (Lhokseumawe: BPS dan BAPPEDA Aceh Utara).
- Morina Oktavia, 2009. "Potensi Ulama dalam Mempertahankan Perdamaian Aceh", dalam *Merangkai Kata Damai*. Banda Aceh: Katahati Institute.

- Mulder, Niels. 1983. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa: Kelangsungan dan Perubahan Kultur*. Penerjemah Alois A. Nugroho. Jakarta: PT Gramedia.
- Munir, R. 2000. *Migrasi*. dalam Lembaga Demografi FEUI. *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta : UI.
- Naim, Mochtar. 1976. "Problema dan Prospek Transmigrasi di Pasaman Barat". Dalam *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Binacipta.
- Nasikun. 1974. *Sebuah Pendekatan untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*. Jogjakarta: Fakultas Sosial dan Politik UGM.
- Natsir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia.
- Nirzalin Armia, 2009. "Runtuhnya Pesona Kekuasaan Kharismatik Teungku Dayah di Aceh", dalam *Merajut Aceh Dari Jogja: Kompilasi Pemikiran Intelektual Muda Aceh Yogyakarta*. Yogyakarta: Himpasay-Nuha Litera.
- Oey, Mayling. 1977. *Masalah Kependudukan dan Implikasinya terhadap Angkatan Kerja dan Lapangan Kerja di Indonesia*. Jurnal Penelitian Kerja. II, Nomor 4. Jakarta: Penerbit Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara di KPU Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupate/Kota Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009, tertanggal 20 April 2009.
- Perselah Rapat Panwaslak Tingkat II Aceh Utara tanggal 26 Mei 1992.

- Perselah Rapat Panwaslak Tingkat II Aceh Utara Tanggal 15 Juni 1992.
- Raden, Malik. *Perkebangan Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi DI Aceh Tahun: 2001*.
- Radjagukguk, Bostang. 1984. Pembukaan Lahan Transmigrasi. *Harian Kompas*, 28 Januari 1984.
- Riwanto Tirtosudarmo, 2007. *Mencari Indonesia: Demografi-Politik Pasca-Soeharto*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Saby, Yusny. Strategi Pembinaan Dayah untuk Masa Depan Aceh. Dalam *Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 6, 2011, P3KI IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2011.
- Said, Mohammad. 1961. *Aceh Sepanjang Abad*. Djilid Pertama. Medan: Waspada.
- Sajogyo. 1978. Lapisan Masyarakat yang Paling Miskin di Pedesaan Jawa". *Prisma*. VII. No. 3. Jakarta: LP3ES.
- . 1983. *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa*. Jakarta: CV Rajawali.
- Samsul Hadi, dkk., 2007. *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal dan Dinamika Internasional*. Jakarta: CIREs FISIP UI – Yayasan Obor Indonesia.
- Serambi Indonesia, Edisi Rabu 9 September 1999, hlm. 4.
- Siegel, James T. 1968. *The Rope of God*. University of California Press: Berkeley and Los Angeles.
- Soemawoto, Otto. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Jambatan.
- Soepardi, Goewono. 1983. Tata Huni Lahan Pelita IV: Mutu ata Jumlah. *Kompas*, 8 September 1983.

- Subagio. 1976. "Masalah Penyebaran Penduduk Khususnya Transmigrasi". Dalam Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jakarta: Binacipta.
- Subroto. 1974. Kebijakan di Bidang Kesempatan Kerja dan Transmigrasi dalam Pelita II. *Prisma*, III, No. 2. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Sufi, Rusdi dkk. 2000. *Keanekaragaman Budaya dan Suku Bangsa Di Aceh*. Banda Aceh: BKSNT Banda Aceh.
- Sutoro Eko, 2007. *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta,.
- Sunaryo. 1982. "Peranan Transmigrasi dalam Pelestarian Pancasila". *Waspada*, 19 Oktober 1982.
- Sutoro Eko, 2007. *Bergerak Menuju Mukim dan Gampong*. Yogyakarta: IRE Yogyakarta.
- Teuku Syamsuddin, 1998. *Kebudayaan Aceh, dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Thamren Ananda, 2009. "Perdamaian Aceh Bertopeng Sebelah", dalam *Merangkai Kata Damai*. Banda Aceh: Katahati Institute.
- Tjiptoherijanto, Prijono 2000. *Mobilitas Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000.
- TP2WI Kabupaten Aceh Utara, 1995.
- Transmigrasi, Kanwil Dit. Jen. Prop. Dista. 1977. *Laporan Tahunan Tahun 1976/1977*. Banda Aceh.
- Tohir. 1983. *Seuntai Pengetahuan tentang Usaha Tani Indonesia*. Jilid II. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Uka Tjandrasasmita, Pasai Dalam Dunia Perdagangan, dalam *Pasai Kota Pelabuhan Jalan Sutra (Kumpulan Makalah*

Diskusi), (Jakarta: Depdikbud, Dirjenbud, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993).

United Nations, 1971. *Report and Selected Papers of the Regional Seminar on Ecological Implication of Rural and Urban Population Growth*, Asian population Studies Series, No. 10, Bangkok.

Yasni, Zainal. 1972. "Pola Pemasaran (Input dan Output) dalam dan Luar Negeri". Dalam Panitia Simposium. *Pola Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Indonesia*. Jakarta: PERHEPI.

2. Sumber Lisan

Abdurrahman (50 tahun). Security kebun sawit Cot Girek. *Wawancara*. Cot Girek, 4 November 2013.

Abu Saifuddin (73 tahun). Mantan Anggota DPRD Aceh Utara. *Wawancara*. Lhokseumawe, 16 November 2013.

Ali Syafi'i. Sekretaris Majelis Pendidikan Aceh Utara. *Wawancara*. Lhokseumawe, 7 November 2013.

Dahlia (52 tahun). Kasie Pengerahan dan Penempatan, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Kabupaten Aceh Utara. *Wawancara*. Lhokseumawe, 6 November 2013.

Hartati (71 tahun). Mbah dukun. *Wawancara*. Bukit Hagu, 5 November 2013 di Bukit Hagu.

Hamdani. Kepala BPS Aceh Utara. *Wawancara*. Lhokseumawe, 7 November 2013.

Ibrahim Bewa. Ketua Majelis Pendidikan Aceh Utara. *Wawancara*. Lhokseumawe, 7 November 2013.

Mawardi. Kabid Dikdas Disdidpora Kab. Aceh Utara. *Wawancara*. Lhokseumawe, 5 November 2013.

M. Ali Abdullah. Kabid Program dan Pelaporan Disdik Pora Aceh Utara. *Wawancara*. Lhokseumawe, 5 November 2013.

Suharno (57 tahun). Security dan mantan pegawai pabrik gula Cot Girek. *Wawancara*. Cot Girek, 4 November 2013.

Suroto (41 tahun). Kepala Dusun Sukadamai. *Wawancara*. Bukit Hagu, 5 November 2013.

Suyanti (50 tahun). Usaha Warung. *Wawancara*. Bukit Hagu, 6 November 2013.

3. Sumber Internet

Agus Irwanto, Sejarah Lahirnya Al-Muslim Peusangan:
<http://www.acehbaru.com/sejarahlahirnya-almuslim-peusangan/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Thawalib

<http://www.unic-jakarta.org/index.php/id/e-newsletter/96-bahasa-categories/info-terkini/september-2013-bahasa/4157>

<http://leser-aceh.blogspot.com/2012/02/sejarah-taman-siswa.html>

<http://www.yiela.com/view/2726021/-anggaran-besar-mutu-pendidikan-di-aceh-utara-rendah>

http://id.wikipedia.org/wiki/Teuku_Nyak_Arif

<http://www.acehutara.go.id/berita-bupati-aceh-utara-masih-butuh-perbaikan-mutu-pendidikan.html>

<http://www.acehtraffic.com/2013/02/2013-dinas-pendidikan-aceh-utara.html>

"Faktor penyebab menurunnya elektabilitas partai Islam, khususnya di Aceh", dalam <http://qasehyalnis.blogspot.com/2013/02/faktor-penyebab-menurunnya.html> (akses: 25 Oktober 2013).

"Pemilihan Umum Tahun 1971" , dalam http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=20&from_box=list&hlm=1&search_ruas=&search_keyword=&activation_status= (akses 18 November 2013).

http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41 (akses: 25 Oktober 2013).

www.pemilu.asia (akses: 25 Oktober 2013).

"Pemilu Aceh: Sebuah Keniscayaan", dalam *Kabar Pemilu Nomor 8, Juni 2009* http://tapol.org/sites/default/files/Pemilu_2009_Issue_8.pdf (akses: 18 November 2013)

<http://migas.bisbak.com/1111.html> (akses: 18 November 2013).

Berebut Nasionalisme di Kancan Lokal, dalam <http://otomotif.kompas.com/read/2009/04/03/09120621/direktori.html> (akses: 25 Oktober 2013).

Pandangan Kuantitatif Tosh, dalam <http://reviewerworks.blogspot.com/2012/06/kuantitasidanmakna-dalamsejarah.html>) diakses 13 November 2013

Yogi Setya Permana, *Sekilas tentang Politik Demografi*, diakses 3 November 2013.

<http://www.acehutara.go.id/hal-geografi.html> diakses 30 Oktober 2013.

<http://www.aceh.tribunnews.com>., diakses tanggal 30 Oktober 2012.

http://razuardi.blogspot.com/2013_01_01_archive.html, diakses 10 November 2013.

<http://www.acehutara.go.id/hal-demografi.html> diakses 20 Oktober 2013.

http://portal.radioantero.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1939:bps--pengangguran-tertinggi-terdapat-di-kabupaten-aceh-utara&catid=46:ap&Itemid=82, diakses tanggal 6 November 2013.

Martum Pulungan. "MENGENAI PABRIK GULA COT GIREK".

<http://plantersclub.blogspot.com/2013/09/pabrik-gula-tjot-girek.html> (diakses tanggal 9 Desember 2013).

Sirajudin Hasbi. " Perjalanan Industri Gula di Indonesia : (Tidak) Selalu Terasa Manis". Dalam [id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/perjalanan-industri-gula-di-Indonesia-tidak;selalu-terasa manis-070313971.html](http://id.berita.yahoo.com/blogs/newsroom-blog/perjalanan-industri-gula-di-Indonesia-tidak;selalu-terasa-manis-070313971.html) (diakses tanggal 10 Desember 2013).

Tentang Penulis



Sudirman adalah peneliti pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh. Dilahirkan di Aceh Selatan, tahun 1971. Menyelesaikan pendidikan S-1 Sejarah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S-2 di Universitas Padjadjaran Bandung. Beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan: *Bireuen Kota Juang 1945-1949* (2010). *Pemetaan Mesjid-Mesjid Bersejarah di Aceh* (2011). *Peranan Media Massa pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan RI di Aceh 1945-1949* (2012). *Pejuang Aceh di Medan Area* (2013).



Sri Waryanti adalah peneliti muda pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh. Lahir di Yogyakarta, tahun 1968. Menyelesaikan sarjana pada bidang Ilmu Sejarah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1992. Beberapa hasil penelitian yang telah diterbitkan antara lain *Si Mata Biru* (2011), *Akulturası Budaya Aceh pada Masyarakat Jawa di Kota Langsa* (2012) dan lain-lain.



Nasruddin AS adalah staf pengajar pada Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh. Dilahirkan di Sikabu tahun 1962. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Adab IAIN Ar Raniry Banda Aceh, tahun 1988 dan S2 di Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1997. Beberapa hasil tulisan yang diterbitkan antara lain

Tgk.H.Araby Ahmad: *Pemikiran Fiqh, Hadits dan Kekanik (Dalam Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh)* (2004); “Dakwah Melalui Batu Nisan (Tinjauan Arkeologis)”, dalam Buku *Dakwah Tekstual dan Kontekstual* (2006); *Strategi Pertahanan Kerajaan Aceh Darussalam Abad XVI -XVIII M (Kajian Arkeologis)* (2013); dan *Benteng Kesultanan Aceh (Kajian Filologi, Arkeologi dan Topografi)* (2013).



Hasbullah adalah peneliti muda pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh. Lahir di Guhang, tahun 1975. Lulus S-1 Ilmu Sejarah pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2003. Hasil penelitian yang dipublikasikan; *Cina Dalam Lintas Perdagangan di Aceh Barat Daya* (2010), *Dari Perjuangan Hingga Pengasingan; Biografi Teungku Putik* (2012), dan *Pantun Dalam Masyarakat Tamiang* (2013).



Agung Suryo Setyantoro adalah peneliti pertama pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Banda Aceh. Dilahirkan di Yogyakarta tahun 1981. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ilmu Sejarah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2006. Beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan antara lain *Ranup pada Masyarakat Aceh* (2009), *Nelayan Depik di Dataran Tinggi Gayo* (2012), *Kopi dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Gayo* (2012), dan *Melayu Indonesia: Perubahan dan Kesenambungan Identitas Melayu di Sumatera Utara* (2013)